



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM  
SENI BUDAYA KETERAMPILAN DI SEKOLAH DASAR  
NASIONAL 1, BEKASI, JAWA BARAT**

**TESIS**

**Wahyu Maliki**

**0906589381**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCA SARJANA STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
JAKARTA  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM  
SENI BUDAYA KETERAMPILAN DI SEKOLAH DASAR  
NASIONAL 1, BEKASI, JAWA BARAT**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister**

**Wahyu Maliki**

**0906589381**

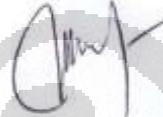
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCA SARJANA STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
JAKARTA  
JUNI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk  
Telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Wahyu Maliki**

**NPM : 0906589381**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : Juni 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Wahyu Maliki

NPM : 0906589381

Program Studi : Ilmu Administrasi

Judul Tesis : Analisis Implementasi Kurikulum Seni Budaya  
Keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi,  
Jawa Barat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada program Studi Ilmu Administrasi, Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Ketua Sidang : Dr. Amy Y.S Rahayu, M.Si.

Pembimbing : Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ.

Penguji : Drs. Lisman Manurung, M.Si, P.hD.

Sekretaris : Lina Miftahul Jannah, M.Si.

Ditetapkan : Jakarta

Tanggal : Juni 2012

**UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Nama : Wahyu Maliki  
NPM : 0906589381  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Judul Tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Seni Budaya Keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi, Jawa Barat

Telah Disetujui

Pembimbing



(Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.Publ)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat, Taufik dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Implementasi Kebijakan Kurikulum Seni Budaya Keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi, Jawa Barat.

Banyak hal yang didapat, baik di ruang kelas, saat berkumpul dalam tawa, canda dan kesedihan. Semuanya menjadi pemicu semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulis berharap bahwa tesis ini dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan Kurikulum Seni Budaya dan Keterampilan. Sehingga tujuan dari kebijakan itu dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini banyak sekali mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, baik dalam masa perkuliahan, bimbingan, maupun saat penelitian dilapangan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ketua Program Pascasarjana Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc.
2. Dosen Pembimbing Prof. Eko Prasajo, Mag.rer. Publ yang telah membuka wawasan penulis dengan penuh perhatian memberikan bimbingan hingga selesainya tesis ini.
3. Tim Penguji, Dr. Amy Y.S Rahayu, M.Si, Drs. Lisman Manurung, M.Si, P.hD, dan Lina Miftahul Jannah, M.Si.
4. Seluruh dosen yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
5. Para Pimpinan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas kesempatan dan biaya yang telah dikeluarkan kepada saya untuk memperoleh gelar Magister.

6. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
7. Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dari Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi, Jawa Barat, yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melengkapi data-data yang diperlukan.
8. Istri dan anak-anakku tercinta – Lia Rosita - Muhammad Khairurrazan, Rihanna Fayi Cantiga dan Almh. Kyla Nazla Humayra.
9. Kedua orang tua kami – H. Achmad Sjamalani HS dan Hj. Sri Juniti H – dan Keluarga di Kawi-kawi dan Bekasi – Atas doa yang tidak pernah terputus kepada kami.
10. Mbak Ana di Sekretariat PSIA Salemba dan Mas Pri Perpustakaan PSIA.
11. Keluarga Besar Kelas Pendidikan angkatan II.
12. Semua pihak lain yang tidak saya sebutkan satu persatu dalam pengantar ini.

Akhirul kata, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dari semua pihak yang telah membantu. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan kami berharap atas kritik dan saran yang diberikan.

Jakarta, Juli 2012

Wahyu Maliki

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Maliki  
NPM : 0906589381  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Kekhususan : Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-eksklusif Royalti-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Seni Budaya Keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi, Jawa Barat”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hal Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama ini tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Juni 2012

Yang menyatakan



Wahyu Maliki

## ABSTRAK

**Nama : Wahyu Maliki**

**NPM : 0906589391**

**Program Studi : Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan**

**Judul Tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Seni Budaya Keterampilan Di Sekolah Dasar Nasional Bekasi Jawa Barat.**

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kurikulum seni budaya keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivism. Sementara dari hasil analisis terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dilapangan telah dilakukan dengan memperhatikan empat faktor yang di kemukakan oleh George Edward III yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses komunikasi, koordinasi, komitmen, tanggungjawab yang dilakukan secara terstruktur dan tersebar secara akurat, jelas dan konsisten akan mereduksi berbagai kendala yang mungkin terjadi pada tataran pemahaman, persepsi, kompetensi dan komitmen kepala sekolah, guru dan pihak manajemen sekolah lainnya yang terlibat dalam implementasi kebijakan secara menyeluruh khususnya implementasi kurikulum seni budaya keterampilan. Secara garis besar disimpulkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum seni budaya keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat bisa menjadi contoh konkrit bagi sekolah-sekolah dasar lainnya dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan.

**Kata Kunci : Kurikulum Seni Budaya Keterampilan, Implementasi Kebijakan**

## ABSTRACT

**Nama : Wahyu Maliki**

**NPM : 0906589391**

**Program Studi : Administration and Education Policy Study**

**Judul Tesis : Analysis on Implementation of Policy Cultural, art and Skills Curriculum in National Elementary School, Bekasi, West Java.**

This study aims at analyzing the implementation and the factors that affect the implementation of the policy of cultural arts and skills curriculum in elementary National school 1, Bekasi, West Java. The research uses positivism approach. While the result of the analysis are the factor that affect the implementation approaches have been made having regard to the four factors that pointed out by George Edward III that is, communication, resources, disposition and bureaucratic structure . Based on the result of the study revealed that the process of communication, coordination, commitment, responsibility is done in a structured and distributed accurately, clearly and consistently reduces various hindrances that may occur at the level of perception, understanding, competence and commitment to the principal, teachers and other school management authorities involved in implementation of policy as whole, especially the implementation of curriculum culture, art and skills

**Key Words : Cultural, Art and Skills Curriculum, Policy Implementation.**

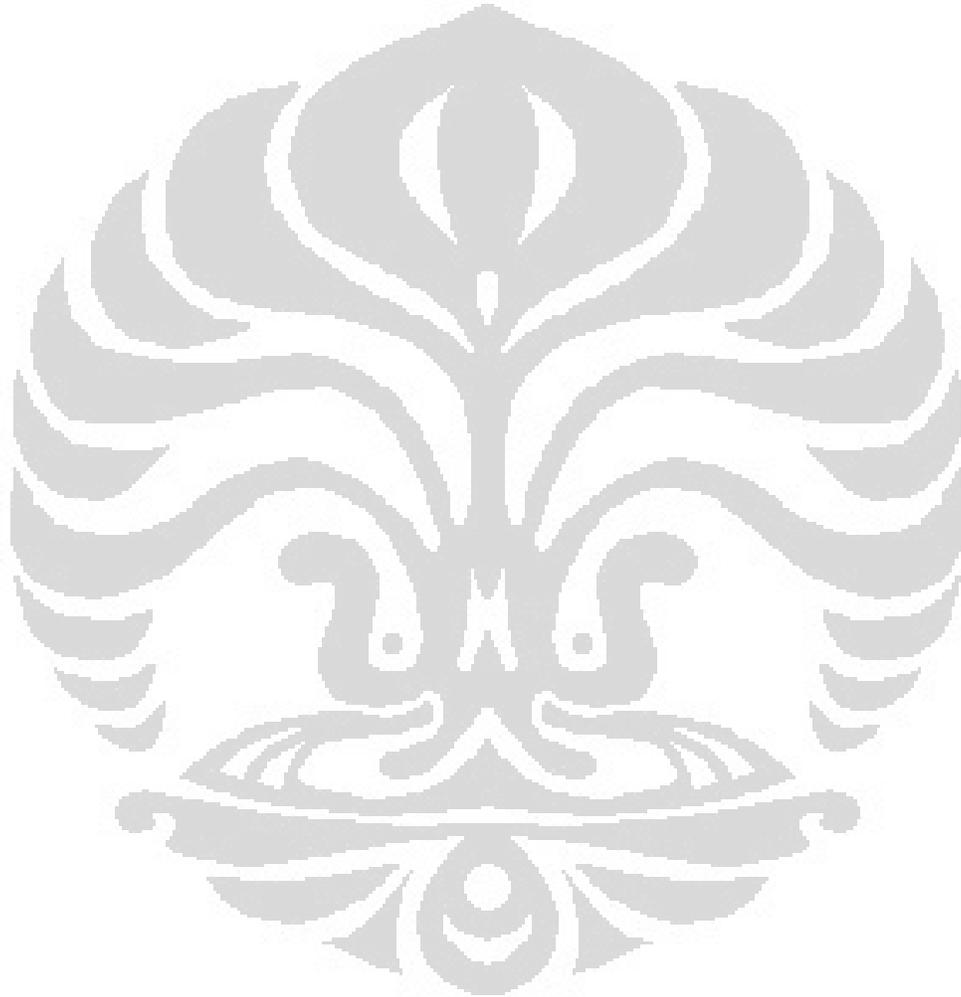
## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penelitian.....	9
<b>BAB 2 KERANGKA TEORI</b> .....	12
2.1. Kebijakan Publik.....	12
2.2. Proses Kebijakan Publik.....	15
2.3. Tujuan Kebijakan Pulik.....	17
2.4. Dampak Kebijakan Publik.....	19
2.5. Kebijakan Pendidikan Sebagai kebijakan Publik.....	21
2.6. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	24
2.7. Kurikulum.....	33
2.8. Pendidikan Seni Musik.....	38
2.9. Penelitian Sebelumnya.....	45
2.9.1 Pelaksanaan Kurikulum 1994 mata pelajaran Seni Di SMU se-Kabupaten Kuningan Jawa Barat.....	45
2.9.2 Telaah Pelaksanaan Kurikulum 1994 (Studi Implementasi Studi Kerajinan Tangan dan Kesenian di SLTP di Kabupaten Karawang).....	46
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b> .....	52
3.1. Pendekatan Penelitian.....	52
3.2. Jenis Penelitian.....	52
3.3. Instrumen Penelitian.....	53
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	53

3.4.1	Wawancara.....	53
3.4.2	Observasi.....	54
3.4.3.	Desk Research.....	55
3.5.	Populasi dan Sampel.....	55
3.6.	Teknik Analisis Data.....	57
3.7.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	58
<b>BAB 4</b>	<b>KURIKULUM SENI BUDAYA KETERAMPILAN</b>	<b>60</b>
	<b>SEKOLAH DASAR NASIONAL 1, BEKASI, JAWA BARAT</b>	
4.1.	Proses Penerapan Kurikulum.....	60
4.2.	Tujuan dan Sasaran Kurikulum Seni Budaya Keterampilan.....	62
4.3.	Hasil Yang Diharapkan Dari Kurikulum Seni Budaya Keterampilan.....	63
4.4.	Profil Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat.....	67
<b>BAB 5</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	<b>74</b>
5.1.	Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Seni Budaya dan Keterampilan Di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi Jawa Barat.....	71
5.1.1.	Faktor Komunikasi.....	74
5.1.2.	Faktor Sumberdaya Manusia.....	75
5.1.3.	Faktor Birokrasi.....	79
5.1.4.	Faktor Disposisi.....	82
5.2.	Gambaran Implementasi Kebijakan Di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat yang dilakukan pihak manajemen sekolah.....	83
5.3.	Gambaran Upaya-upaya yang dilakukan oleh Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat dalam mendorong terselenggaranya Konsep Kebijakan Kurikulum Seni Budaya dan Keterampilan.....	87
5.4.	Gambaran analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kurikulum Seni Budaya Keterampilan di sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat.....	89
5.4.1	Komunikasi.....	89
5.4.2	Sumberdaya.....	92
5.4.3	Disposisi.....	94
5.4.4	Struktur Birokrasi.....	96
5.5	Interaksi Antar Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kurikulum Seni Budaya Keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa	98
<b>BAB 6</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>102</b>
6.1.	Kesimpulan.....	102
6.2.	Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>105</b>

## DAFTAR TABEL

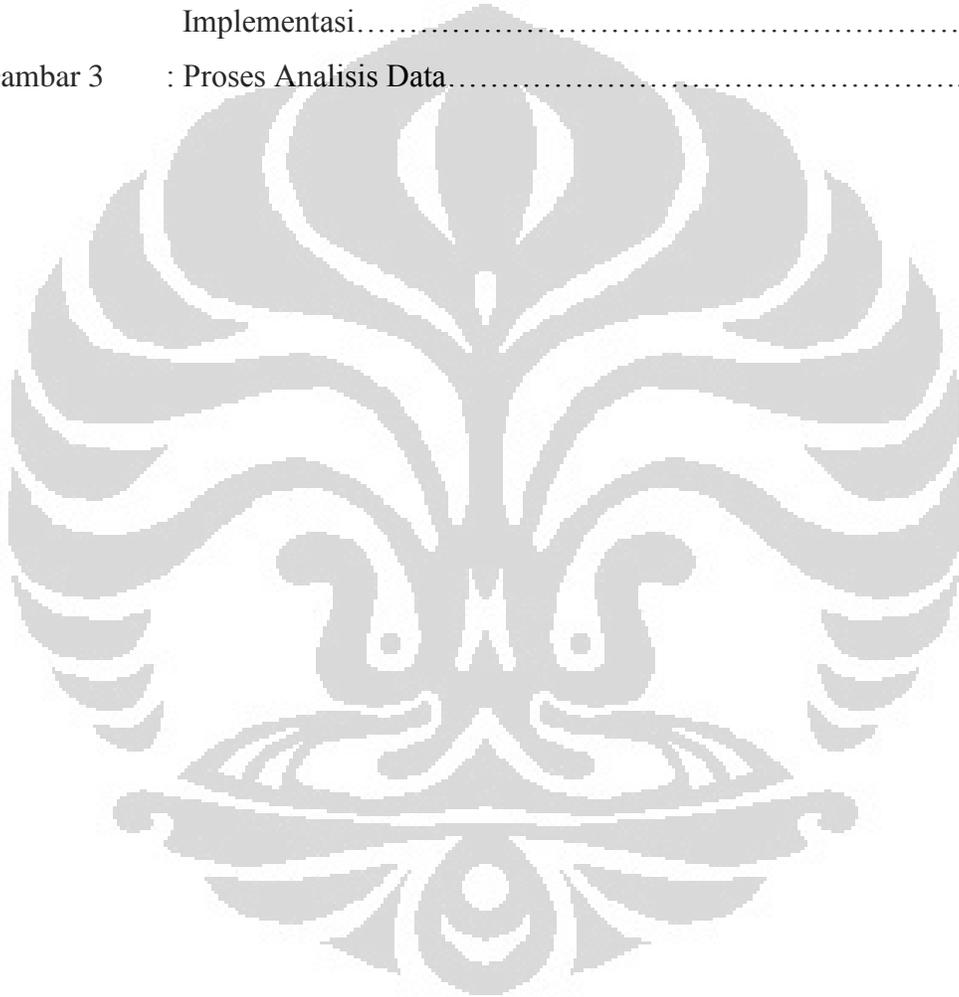
	<b>halaman</b>
Tabel 1 : Desain Operasional Konsep.....	51
Tabel 2 : Tabel Sumber Daya Manusia (SDM).....	80
Tabel 3 : Jadwal Ekstra Kurikuler.....	82



## DAFTAR GAMBAR

**halaman**

Gambar 1	: Proses Kebijakan yang Ideal (dikembangkan dari pendekatan dalam teori system).....	19
Gambar 2	: Diagram Dampak Langsung dan Tidak Langsung dalam Implementasi.....	35
Gambar 3	: Proses Analisis Data.....	62

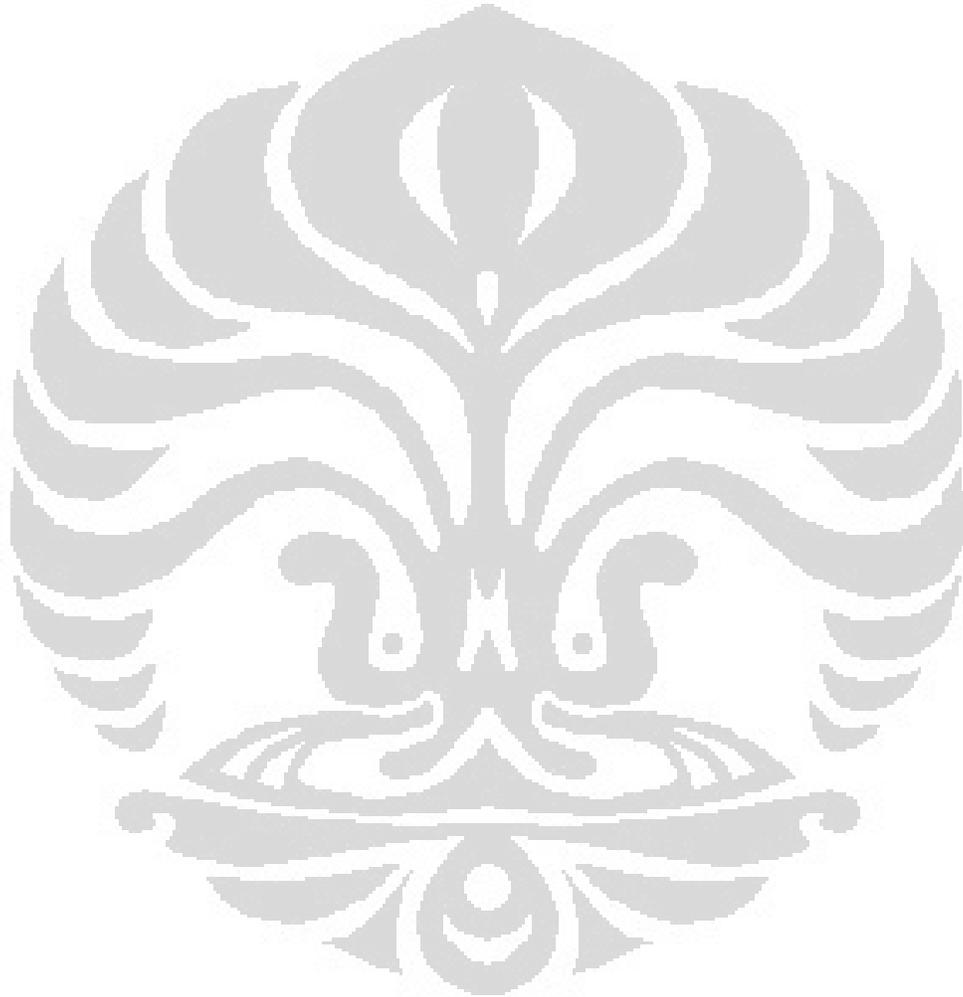


## DAFTAR LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

Koding Hasil Wawancara

Foto-foto Kegiatan SD Nasional 1, Bekasi, Jawa Barat



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Di zaman globalisasi sekarang ini, pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang dianggap penting di dunia, bahkan pendidikan sudah dianggap investasi di masa yang akan datang. Menurut Abbas Ghozali dalam bukunya, pendidikan merupakan hal penting yang sangat mempengaruhi perkembangan dan peradaban manusia. Pendidikan diyakini dapat menanamkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dengan itu manusia dapat meningkatkan kemampuannya dalam berkehidupan. Makna pendidikan secara sederhana menurut Soerdijanto, 1998, adalah suatu usaha manusia yang penting untuk memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan masyarakat.

Secara eksplisit dalam GBHN disebut bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah membentuk pembangunan sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan sesama manusia merupakan fokus kurikulum masa depan sebagaimana yang dikerangkakan yaitu Ipteks Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni. UU Sisdiknas pasal 5 ayat 1 mengatakan, Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang baik membutuhkan suatu kurikulum yang baik.

Didalam Bab 1 pasal 19 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini, peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta

memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan. Didalam Bab 1 pasal 1 (Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan Negara.

Kurikulum di Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan, dimulai pada tahun 1947 kurikulum pada tahun tersebut hanya berupa rencana pelajaran yang dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai. Selanjutnya pada tahun 1961 berkembang menjadi Kurikulum yang disempurnakan menjadi Rencana Pendidikan Sekolah Dasar, yang berubah lagi pada tahun 1975 menjadi Kurikulum Sekolah Dasar, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, dimana kurikulum ini mulai berkembang menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dan terakhir adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau dikenal dengan (KTSP). Tampaknya pada kurikulum (1994) yang berlaku, aspek keseimbangan tersebut belum terpenuhi. Kurikulum pendidikan formal di Indonesia hanya menekankan perkembangan intelektual semata dan tidak memperhatikan perkembangan kecerdasan emosi. Melihat alokasi waktu mata pelajaran musik setiap minggu hanya waktu 2 x 45 menit, (GBPP kurikulum mata pelajaran kesenian 1994) yang masih terbagi dengan mata pelajaran seni tari, seni rupa, seni musik dan keterampilan.

Kurikulum yang terakhir di buat yaitu kurikulum KTSP pada tahun 2006. KTSP adalah singkatan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, dan karakteristik peserta didik. Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di SD, SMP, SMA, dan SMK, serta Departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA dan MAK (BSNP, 2006).

Dalam Standar Nasional pendidikan dikemukakan bahwa kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Dari perubahan kurikulum dari tahun ke tahun tidak ada satu pun kurikulum di Indonesia yang berpihak pada pendidikan seni. Selama ini pendidikan seni hanya di pandang sebelah mata dan dianggap sebagai mata pelajaran pelengkap saja. Padahal seni itu sendiri sudah menjadi suatu industri yang besar diseluruh dunia, baik seni musik, drama, lukis, dan tari. Hal ini dapat kita lihat dari omset pusat perfilman dunia di Hollywood, perusahaan rekaman baik internasional dan Nasional, galeri-galeri di seluruh dunia, dan semuanya tersebut tidak bisa pandang sebelah mata.

Berkembangnya Industri pada bidang seni ini tentu berpengaruh pada pola pikir manusia, dimana pola pikir yang berkembang pada saat ini, adalah menginginkan anak-anaknya menjadi bagian dari pekerja seni dan sebagian lagi berharap ada efek samping (*side effect*) setelah mempelajari pendidikan seni musik. Hal ini dapat dilihat dari animo masyarakat yang sangat kuat dengan adanya tayangan berbagai macam lomba, baik menyanyi, akting, model dan tari yang kesemuanya itu ditayangkan langsung di televisi diikuti oleh ribuan peserta yang di seleksi, dan hampir semua tayangan lomba-lomba tersebut mempunyai *rating* yang cukup tinggi, dan hal ini di ikuti dengan menjamurnya sekolah-sekolah musik hampir di seluruh Nusantara. Sejalan dengan gairah masyarakat terhadap perkembangan seni tersebut, ternyata dipengaruhi oleh beberapa temuan-temuan yang berkembang pada beberapa tahun terakhir terhadap penelitian-penelitian terhadap efek dari pendidikan seni musik terhadap peningkatan kemampuan siswa terhadap mata pelajaran lain. Hanya saja, berkembangnya dunia seni pada masa sekarang ini kurang ditanggapi secara serius oleh pemerintah Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, dan tampaknya minat besar seorang anak di bidang musik belum mampu dijawab dengan memuaskan oleh kurikulum musik sekolah umum saat ini.

Pendidikan musik di sekolah belum dirasakan penting, karena memang belum menggali potensi anak didik secara utuh. Pemerintah lebih memperhatikan pendidikan mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang dianggap lebih bergengsi. Gardner didalam Champbell mengatakan, terdapat landasan yang

kuat untuk mengidentifikasi dan mengembangkan spektrum kemampuan luas pada diri anak, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logis-matematis, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal. Kecerdasan antarpribadi dan kecerdasan antarpribadi dan kecerdasan naturalis (Champbell, 2001:254). Teori ini lebih dikenal dengan Multiple Intellegence. Dengan adanya teori Gardner ini cukup menunjukkan bahwa musik dalam hal ini pendidikan seni, merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan pada diri anak. Studi-studi (Champbell, 2001:218) telah banyak menunjukkan bahwa pengaruh musik:

- Anak-anak kecil yang mendapatkan pelatihan musik secara teratur menunjukkan keterampilan motorik, kemampuan matematika, dan kemampuan membaca lebih baik dari pada kawan-kawan mereka yang tidak berlatih musik.
- Siswa sekolah menengah yang bernyanyi atau memainkan sebuah alat musik mempunyai skor hingga 52 poin lebih tinggi pada uji SAT dibanding mereka yang tidak mempunyai hobi itu.
- Mahasiswa yang mendengarkan Sonata Mozart untuk dua piano dalam D mayor (K.488) cenderung mendapatkan skor lebih tinggi dalam uji IQ untuk bagian spasial-temporal setelah mendengarkan karya itu.

Dengan banyaknya penemuan-penemuan baru di bidang pengembangan musik, pengaruhnya terhadap kecerdasan dan kemampuan seseorang, sudah selayaknya pemerintah meningkatkan perhatian terhadap pendidikan seni, khususnya pendidikan seni musik.

Terfokusnya kurikulum Nasional pada perkembangan kecerdasan intelektual didalam kurikulum menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam pola pikir dan perilaku siswa. Hal ini dapat kita lihat masih banyaknya perkelahian pelajar antar sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, dari tingkat lanjutan pertama, lanjutan atas dan perguruan tinggi. Bahkan hal ini terjadi pada sekolah yang sudah berstandar internasional. Hal ini dikemukakan oleh Robert Stenberg, seorang ahli psikolog dari Yale yang dikutip oleh Ary Ginanjar, "Bila IQ yang berkuasa, ini karena kita membiarkannya berbuat demikian. Dan bila kita membiarkannya

berkuasa, kita memilih penguasa yang buruk”. (Emosional Spiritual Quotient, 2008:5). Selanjutnya berdasarkan survey di Amerika Serikat pada tahun 1918 tentang IQ, ditemukan ”paradoks” membahayakan : ”Sementara skor IQ anak-anak makin tinggi, kecerdasan emosi mereka justru turun. Lebih mengkhawatirkan lagi, data hasil survey besar-besaran tahun 1970 dan 1980 terhadap orangtua dan guru menunjukkan, ”anak-anak generasi sekarang lebih sering mengalami masalah emosi ketimbang generasi terdahulunya. Secara pukulan rata, anak-anak sekarang tumbuh dalam kesepian dan depresi, mudah marah dan sulit diatur, lebih gugup dan cenderung cemas; impulsif dan agresif.” (Emosional Spiritual Quotient, 2008:6). Goleman menyatakan didalam Amstrong bahwa kecerdasan emosi perlu diajarkan di sekolah-sekolah, supaya anak-anak mempunyai peluang untuk memperoleh keterampilan yang akan membantu mereka menjadi lebih kebal terhadap depresi, gangguan pola makan, kehamilan yang tidak diinginkan, kekerasan, dan berbagai jebakan lain yang bisa menyabot murid yang paling menjanjikan. (Thomas Amstrong:130).

Ketidakseimbangan dalam pola pikir dan perilaku harusnya bisa di seimbangkan dengan mengembangkan kurikulum yang berbasis pada kecerdasan emosional, dalam hal ini salah satu *strength* nya adalah seni musik. Apalagi siswa sekolah dasar masih terbebani oleh padatnya beban mata pelajaran yang harus dihafal dikerjakan baik di sekolah maupun dirumah, dan kesemuanya itu akan menghilangkan kebahagiaan dan keceriaan mereka saat pada masa perkembangannya. Hal ini didukung pula oleh Martin Gardner (1997) didalam Champbell yang menjelaskan pandangan-pandangannya terdahulu dan mengatakan bahwa kecerdasan musik mempengaruhi perkembangan emosi, spiritual, dan kebudayaan lebih daripada kecerdasan-kecerdasan lainnya, dan dengan musik membantu pembentukan pola pikir dan pola kerja seseorang dengan cara menolong mereka dalam mempelajari keterampilan matematika, bahasa, dan ruang (Champbell, 2001:221)

Dari pendapat Champbell diatas, betapa pentingnya pendidikan musik baik dari tingkat anak-anak, di taman bermain, bahkan balita sekalipun, hingga pada saat mereka menempuh di pendidikan tinggi. Hal ini di perkuat oleh Fuller yang

mengutip dari Frank Wilson, *"Involving your child in musical activities at early age is really kind of an investment in his or her future"* (1994:14). Dari berbagai teori-teori yang

Berkembangnya teori-teori baru tentang manfaat dari musik di atas bertujuan untuk menginformasikan ilmu pengetahuan tentang teori peran pendidikan musik esensial diberikan dalam pendidikan integral agar peserta didik dapat memperoleh keseimbangan fungsi otak kiri dan kanan yang merupakan pendidikan humanis. Mencari solusi dalam rangka untuk memperbaiki penyimpangan krisis moral yang terjadi pada siswa-siswa sekolah. Memberikan sumbangan pemikiran kepada penentu kebijakan kurikulum Kemdikbud agar memasukkan pendidikan musik ke dalam kurikulum Nasional di tingkat pendidikan dasar.

Dari hasil pelaksanaan kurikulum pendidikan seni budaya dan keterampilan ini dapat diperoleh masukkan, antara lain:

1. Dengan adanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini guru seni budaya dan keterampilan (SBK) dituntut menguasai empat mata pelajaran langsung, yaitu, Seni Musik, Seni Tari, Seni Rupa dan kerajinan Tangan, sehingga guru-guru mata pelajaran seni budaya keterampilan ini mengalami kesulitan dalam mengembangkan mata pelajaran SBK ini, karena harus menguasai empat mata pelajaran bidang seni di dalam mata pelajaran seni budaya keterampilan.
2. Dengan kurikulum musik yang sekarang ini, dua jam pelajaran (2x45 menit) seminggu dirasakan sangat sedikit sekali untuk belajar seni musik, seni tari, seni rupa dan keterampilan karena dua jam pelajaran (2x45 menit) tersebut harus dibagi empat mata pelajaran.
3. Masih banyaknya guru musik di Sekolah Dasar yang berlatar belakang bukan dari pendidikan seni, baik dari Seni Musik, Seni Tari, dan Seni Rupa. Sehingga banyak terjadi kesalahan dalam pembelajaran Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan di Sekolah Dasar. Oleh karenanya, hendaknya guru-guru seni budaya keterampilan harus berlatar belakang pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Pendidikan Guru

Sekolah Dasar pada LPTK. (*Kajian Kebijakan Kurikulum Sekolah Dasar Tahun 2007 – Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum*)

4. Kurangnya Apresiasi terhadap pendidikan seni termasuk pendidikan Seni Budaya Tradisional, seperti gamelan dan angklung, di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dikhawatirkan membuat siswa sekolah dasar itu sendiri menjadi tidak mengenal dan tidak bisa memainkan seni budaya tradisi dari negaranya sendiri, bahkan sudah ada negara lain yang mengakui bahwa angklung berasal dari negara tetangga tersebut, ini membuktikan lemahnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan seni.

<http://www.tempo.co/read/news/2012/06/20/173411849/p-7-Klaim-Malaysia-Sejak-2007>

5. Kemampuan sekolah yang tidak sama dalam menyediakan sarana alat musik, menyebabkan kurangnya efektivitas pembelajaran pendidikan seni musik di sekolah-sekolah.
6. Kurangnya mahasiswa dari lulusan jurusan seni, yang mengakibatkan kurangnya guru Pendidikan Seni di sekolah-sekolah. Kurangnya lulusan dari jurusan pendidikan seni ini tak lepas dari terbatasnya jumlah kursi di perguruan tinggi.
7. Banyak siswa yang meningkat prestasi akademiknya dan adanya perubahan tingkah laku, setelah mengikuti pendidikan musik di lembaga formal maupun non formal (kursus-kursus).

Mencermati kondisional meta persoalan pada kurikulum seni budaya keterampilan yang hampir rata-rata dialami oleh guru-guru seni budaya keterampilan di Sekolah Dasar di atas, maka ada perbedaan dengan apa yang terjadi di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat. Sekolah Dasar ini justru berhasil mengimplementasikan kurikulum seni budaya keterampilan dengan baik. Bahkan sekolah ini seringkali menjuarai berbagai even-even lomba musik khususnya paduan suara tingkat lokal maupun internasional untuk kategori paduan suara anak-anak (*children choir*).

Baru-baru ini di tahun 2011, Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat dengan Gema Swara Nasional 1 Choir, berhasil menorehkan prestasi dengan meraih medali emas level 1 pada even 1<sup>ST</sup> Vietnam International Choir Festival and Competition 2011 Kategori Children's Choirs di Hoai An Vietnam pada tanggal 16-19 Maret 2011 lalu. Belum lagi even-even Nasional yang menorehkan prestasi yang luar biasa. Menurut rencana, Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat melalui Gema Swara Nasional 1 Choir akan kembali mengikuti 1<sup>ST</sup> Xinghai Prize International Choir Championships di Guangzhou (Canton), China pada tanggal 8 – 12 November 2012 mendatang.

Menurut daftar Top 1000 Ranking untuk kategori *Children Choir's* yang dilansir oleh Interkultur, sebuah organisasi yang didirikan oleh Gunter Titsch dan berpusat di Jerman, yang bertujuan mengumpulkan orang-orang dari berbagai ragam budaya, bangsa dan ideologi untuk di satukan dalam sebuah kompetisi yang besar untuk semua jenis ensemble musik, paduan suara, musik rakyat dan tari-tarian dalam skala yang global, menempatkan Gema Swana Nasional 1 Choir di peringkat 521 dunia.

[http://www.interkultur.com/leftnavi/worldrankings/print/5fa2229823e864098d5e05f97af02322/?tx\\_amranking\\_pi1%5Blist\\_id%5D=1&tx\\_amranking\\_pi1%5Baction%5D=print](http://www.interkultur.com/leftnavi/worldrankings/print/5fa2229823e864098d5e05f97af02322/?tx_amranking_pi1%5Blist_id%5D=1&tx_amranking_pi1%5Baction%5D=print)

Kesuksesan Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat dalam berbagai even-even lomba paduan suara menunjukkan bahwa penerepan kurikulum seni budaya keterampilan khususnya seni musik telah berhasil diimplementasikan oleh seluruh instrumen sekolah baik kepala sekolah, guru-guru seni budaya keterampilan, komite sekolah dan pendukung lainnya. Hal ini yang menjadi alasan utama peneliti untuk melakukan penelitian terhadap *implementasi kebijakan kurikulum seni budaya keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat*.

## 1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditetapkan, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan kurikulum seni budaya keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi, Jawa Barat?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kurikulum seni budaya dan keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi Jawa Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan kurikulum seni budaya dan keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi Jawa Barat dalam implementasi kebijakan kurikulum seni budaya dan keterampilan, khususnya pendidikan musik.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

1. Dari segi praktis, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak Pusat Kurikulum dan Badan Standar Nasional Pendidikan, untuk dapat menetapkan standar kurikulum yang lebih baik dan tepat agar pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
2. Dari segi keilmuan, memberikan sumbangan kepada perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pengembangan kompetensi peserta didik melalui Pendidikan Seni Musik.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Guna memudahkan penelitian untuk menyusun tesis ini maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut :

## **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam BAB I ini, peneliti akan menguraikan secara keseluruhan penelitian tesis yang dituangkan dalam 7 sub yaitu : latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, keterbatasan penelitian dan sistematika penelitian.

## **BAB 2 : KERANGKA TEORI**

Dalam bab ini memuat tujuh sub bab yaitu kebijakan publik, proses kebijakan publik, tujuan kebijakan publik, kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, konsep implementasi kebijakan publik, kurikulum, pendidikan seni musik, penelitian sebelumnya.

## **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Dalam BAB III ini, memuat rancangan penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, desk research, populasi dan sample serta teknik analisa data) .

## **BAB 4 : KURIKULUM SENI BUDAYA KETERAMPILAN**

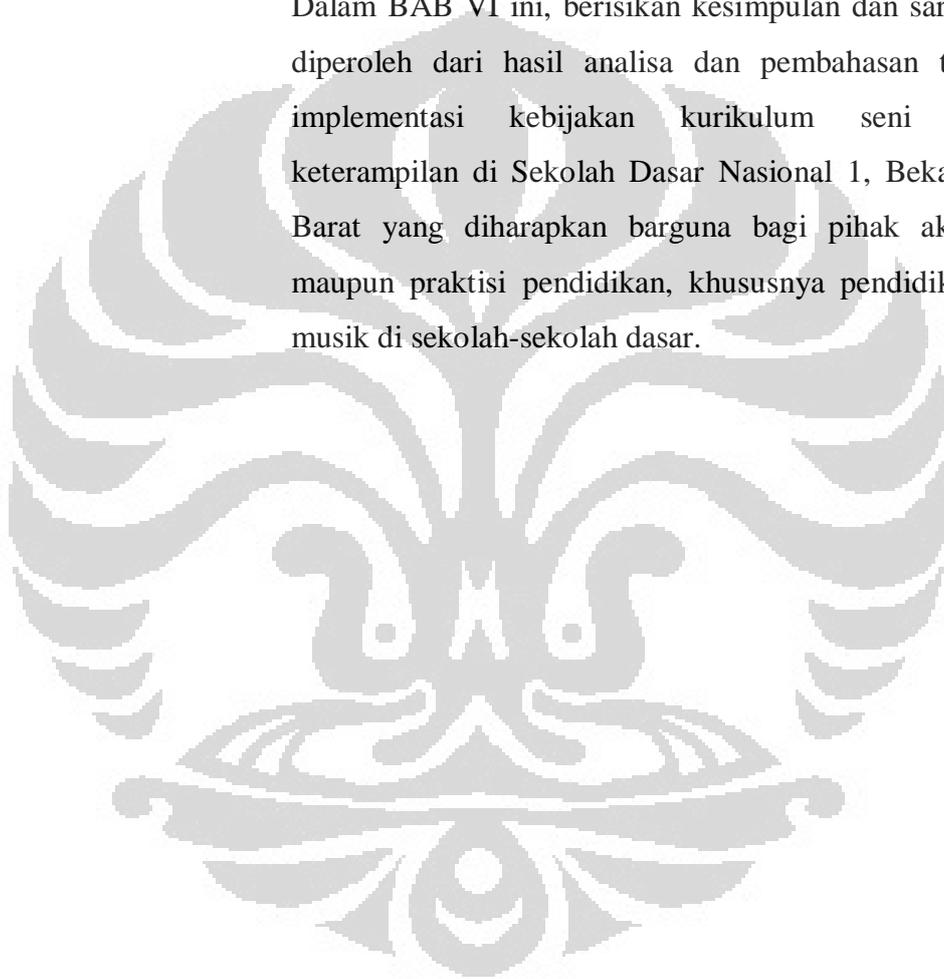
Dalam BAB IV ini, menggambarkan tentang pendeskripsian implementasi kurikulum seni budaya keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat yang memuat tentang proses penerapan kurikulum, tujuan dan sasaran kurikulum seni budaya keterampilan dan hasil yang diharapkan dari kurikulum seni budaya keterampilan.

**BAB 5 : PEMBAHASAN**

Dalam BAB V ini, menjelaskan dan membahas tentang hasil dari penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan konsep-konsep dan teori yang berkaitan.

**BAB 6 : PENUTUP**

Dalam BAB VI ini, berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisa dan pembahasan terhadap implementasi kebijakan kurikulum seni budaya keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi Jawa Barat yang diharapkan berguna bagi pihak akademisi maupun praktisi pendidikan, khususnya pendidikan seni musik di sekolah-sekolah dasar.



## BAB 2

### KERANGKA TEORI

#### 2.1 Kebijakan Publik

Menurut Syafaruddin (2008:75), kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (*city*). Dapat ditambahkan, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Sedangkan kebijakan publik menurut Dye didalam Parson, adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut (Dye, 1976:1).

Abidin (2006:17) menambahkan, kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Definisi lain dijelaskan oleh Gamage dan pang (2003:171), “Kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program”.

Menurut Nicholas (1977:8), “kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan rutin terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan”.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu kegiatan proses pemahaman manusia yang digunakan dalam usaha memecahkan suatu masalah. Pemecahan masalah adalah elemen kunci dalam metodologi analisis kebijakan yang bertujuan menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkonsumsi pengetahuan yang relevan.

AG. Subarsono menambahkan, kebijakan merupakan bagian dari studi Ilmu Administrasi Negara yang fokus utamanya adalah pada penyusunan agenda

kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dengan kata lain kebijakan yang dilakukan oleh negara dan untuk dilaksanakan oleh masyarakatnya, sehingga dinamakan kebijakan publik. (2009:1)

Ryant Nugroho dalam bukunya *Publik Policy*, (2009:85) yang mengatakan bahwa definisi kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Jadi kebijakan publik seakan-akan menjadi suatu rancangan yang di buat oleh negara, yang bertujuan untuk mengatur warga negaranya agar dapat hidup dengan baik. Kebijakan publik ini setiap beberapa tahun sekali biasanya mengalami perubahan, agar bisa mengikuti perkembangan yang terjadi (*up- to date*) sehingga kebijakan ini akan selalu dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Kebijakan yang mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan interaksi dalam komunitas dan antara komunitas dengan lingkungannya untuk kepentingan agar komunitas tersebut memperoleh atau mencapai kebaikan yang diharapkan secara efektif. Jadi sebuah kebijakan dibuat untuk kemaslahatan bersama agar seluruh komponen masyarakat dapat hidup lebih baik dan lebih baik. Dalam menuju kehidupan yang lebih baik tentunya ada beberapa jenjang atau perjalanan untuk mencapai tujuan tersebut. Pendapat ini diperkuat oleh Mustopadidjaja yang mengatakan bahwa kebijakan adalah keputusan suatu organisasi (publik atau bisnis) yang bertujuan mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (a) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran maupun unit organisasi pelaksana kebijakan dan (b) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah di tetapkan, baik berhubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan (1992:16-17).

Terdapat dua pendapat tentang konsep kebijakan publik secara umum. Pendapat yang pertama lebih menekankan pada kebijakan publik sebagai seluruh tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatur urusan publik, sedangkan pendapat kedua lebih menekankan pada kebijakan publik sebagai aspek pelaksanaan kebijakan atau *policy implementation* (Sunggono, 1994, hal.21)

Pendapat pertama ini didukung oleh para tokoh kebijakan publik, diantaranya Dye, Edwards, Sharkansy, Parker dan Anderson. Menurut Dye pengertian kebijakan publik sebagai “*whatever government choose to do or not to do*” artinya suatu kebijakan tidak dapat dijalankan hanya setengah-setengah saja, tetapi harus dilaksanakan secara keseluruhan. Bila pemerintah memilih tidak melaksanakan suatu kebijakan, harus di sampaikan apa alasan-alasannya secara jelas. Edward dan Sharkansy sejalan dengan pemikiran Dye, yang dinyatakan bahwa apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah memiliki tujuan dan maksud yang jelas dan merupakan program pemerintah yang akan dilaksanakan (Sharkansy dan Edwards. 1978).

Sedangkan pendapat yang kedua lebih menekankan pada pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*) dimana kelompok ini menganggap bahwa kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau maksud-maksud tertentu serta mempunyai akibat-akibat yang diramalkan (*predictable impacts*). Para teoritis yang sejalan dengan pendapat kedua ini, antara lain: Nakamura dan Smallowood, Pressman dan Widavsky. Menurut Nakamura dan Smalowood bahwa kebijakan publik berada dalam tiga lingkup kebijakan, yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian (evaluasi) kebijakan. Selanjutnya Nakamura menyatakan bahwa hakekatnya kebijakan publik adalah “serangkaian instruksi kepada pembuat kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.” (Baedhowi, 2007, hal. 6)

Pada akhirnya, bicara kebijakan adalah bicara tentang proses pemecahan masalah yang terjadi. Dan proses pengambilan sebuah kebijakan harus berorientasi pada kata kunci permasalahan itu sendiri, dan terkait dengan proses analisis pengambilan kebijakan. Menurut William Dunn (2002), kebijakan yang

berorientasi pada masalah berdasarkan tahap prosedur analisis adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan kebijakan adalah kebutuhan, baik fisik maupun non fisik atau tata nilai yang belum dapat dipenuhi atau kondisi yang mengganggu dan perlu diatasi oleh tindakan publik/pemerintah.
2. Masa depan kebijakan adalah suatu kemungkinan keadaan (*nilai, kebutuhan, kesempatan*) dimasa mendatang akibat dari pilihan terhadap alternatif kebijakan.
3. Tindakan kebijakan adalah tindakan/aksi yang disusun berdasarkan suatu pilihan alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
4. Hasil kebijakan adalah konsekuensi atau akibat dari tindakan kebijakan yang dilakukan.
5. Kinerja kebijakan adalah tingkat kemampuan atau hasil kebijakan terhadap pemenuhan/pencapaian nilai, kebutuhan dan kesempatan.

## 2.2 Proses Kebijakan Publik

Banyak perbedaan yang mendasar pada saat proses pembuatan kebijakan publik berlangsung. Hal ini dikarenakan perbedaan latar belakang, kepentingan, lingkungan sosial politik, dan motif-motif yang majemuk. Hal ini menurut Mustopadidjaja (Mustopadidjaja, 2003:2) bisa terjadi karena proses pembuatan kebijakan publik bukanlah semata-mata kegiatan teknis-teknokratis, tetapi juga kegiatan sosiopolitis yang dinamis, dan berlangsung dalam sistem kelembagaan yang kompleks.

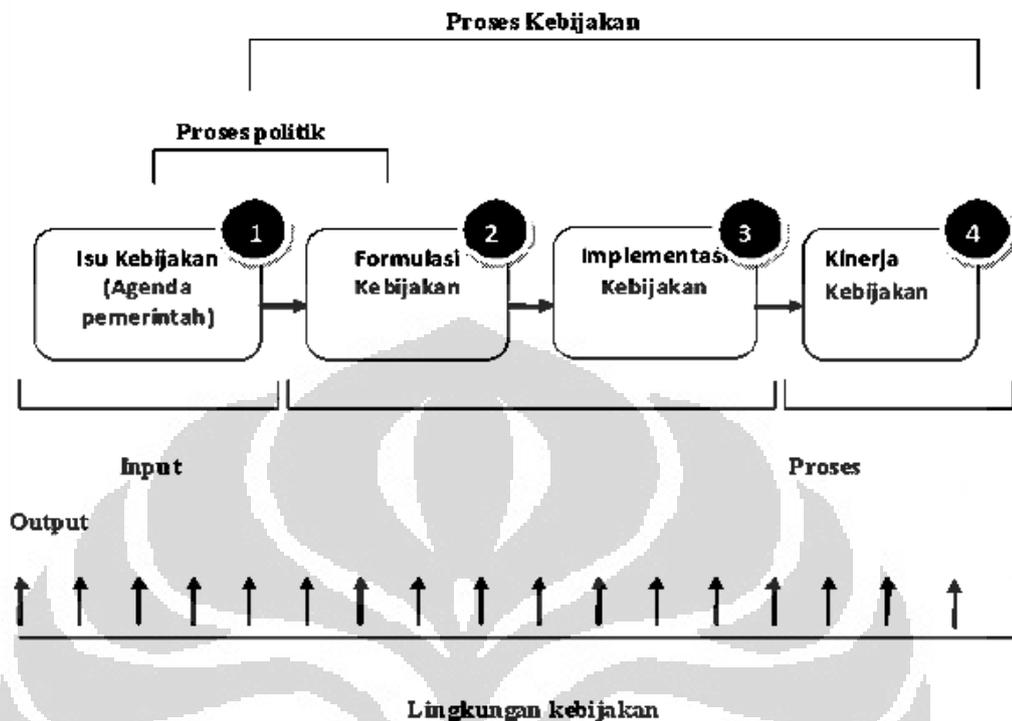
Memperkuat pandangan Mustopadidjaja yang mengedepankan proses pembuatan kebijakan dari sebuah bangunan sistem kelembagaan yang kokoh, Randal B. Ripley, 1985 "*Policy Analysis in Political science*" menyatakan bahwa analisis kebijakan publik merupakan suatu proses yang melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap penyusunan agenda kebijakan: terdapat tiga kegiatan yang perlu dilakukan ialah pertama, membangun persepsi di kalangan stakeholders

bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah, oleh sekelompok masyarakat dan kelompok elite politik; Kedua, membuat batasan masalah; Ketiga, memobilisasi dukungan dari kelompok-kelompok dalam masyarakat dan kelompok kekuatan politik serta kelompok Pers, agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.

2. Tahap formulasi dan legitimasi kebijakan: Analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi kepada seluruh kelompok kepentingan, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.
3. Tahap Implementasi kebijakan: pada tahap ini diperlukan dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.
4. Tahap evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja, dan dampak kebijakan kemudian dilakukan evaluasi terhadapnya dan hasilnya akan bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa akan datang, agar lebih baik dan lebih berhasil.

Dimensi yang paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan. Dimana proses kebijakan ini dapat dilihat sebagai proses dari kegiatan. Dengan adanya proses ini suatu kebijakan dapat terlihat saling berkesinambungan, suatu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lainnya dan saling membentuk. Dari beberapa model yang dikembangkan oleh para ahli kebijakan publik dapat di tarik kesimpulan bahwa proses kebijakan dimulai dari membuat formulasi, lalu dilanjutkan menuju implementasi dan dilanjutkan untuk mencapai kinerja kebijakan.



**Gambar 1** : Proses Kebijakan yang ideal (dikembangkan dari pendekatan dalam teori sistem)

**Sumber** : Dr. Riant Nugroho, 2009

### 2.3 Tujuan Kebijakan Publik

Secara historis, tujuan kebijakan publik adalah menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang nalar guna menemukan pemecahan masalah kebijakan. Analisis kebijakan publik mengambil dari berbagai disiplin yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif, dan normatif. Analisis kebijakan diharapkan untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi tentang nilai-nilai, fakta-fakta, dan tindakan-tindakan. Ketiga macam tipe informasi itu dihubungkan dengan tiga pendekatan analisis kebijakan, yaitu empiris, valuatif, dan normatif. (rizti's site, 2008)

Kebijakan Publik, dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan, maksud dan tujuan dari kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah atau mencari solusi alternatif dari masalah yang menjadi isu bersama yang berkembang di Masyarakat. Oleh karena itu tidak semua masalah yang berkembang di masyarakat bisa melahirkan satu kebijakan publik, hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan suatu kebijakan publik.

Kebijakan publik pastinya tidak akan memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat, akan tetapi pasti masih ada masyarakat yang merasa tidak puas terhadap suatu kebijakan publik yang dibuat, hanya saja persentase antara masyarakat yang merasa puas dan tidak puas haruslah jauh lebih banyak masyarakat yang merasa puas daripada yang tidak puas.

Kebijakan adalah *a mean to an end*, alat untuk mencapai tujuan. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Artinya, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di desain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Proses kebijakan harus mampu membantu para pembuat kebijakan merumuskan tujuan-tujuannya. Sebuah kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru. (Edi Suharto (2005a).

Kebijakan publik adalah aturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama, hal ini disimpulkan oleh Riant Nugroho dalam membedakan tujuan kebijakan publik:

- a. Tujuan yang pertama adalah kebijakan yang mengatur distribusi sumber daya negara ke masyarakat, termasuk alokatif, realokatif, dan redistribusi versus mengabsorbsi atau menyerap sumber daya ke negara.
- b. *Regulatif* versus *diregulatif*. Dimana kebijakan *regulative* lebih bersifat membatasi seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya.
- c. Dinamisasi versus stabilisasi, kebijakan dinamisasi adalah kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya Nasional untuk mencapai

kemajuan tertentu yang dikehendaki, misalnya kebijakan desentralisasi, dan sebagainya.

- d. Memperkuat negara versus memperkuat pasar, kebijakan yang memperkuat negara adalah kebijakan yang mendorong lebih besar peran negara, sementara kebijakan pasar atau publik adalah kebijakan yang mendorong lebih besar peran publik atau mekanisme pasar daripada peran negara.

Setiap kebijakan publik biasanya dibuat lebih dari satu tujuan, agar kebijakan itu dapat dirasakan lebih adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan hidup bersama.

#### **2.4 Dampak Kebijakan Publik**

Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981). Menurut Anderson (1984), semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi mengenai *outcome* atau dampak kebijakan publik, karena untuk menentukan *outcome* kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik. Menurut sebagian pakar (Dye, 1981 ; Anderson, 1984), terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yakni :

1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas. Efek yang dituju oleh kebijakan juga harus ditentukan. Jika berbagai kombinasi sasaran tersebut dijadikan fokus masa analisisnya menjadi lebih rumit karena prioritas harus diberikan kepada berbagai efek yang dimaksud. Disamping itu, perlu dipahami bahwa kebijakan kemungkinan membawa konsekuensi yang diinginkan atau tidak diinginkan.
2. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target. Hal ini disebut efek eksternalitas

atau spillover, karena jumlah sejumlah outcome kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas.

3. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang.
4. Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber dana dan dana yang digunakan dalam program.
5. Biaya tidak langsung kebijakan, yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Biaya tersebut sering tidak diperhitungkan dalam melakukan evaluasi kebijakan publik karena sebagian tidak dapat dikuantifikasi.
6. Sulit mengukur manfaat tidak langsung dari kebijakan terhadap komunitas.

Secara teoritis, dampak kebijakan tidak sama dengan output kebijakan. Karena itu menurut Dye (1981), penting untuk tidak mengukur manfaat dalam bentuk aktivitas pemerintah semata. Hal ini perlu dicermati karena yang seringkali terlihat adalah pengukuran aktivitas pemerintah semata-mata hanya mengukur output kebijakan. Dalam menjelaskan determinan kebijakan publik, Ukuran output kebijakan publik sangat penting untuk diperhatikan. Namun, dalam menilai dampak kebijakan publik, perlu ditemukan identitas perubahan dalam lingkungan yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah.

H. Abubakar Badjuri dan Teguh Yuwono (2002), dalam bukunya “*Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*”, memperkuat analisis Dye (1981) yang mengatakan bahwa dalam memantau hasil kebijakan, harus dibedakan dua jenis hasil kebijakan, yaitu: keluaran (*outputs*), dan dampak (*impacts*). Keluaran kebijakan adalah barang, layanan, atau sumberdaya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (*beneficiaries*). Sebaliknya dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut. Dalam memantau keluaran serta dampak kebijakan harus diingat bahwa kelompok sasaran tidak selalu merupakan kelompok penerima. Kelompok sasaran (*target group*) merupakan individu, masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijakan dan program.

Sedangkan penerima (*beneficiaries*) adalah kelompok yang menerima manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut.

Untuk menghitung secara baik keluaran dan dampak kebijakan, perlu melihat kembali tindakan kebijakan yang dilakukan sebelumnya. Secara umum tindakan kebijakan mempunyai dua tujuan utama, yaitu regulasi dan alokasi. Tindakan regulatif adalah tindakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu. Sebaliknya tindakan alokatif adalah tindakan yang membutuhkan masukan yang berupa uang, waktu, personil dan alat.

Tindakan kebijakan dapat pula dipilah lebih lanjut menjadi masukan (*input*) kebijakan dan proses kebijakan. Masukan kebijakan adalah sumberdaya (waktu, uang, personil, alat, material) yang dipakai untuk menghasilkan keluaran dan dampak. Proses kebijakan adalah tindakan organisasional dan politis yang menentukan transformasi dari masukan kebijakan menjadi keluaran dan dampak kebijakan.

## **2.5 Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik**

H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2009:364-365) mengatakan bahwa kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan pendidikan, dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Pemahaman pertama adalah kebijakan pendidikan merupakan salah satu turunan atau derivat dari kebijakan publik, dimana kebijakan publik di negara berkembang dipahami sebagai kebijakan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan menjadi kebijakan sektoral yang harus bersaing dengan sektor lain untuk mendapatkan prioritas. Pada kondisi seperti ini, kebijakan pendidikan tidak jarang "mengalah" terhadap kebijakan sektoral lainnya.

Pada banyak negara berkembang, kebijakan pembangunan infrastruktur fisik, kebijakan pertahanan dan keamanan, dan kebijakan politik lebih di kedepankan daripada kebijakan pendidikan. Akibatnya, kemajuan pendidikan berjalan sangat lambat, dan pendidikan tidak dapat menjadi pilar utama penopang kemajuan masyarakat, bangsa dan akhirnya negara. Kondisi ini tidak saja terjadi

pada tingkat Nasional, tetapi juga pada tingkat regional atau daerah-daerah dalam negara. Pemahaman kedua, kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu ketika kebijakan pendidikan menjadi prioritas utama atau pertama atau mempunyai peran yang penting didalam suatu kebijakan publik.

Dalam kebijakan pendidikan dibutuhkan suatu kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dikembangkan oleh badan yang di tunjuk oleh pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan yang dijelaskan dalam Pasal 35 ayat 2. Jadi kurikulum merupakan bagian dari kebijakan publik yang dibuat pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan. Ada empat jenis pelayanan primer atau pelayanan yang paling mendasar yang dilakukan pemerintah yaitu:

1. Pelayanan kewargaan
2. Pelayanan kesehatan
3. Pelayanan pendidikan
4. Pelayanan ekonomi

Jadi kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Hal ini dikemukakan oleh Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Marrie O'Neil dalam (Tilaar, 2008, hal.207), yang mengatakan bahwa Kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi, bagi Negara-bangsa dalam persaingan globalisasi. Margaret E. Goertz (2001:45), mengatakan bahwa “.....*An increased emphasis on educational adequacy and the public's concern over the high cost of education is focusing policy maker's attention on the efficiency and effectiveness of educational spending....*” Yang terjemahannya adalah, meningkatnya tekanan pada kecukupan pendidikan dan kepedulian masyarakat terhadap biaya pendidikan yang tinggi, memfokuskan para pembuat kebijakan untuk melakukan efisiensi dan efektivitas pengeluaran biaya pendidikan atau kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan.

Hal ini di perkuat oleh kebijakan pendidikan Nasional, yang diharapkan dapat memperkuat peran negara dengan dengan 20% anggaran negara untuk pendidikan Nasional. Namun dengan demikian masih ada pasal yang memperkuat peran publik dengan adanya komite-komite sekolah. Dengan adanya peran publik diharapkan dapat lebih membantu pemerintah dalam mengelola di bidang pendidikan.

Di bidang pendidikan, konsistensi terhadap konstitusi untuk mencerdaskan bangsa sepatutnya merupakan landasan dari segenap rencana strategis pendidikan yang diwujudkan dalam merumuskan praksis pendidikan di Indonesia. Ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dalam perspektif pelayanan publik di era otonomi daerah. Pertama, pendidikan sebagai upaya mengubah human resources menjadi human capital Ini basis utama dalam proses pembangunan SDM andal dan profesional yang menentukan masa depan Indonesia. Kedua, kebijakan publik pemerintahan di sektor pendidikan seharusnya lebih mampu mengakomodasi, merespons dan mewarnai arus tuntutan masyarakat global. Ketiga, stratifikasi persoalan sosial, ekonomi dan politik yang dihadapi negara ke depan, yang akhirnya menuntut terjadinya paradigma dan orientasi berpikir dalam memosisikan institusi pemerintah sebagai pelayan publik.

Ketiga aspek ini merupakan landasan pemikiran yang harus dijadikan fokus dan *entry point* dalam proses perbaikan kualitas pendidikan sebagai bagian dari pelayanan publik. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kabupaten dan kota harus terus menempati posisi dan peran strategis dalam proses menciptakan persenyawaan dan harmonisasi dari ketiga aspek tersebut. Diharapkan ini dapat menciptakan kinerja pelayanan publik yang superior. Intinya, pemerintah merupakan kunci utama sebagai pengatur penyediaan pelayanan publik, termasuk di dalamnya pendidikan. Pembangunan di sektor pendidikan juga diharapkan memberikan kontribusi kuat bagi pembangunan ekonomi sebuah negara. Kenyataan yang kita hadapi saat ini, sektor pendidikan melalui angkatan kerja yang dihasilkannya belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selama desentralisasi juga terjadi

kecenderungan menguatnya komitmen politik kepala daerah dalam peningkatan layanan pendidikan. Namun komitmen tersebut tidak didukung kebijakan strategis. (Gamawan Fauzi, 2010 Kebijakan Publik Sektor Pendidikan Di Era Otda)

Sejumlah riset telah menunjukkan sejauh mana keberhasilan output pendidikan secara efisien tampak ditentukan faktor-faktor penting. Penelitian Herrera dan Pang (2008) misalnya, *membuktikan bahwa peningkatan layanan pendidikan melalui pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi, cenderung memiliki hubungan negatif dengan efisiensi*. Penelitian lain yang mengukur efisiensi pelayanan pendidikan berdasarkan teori pendidikan sebagai proses produksi multilevel membuktikan, produksi pendidikan harus melibatkan pengambilan keputusan pada sejumlah institusi yang berbeda dalam masyarakat, mulai pemerintah pusat sampai daerah, sekolah, guru, dan individu murid. Kesimpulannya, peningkatan pelayanan kebijakan publik sektor pendidikan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada kebijakan publik pemerintah. Sisi lain, institusi pendidikan juga harus mampu menunjukkan kapasitas dan kinerja pelayanan publik sektor pendidikan secara efisien. (Gamawan Fauzi, 2010 Kebijakan Publik Sektor Pendidikan Di Era Otda)

## **2.6 Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa fokus utama kebijakan publik adalah pada penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik menjadi salah satu aspek utama dari suatu fokus kebijakan.

Implementasi menurut Pressman dan Widavsky adalah *“to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete”* (Nakamura, et.al, 1980, hlm. 13). Dari pengertian ini, implementasi adalah suatu kegiatan untuk menyempurnakan apa yang dikehendaki pembuat kebijakan dan menghasilkan sesuatu oleh sang pembuat kebijakan.

Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa implementasi diartikan sebagai *“those action by public and private individuals (or groups) that are directed at achievement of objectives set forth in prior policy decisions”*(1975:14)

atau diartikan sebagai semua tindakan yang dilaksanakan baik oleh publik maupun individu, ataupun kelompok yang diarahkan pada suatu tujuan dalam menentukan suatu kebijakan.

Teori Van Meter dan Van Horn "The policy Implementation Procces: A Conceptual Framework", dalam *Administration and Society* 6 (1975:214), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa Variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang memengaruhi kebijakan publik:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi,
2. Karakteristik dari Agen pelaksana/implementor,
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik dan,
4. Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi dapat pula diartikan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik yang sedang dilaksanakan atau yang hampir selesai, dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai dengan proses yang berlaku.

Hasil yang diharapkan dari proses implementasi adalah hasil segera (*effect*) dan dampak akhir (*impact*). Pengaruh atau akibat jangka pendek yang dihasilkan oleh suatu implementasi kebijakan, disebut hasil segera (*effect*), sedangkan dampak kebijakan adalah sejumlah akibat yang dihasilkan oleh implementasi kebijakan melalui proses jangka panjang. Menurut Dunn (1999:80) implementasi kebijakan (*policy implementation*) pada dasarnya merupakan kegiatan praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan, yang pada dasarnya bersifat teoritis. Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan sampai tercapainya hasil kebijakan itu sendiri.

Kebijakan yang dibuat, terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena implementasi kebijakan pada umumnya lebih sulit dari pada sekedar merumuskannya. Ada beberapa aspek dan disiplin ilmu yang terkait dan pertimbangan berbagai pihak untuk memformulasikan kebijakan, dan kesemuanya

itu harus diperhatikan dengan baik oleh stakeholder, maupun berbagai aktor. Di samping itu, dalam perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi, dan simplikasi, dimana tidak biasa dilakukan di dalam implementasi. Akibatnya, dalam kenyataannya terjadi apa yang disebut Andrew Dunsire (1978) sebagai “*implementing gap*” yaitu kesenjangan atau perbedaan antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan.

Kegagalan kebijakan (*policy failure*) menurut Hogwood dan Gunn (1986) disebabkan antara lain, pertama, karena tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan semestinya (Non Implementation). Artinya bahwa kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, mungkin ada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga walaupun mereka sudah berusaha dengan sekuat tenaga, hambatan-hambatan tersebut tidak bisa ditanggulangi. Kedua, karena tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaan (*unsuccesfull implementation*), adalah suatu kondisi eksternal yang ternyata tidak menguntungkan (misalnya, bencana alam, pergantian kekuasaan, dan sebagainya), dan akhirnya kebijakan tersebut tidak mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Pandangan serupa dilontarkan Edi Suharto (2005a) yang mengatakan bahwa aktifitas kebijakan bergerak sangat cepat. Setelah keputusan kebijakan dibuat, kegiatan-kegiatan untuk menerapkan kebijakan tersebut sudah harus dipersiapkan. Waktu dan kewenangan yang tersedia guna mendukung arah yang dipilih umumnya sangat terbatas dan karenanya menuntut penyesuaian. Pilihan-pilihan kebijakan yang telah dipilih tidak menutup kemungkinan menjadi sedikit berbeda dengan pilihan-pilihan sebelumnya. Pilihan yang telah ditetapkan kadangkala sedikit melenceng yang diakibatkan adanya akibat-akibat yang terjadi diluar perkiraan. Akibat sampingan (*side effect*) atau yang dikenal dengan istilah *externalities* atau *spillovers* ini hanya bisa diketahui setelah kebijakan diterapkan. Selain mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan, *externalities* tentu saja ‘mengganggu’ hasil-hasil kebijakan yang telah ditetapkan bahkan tidak jarang

menciptakan masalah-masalah baru yang lebih kompleks, dan ini bisa dikatakan terjadinya ‘gap’ atau kesenjangan antara rumusan dan implementasi.

Untuk dapat mencapai keberhasilan dari implementasi kebijakan, dibutuhkan syarat-syarat. Seperti dijelaskan dalam Teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun (1978) ada beberapa syarat yang harus dilakukan yaitu;

1. Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
2. Untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.
3. Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
4. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. (Asumsinya, semakin sedikit hubungan "sebab-akibat", semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai).

George Edwards (1980:53) menambahkan teori diatas bahwa : *“probably the most essential resources in implementing policyis staff”*, artinya bahwa sumber daya manusia sangat mutlak di perlukan dalam berhasil dan tidaknya dalam melaksanakan kebijakan.

Selanjutnya George Edwards (1980:10-11) mengatakan lebih lanjut bahwa : *“No matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if the personal responsible for carrying out of policies lack the resources to do an effective job, implementation will not affective*, yang terjemahannya adalah "Tidak peduli bagaimana tatanan implementasi yang jelas dan konsisten dan tidak peduli akurat mereka ditransmisikan, jika bertanggung jawab pribadi untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, pelaksanaan tidak akan afektif.

Selanjutnya pada isi bukunya *Implementing Public Policy*, (1980), George Edwards kembali mempertegas bahwa salah satu dampak dari implementasi kebijakan publik bisa menjadi rangkaian kesalahpahaman dan penyimpangan

terhadap tujuan para pengambil kebijakan. Karena orang-orang yang menentukan kebijakan-kebijakan publik tidak sama dengan orang-orang yang mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik tersebut.

Harus dipahami bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pengambilan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi orang-orang yang dipengaruhi kebijakan tersebut. Jika kebijakan tidak tepat, jika kebijakan tidak dapat mengurangi masalah, maka kebijakan tersebut akan gagal meski kebijakan tersebut telah diimplementasikan dengan baik. Jika kebijakan yang baik diimplementasikan dengan buruk, maka kebijakan tersebut akan gagal untuk mencapai tujuan para pembuatnya. Permasalahan yang ada dalam implementasi kebijakan publik adalah disebabkan adanya kesenjangan antara keputusan kebijakan dan implementasinya.

Ada 4 (empat) faktor penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu: *komunikasi, sumber daya, karakter atau sikap, dan struktur birokratik*. Keempat faktor tersebut bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau menghambat implementasi kebijakan. Sehingga akan jernih melihat bagaimana masing-masing faktor mempengaruhi implementasi dan menjelaskan mengapa faktor tersebut menjadi hambatan bagi implementasi kebijakan.

### **1. Komunikasi**

Menurut George Edwards III, komunikasi merupakan penyampaian pesan atau informasi tentang kebijakan antara pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Hal ini menyangkut transfer pengetahuan yang meliputi hakikat kebijakan, cara pelaksanaan, batasan-batasan norma, evaluasi terhadap kebijakan dan lainnya. Proses komunikasi adalah sebuah *transmission* 'cara penyampaian', *clarity* 'kejelasan', serta *consistency* 'konsisten'.

George Edwards III menegaskan, ketika terjadi penyampaian pesan terkadang mengalami beberapa gangguan atau distorsi. Kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan informasi dari yang diinginkan pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Distorsi ini bisa disebabkan oleh praktek komunikasi tidak langsung. Disisi lain, penyampain informasi yang melewati

banyak hirarki birokrasi dan berlapis-lapis, selektifitas persepsi serta ketidakmauan para pelaksana kebijakan dapat menimbulkan hambatan dalam proses komunikasi.

Distorsi lain yang bisa terjadi yaitu ketika pelaksana kebijakan berpersepsi bebas dan selektif terhadap pesan-pesan yang diterimanya. Hal ini bisa menimbulkan penyimpangan jika terjadi keengganan untuk melakukan pesan tersebut manakala menyangkut nilai-nilai hidup yang tidak sesuai dengannya. Bisa jadi akan menimbulkan penolakan, atau tetap dilaksanakan tapi dengan setengah hati dan tidak sungguh-sungguh. Ini akan menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak tuntas.

George Edwards III berpendapat bahwa faktor clarity 'kejelasan' menjadi penting dalam proses implementasi kebijakan. Tidak adanya pemaknaan yang ambigu. Intinya, kejelasan tidak identik dengan informasi yang berlebihan, dimana George Edwards III menyebutnya dengan *overly specific instruction*, yang dapat menghilangkan fleksibilitas dan akan berujung pada kebijakan menjadi kaku.

Consistency 'konsisten' menjadi ukuran lain bagi George Edwards III dalam proses komunikasi implementasi kebijakan. Faktor ini mengandung makna bahwa implementasi kebijakan yang berupa perintah-perintah harus konsisten dan jelas. Perintah-perintah yang dijalankan meskipun memiliki unsur kejelasan, namun jika tidak dilakukan secara konsiten, maka perintah tersebut akan menyulitkan pelaksana kebijakan dalam menjalankan perintah kebijakan itu sendiri. Ini dapat menyebabkan kelonggaran dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

## **2. Sumberdaya**

Efektifitas kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan tidak akan berjalan secara efektif dan baik ketika tidak di dukung oleh potensi-potensi sumber daya yang tidak tersedia. Diyakini bahwa sumberdaya-sumberdaya yang potensial akan berdampak langsung pada proses implementasi kebijakan. Yang termasuk sumberdaya-sumberdaya antara lain staf yang relative jumlahnya yang disertai dengan kemampuan dan keahlian yang memadai untuk keperluan implementasi kebijakan. Sisi lain, informasi yang memadai, kewenangan yang dimiliki

implementor, adanya fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana, sarana dan prasarana.

George Edwards menegaskan, potensi sumberdaya-sumberdaya ini ansih harus dimiliki. Kesempurnaan berjalannya program kebijakan akan tergantung pada pada besaran potensi sumberdaya yang dimiliki. Semakin tinggi potensi sumberdaya yang ada, maka semakin baik proses implemntasi kebijakan itu akan berjalan. Sebaliknya, jika potensi sumberdaya yang rendah tentunya akan menjadi salah satu penyebab kegagalan proses implementasi kebijakan.

### 3. Disposisi

George Edwards menterjemahkan disposisi sebagai pembawaan, kepribadian, pandangan, ideologi pelaksana kebijakan publik. Untuk memahami konteks terjemahan makna disposisi yang dimaksud berikut pernyataan George Edwards memberikan pemahaman yang jelas;

*“ if implementers are well disposed toward a particular policy, they are more likely to carry it out as the original dicisionmakers intended. But when implementors’ attitudes or perspective differ from the desicionmakers’, the process of implementing a policy becomes infinitely more complicated”.* (Edwards III, 1980, hal 89)

Pada konteks pemahaman teori yang dibangun George Edwards di atas, mempertegas bahwa harus terjadinya korelasi positif atas sikap, pandangan, kesungguhan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan dalam kerangka keberhasilan sebuah kebijakan. Ini menunjukkan bahwasanya kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan harus diyakini menjadi bagian utuh dari pelaksana kebijakan. Atau bisa dikatakan, dirinya sendirinya sesungguhnya yang memiliki kebijakan itu meskipun faktanya bukan dirinya yang membuat kebijakan.

Lebih mendalam George Edwards III mengungkapkan, bahwa hal terpenting yang berkaitan dengan disposisi yaitu staff birokrasi yang menekankan pada penempatan staf yang benar-benar kapabel dan selaras demi menjamin terlaksananya kebijakan. Dan kedua yaitu pemberian insentif bagi pelaksana kebijakan yang berupa kecukupan atau kepantasan pemberian penghargaan,

sebagai sarana pengendalian bagi pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang direncanakan oleh pembuat kebijakan

#### **4. Struktur Birokrasi**

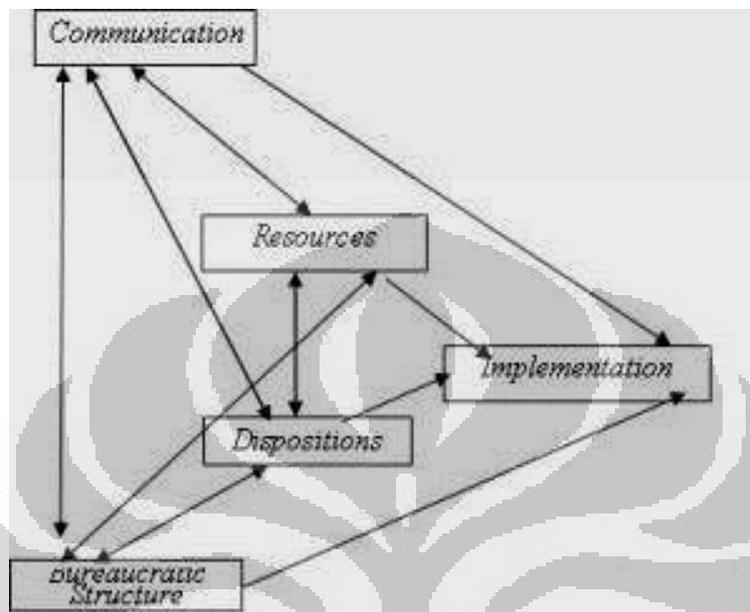
Menurut George Edwards III, faktor terakhir yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yaitu struktur birokrasi. Yang dimaksud disini adalah seluruh instrumen lini organisasi secara menyeluruh serta terstruktur. Dalam konteks ini George Edwards III membidik persoalan struktur birokrasi pada 2 (dua) hal mendasar yaitu struktur birokrasi harus memiliki standar operasional prosedur, yang merupakan pedoman langkah-langkah yang harus disepakati bersama berupa keseragaman pola dalam menjalankan proses implementasi kebijakan.

George Edwards III menilai, seringkali penyeragaman atau pembekuan sebuah standar operasional terkadang mengalami masalah dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karenanya kebijakan pembuatan standar operasional prosedur menjadi faktor penting. Standar operasional prosedur dibuat justru untuk mempertegas standar penyikapan baku yang harus dilaksanakan dalam kondisi apapun. Namun, jika terjadi perbedaan atas karakteristik, harus disikapi dengan kebijakan yang berbeda pula.

Sisi lain, persoalan fragmentation juga menjadi hal penting dalam struktur birokrasi. George Edwards III menjelaskan bahwa fragmentation merupakan pembagian pusat koordinasi dan pertanggungjawaban. Fragmentation ini akan membawa konsekuensi besar dalam keberhasilan proses implementasi. Dalam konteks ini, George Edwards III mempertegas, bahwa pembagian pusat koordinasi harus dibagi dalam kondisi yang tepat dan sesuai dengan porsinya. Semakin banyak yang terlibat didalam proses implementasi kebijakan, namun pembagian koordinasi dan tanggungjawab yang tidak dibagi secara baik, akan mengakibatkan tersendatnya pelaksanaan kebijakan.

Keempat faktor yang telah diurai diatas akan menjawab 2 (dua) pertanyaan mendasar dalam implementasi kebijakan untuk mereduksi dampak negatif dari sebuah implementasi kebijakan yaitu; Apa saja prakondisi-prakondisi bagi

keberhasilan implementasi kebijakan? Apa saja hambatan-hambatan utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan?



Sumber : George Edwards III: implemeting public policy, 1980

**Gambar 2. Diagram Dampak langsung dan tidak langsung dalam Implementasi**

Selain beberapa syarat tersebut di atas, keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh apa saja yang ada dalam kebijakan tersebut dapat ditransformasikan untuk dilakukan. Seperti dikatakan dalam Teori Merilee S. Grindle (1980: 220-221) Teori Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang dihasilkan derajat perubahan yang diinginkan
3. Kedudukan derajat pembuat kebijakan
4. (Siapa) pembuat pelaksana program

5. Sumberdaya yang di kerahkan sementara itu konteks implementasinya adalah: karakteristik lembaga dan penguasa
6. Kepatuhan dan daya tanggap.

Jika beberapa syarat dan isi kebijakan tersebut dilakukan maka keberhasilan dari implemetasi kebijakan akan terwujud dengan hasil yang memuaskan. Oleh karenanya, agar kebijakan tetap terfokus pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, pembuat kebijakan harus dilandasi oleh lingkaran tahap kebijakan yang meliputi perencanaan dan evaluasi. Dalam proses ini, sebagaimana diungkapkan Edi Suharto (2005a), para pembuat kebijakan biasanya dipandu oleh beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti;

1. Apa maksud atau fungsi sebuah kebijakan?
2. Bagaimana kebijakan itu akan mempengaruhi agenda pemerintah secara keseluruhan, kelompok-kelompok klien, kelompok-kelompok kepentingan dan masyarakat banyak?
3. Apa dan bagaimana hubungan antara alat-alat implementasi dengan tujuan-tujuan kebijakan?
4. Apakah ada alat atau mekanisme implementasi yang lebih sederhana?
5. Bagaimana kebijakan ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya?
6. Dapatkah kebijakan baru itu menghasilkan perbedaan seperti yang diharapkan?

Setelah memahami berbagai kajian, pandangan dan pendapat mengenai implementasi kebijakan publik, maka untuk mengawali penelitian mengenai implementasi kebijakan kurikulum seni budaya keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat, peneliti akan menggunakan faktor-faktor krusial implementasi kebijakan publik yang digagas oleh George Edwards III.

## **2.7 Kurikulum**

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu

(Sisdiknas Bab 1 pasal 1 NO. 19). Kurikulum dikembangkan oleh badan yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan yang dijelaskan dalam Pasal 35 ayat 2. Jadi kurikulum merupakan bagian dari kebijakan publik yang dibuat pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Nasution (1999), Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan Nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Arief Rachman Hakim, mengemukakan, kurikulum selalu mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan itu sendiri selalu tidak tetap. Selain itu, perubahan tersebut juga dinilai dipengaruhi oleh kebutuhan manusia dari ilmu tersebut yang selalu berkembang, sementara perkembangan manusia yang selalu berubah juga pengaruh dari luar, dimana secara menyeluruh kurikulum itu tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh ekonomi, politik dan kebudayaan.

Rencana pendidikan dikembangkan berdasarkan suatu pemikiran tertentu mengenai kualitas hasil pendidikan yang diharapkan. Secara pasti dapat dikatakan bahwa tidak akan ada suatu proses pengembangan yang tidak didahului oleh sebuah ide atau pemikiran tertentu mengenai kualitas hasil pendidikan yang diinginkan. Perbedaan pemikiran atau ide akan menyebabkan terjadinya perbedaan dalam kurikulum yang dihasilkan baik sebagai dokumen maupun sebagai pengalaman belajar. Oleh karena itu, Oliva (1997:12) mengatakan "*Curriculum itself is a construct or concept, a verbalization of an extremely complex idea or set of ideas*" (Kurikulum itu sendiri adalah membangun atau konsep, sebuah verbalisasi dari ide yang sangat kompleks atau serangkaian ide).

Ada dua cara sudut pandang kurikulum menurut Suryanto didalam buku teropong pendidikan kita, yang pertama dalam arti sempit adalah bahwa kurikulum hanya berupa struktur kurikulum atau sekumpulan daftar mata

pelajaran yang harus diajarkan kepada peserta didik, adapun cara pandang kurikulum dalam arti luas adalah bahwa kurikulum disamping berupa daftar kumpulan mata pelajaran, juga harus diartikan sebagai kegiatan belajar dan sebagai pengalaman belajar peserta didik (2007: hal 25).

Selanjutnya Bambang Indrianto didalam Saiful Anam mengatakan bahwa, bahwa, perubahan kurikulum dari waktu ke waktu harus bersifat kontinum, bukan terputus-putus. Artinya, aspek-aspek positif dari kurikulum sebelumnya tetap diambil untuk memperkuat kurikulum baru, dan beliau menambahkan bahwa ciri khas kurikulum memang harus berubah, menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Dan kurikulum harus mampu memprediksi perkembangan dalam 10 tahun ke depan (2007:144)

Romine didalam Oemar Hamalik (2007:4) mengatakan pandangan ini dapat digolongkan sebagai pendapat yang baru (modern), yang dirumuskan sebagai berikut: “ *Curriculum is interpreted to mean all off the organized courses, activities, and experiences, which pupils have under direction of the school, whether in the classroom or not*” Kurikulum ditafsirkan sebagai pembelajaran yang merupakan program yang terorganisir, kegiatan, dan pengalaman, yang mendidik peserta didik dan di bawah arahan sekolah, baik di dalam kelas atau tidak)”. Implikasi perumusan di atas adalah sebagai berikut;

1. Tafsiran tentang kurikulum bersifat luas, karena kurikulum bukan hanya terdiri atas mata pelajaran (couses), tetapi meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggungjawab sekolah.
2. Berbagai kegiatan di luar kelas (ekstrakurikuler) sudah termasuk dalam pengertian kurikulum.
3. Pelaksanaan kurikulum tidak hanya dibatasi oleh keempat dinding kelas saja, melainkan dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas.
4. Sistem penyampaian yang dipergunakan oleh guru disesuaikan dengan kegiatan atau pengalaman yang akan disampaikan.
5. Tujuan pendidikan bukanlah untuk menyampaikan mata pelajaran atau bidang pengetahuan yang tersusun, melainkan pembentukan pribadi anak, dan belajar cara hidup di dalam masyarakat.

Esensi dari pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Agar dalam proses pengembangan desain kurikulum bisa berjalan secara efektif dan efisien, maka pengembang kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip dan isu-isu kurikulum. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip dan isu kurikulum tersebut produk dari aktivitas pengembangan desain kurikulum diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat dan dinamika perkembangan zaman. Hal ini penting karena disinyalir kurikulum pendidikan di Indonesia belum menjawab tantangan dan permasalahan yang ada di masyarakat.

Sementara dukungan masyarakat terhadap sekolah dalam rangka menerapkan kurikulum juga menjadi sangat pasif. Kepasifan ini mungkin terjadi karena sosialisasi mengenai kurikulum kepada masyarakat sangat kurang, bahkan membingungkan. Pada akhirnya semua persoalan ini diserahkan kepada sekolah dan akibatnya keterlibatan masyarakat atau orang tua menjadi sangat kurang. Dalam pengertian lain, masyarakat yang tertutup dan apriori terhadap munculnya berbagai inovasi akan menghambat implementasi kurikulum.

Mencermati perkembangan isu-isu sentral dari sebuah kurikulum pembelajaran, terpenting adalah bagaimana desain kurikulum tersebut harus mengedepankan prinsip-prinsip desain yang mudah di cerna, di mengerti serta teraktualisasi secara baik dan tentunya membawa manfaat masa depan bagi peserta didik.

Seels, Barbara dan Glasgow. Z 1990:4 menguraikan 7 (tujuh) prinsip desain kurikulum, sebagai berikut:

a. Tantangan dan Kesenangan (*Challenge and Enjoyment*)

Pembelajar harus menemukan tantangan dan motivasi belajar mereka. Kurikulum harus memberikan aspirasi dan ambisi bagi seluruh siswa. Pada semua tingkat, pembelajar dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya harus mengalami tantangan dengan tingkat yang tepat, sehingga memungkinkan mereka untuk mengasah potensi mereka. Pembelajaran harus

aktif dalam pembelajaran dan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dan mendemonstrasikan kreatifitas mereka. Harus ada dukungan yang memungkinkan pembelajar untuk meningkatkan usaha mereka.

b. Luas (*Breadth*)

Pembelajar harus memperoleh mendapatkan kesempatan untuk kesempatan dengan rentang bobot yang sesuai dan luas jangkauannya. Kurikulum harus diorganisir sehingga pembelajar dapat belajar dan berkembang melalui variasi konteks, baik di kelas maupun di aspek lain dalam kehidupan.

c. Kemajuan (*Progression*)

Pembelajar harus mengalami kemajuan yang berkelanjutan pada pembelajaran mereka dalam satu kerangka pembelajaran. Setiap tingkat harus dibangun berdasarkan pengetahuan dini. Pembelajar harus dapat berkembang pada tingkat dimana kebutuhan dan bakat mereka bisa dipenuhi, dan harus tetap membuka kesempatan sehingga perkembangan anak tidak terhenti pada usia dini.

d. Kedalaman (*Depth*)

Harus ada kesempatan bagi pembelajar untuk mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal dalam berbagai tipe cara berpikir dan belajar. Dalam perkembangannya, mereka harus mengembangkan dan mengaplikasikan kekuatan intelektual, menarik elemen lain dari pembelajaran dan mengeksplorasi dan memperoleh pemahaman yang lebih tinggi.

e. Personalisasi dan Pilihan (*Personalisation and Choice*)

Kurikulum harus merespon kebutuhan individual dan mensupport bakat tertentu yang dimiliki pembelajar. Kurikulum juga harus memberikan kesempatan yang besar agar pembelajar dapat berlatih untuk menentukan pilihan yang bertanggungjawab, ketika pembelajar mulai memasuki jenjang sekolah. Saat pembelajar memperoleh tingkat pencapaian yang sesuai dari

rentang jenjang pendidikan yang luas, pilihan tersebut harus dibuka sesegera mungkin. Harus ada penjamin yang dapat menjamin bahwa pilihan itu mengarah pada kesuksesan.

f. Koherensi (*Coherence*)

Secara keseluruhan, aktivitas pembelajaran pembelajar harus utuh untuk membentuk pengalaman yang berhubungan satu sama lain.

g. Relevansi (*Relevance*)

Pembelajar harus memahami tujuan pembelajaran. Mereka harus melihat nilai dari pelajaran yang mereka pelajari dan relevansi pelajaran tersebut dalam hidup mereka saat ini dan masa depan

Sedangkan pengukuran efektif menurut Lubis dan Huseini (1987) dapat didekati melalui 4 (empat) pendekatan proses, yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan gabungan dari ketiganya. Pendekatan bagi pembelajaran bagi siswa sekolah dasar.

## 2.8 Pendidikan Seni Musik

Di akhir tahun 1990an banyak hal yang ditemukan berkenaan dengan pendidikan musik. Gardner mengatakan terdapat landasan yang kuat untuk mengidentifikasi dan mengembangkan *spectrum* kemampuan luas dalam diri anak, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logis-matematis, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan antar pribadi, kecerdasan antarpribadi, dan kecerdasan naturalis (Amstrong, 2002). Hal ini dikuatkan oleh David Lagear yang berpendapat bahwa kecerdasan auditori dan kecerdasan ritmik yang terkandung dalam musik mengajarkan kita kecerdasan-kecerdasan yang berhubungan dengan bahasa, gerak, komunikasi, emosi, dan visual/spasial (Campbell, 2001).

Jadi dengan demikian dengan mempelajari musik dapat menstimulasi semua kecerdasan yang ada di dalam multiple intelligence. Barrs, mengatakan bahwa, *Music education involves the whole child, using melody, rhythm, speech, and movement. It has close links with other subjects, and provides a foundation for*

*achievement in other areas of the curriculum through the development of auditory awareness and discrimination, improved motor skills, experience of collaborative learning situation, fluency in speech, hopefully, improved self confidence and sense of imagination. Creative work in music develops the skills of decision making and selection; and sharing in the creative processes of their friends can teach children sensitivity and respect.* Artinya bahwa Pendidikan Musik yang melibatkan seluruh anak, menggunakan melodi, rhytm, berbicara, dan gerakan. Pendidikan Musik memiliki hubungan dekat dengan mata pelajaran lain, dan memberikan landasan bagi pencapaian di area lain dari kurikulum melalui pengembangan kesadaran auditori dan diskriminasi, meningkatkan keahlian motorik, pengalaman dari situasi belajar kolaboratif, kelancaran dalam berbicara, meningkatkan percaya diri dan rasa imajinasi. Kreatif bekerja dalam bermusik, mengembangkan keterampilan dalam pengambilan keputusan dan menyeleksi; dan berbagi dalam proses kreatif pada teman-teman mereka dan juga dapat mengajarkan anak-anak kepekaan dan rasa hormat. (1994:4)

Selanjutnya Barrs, (1994) mengatakan, *Children live in a noisy world, where they need to learn how to listen and how to understand. They are always hearing, but there is not much chance for reflection and assimilation. Musiks education can help with this, allowing them opportunities to build their own images in their heads in respons to song, or to musik they have heard or composed themselves,* yang artinya, anak-anak hidup di dunia yang banyak gangguan, di mana mereka perlu belajar bagaimana untuk mendengarkan dan bagaimana memahami. Mereka selalu mendengar, tetapi tidak ada banyak kesempatan untuk berefleksi dan berasimilasi. Pendidikan Musik dapat membantu hal ini, yang memungkinkan mereka berkesempatan untuk membangun citra mereka sendiri di kepala mereka dalam merespon lagu, atau musik yang mereka dengar atau yang mereka ciptakan. (1994:48)

Selanjutnya Barr juga mengatakan *singing can be used to stimulate or to calm down in a group. It has the effect of bring everyone together and creates a sense of sharing and participation. There are often children in the class who have difficulty in join with other group activities, but who can share in collaborative singing. No complex equipmentis needed, and therefore a singing session can be*

*spontaneous, offering a welcome break from demands of an academic day*, yang diterjemahkan sebagai berikut, bernyanyi dapat digunakan untuk merangsang atau menenangkan suatu kelompok. Juga memiliki pengaruh membawa semua orang bersama-sama dan menciptakan rasa berbagi dan berpartisipasi. Anak-anak seringkali mengalami kesulitan di kelas untuk bergabung dengan kelompok aktivitas lain, akan tetapi siapa yang bisa berbagi dalam menyanyi kolaboratif. Menyanyi tidak memerlukan peralatan yang sulit, lagi pula menyanyi dapat dilakukan secara spontanitas, mengurangi kekhawatiran pada saat hari akademis (ujian). (1994:48)

Fuller juga menyatakan bahwa, *Musik aids in the development of visual, auditory, and language skill. It also develops hand. Ear, and eye coordination and improves agility, dexterity, and small muscle development* yang di artikan sebagai berikut, musik membantu dalam pengembangan visual, auditori, dan keterampilan bahasa. Ia juga mengembangkan kemampuan tangannya (motorik). Telinga dan mata meningkatkan koordinasi dan kelincahan, ketangkasan, dan perkembangan otot kecil. (1994:13-14)

Didalam Jurnalnya yang berjudul *Debating Assesment In Education in Musik Education* Ryan Fisher menunjukkan bahwa organisasi pendidikan musik mencapai sukses besar di Texas beberapa tahun yang lalu ketika undang-undang menyatakan musik sebagai bagian dari kurikulum inti. Demikian pula, bersamaan dengan belakangan ini, Nasional pendidikan undang-undang seperti *No Child Left Behind* telah diakui musik sebagai inti kurikuler mengevaluasi status pendidikan musik di Amerika Serikat. Para pendukung untuk penilaian musik Nasional juga berpendapat bahwa pengujian yang ketat menetapkan musik dan seni sebagai mata pelajaran akademis penting. (2008:1)

Lehman didalam Jurnal Ryan Fisher secara keseluruhan menunjukkan lagi hasil, bahwa sementara siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan musik yang dilakukan lebih baik daripada mereka yang tidak. Dengan adanya penelitian ini, semakin jelaslah bahwa pendidikan musik memang membawa dampak yang cukup signifikan untuk meningkatkan kemampuan siswa sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan potensi dan prestasi menjadi

lebih baik. Apalagi di Negara Amerika sendiri di beberapa negara bagian sudah menjadikan pendidikan musik sebagai mata pelajaran inti. (2008:2)

Dari berapapun penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dengan mempelajari musik. Hanya saja sejauh ini pemerintah belum banyak memberikan porsi pendidikan musik secara utuh.

Mulyasa (2007:3) dalam bukunya yang berjudul *Menjadi guru yang Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* mengemukakan bahwa, sedikitnya ada tiga syarat utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar berkontribusi terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM), yakni: (1) sarana gedung, (2) buku yang berkualitas, (3) guru dan tenaga kependidikan yang profesional.

Mantan Menteri Pendidikan Nasional Wardiman Djoyonegoro dalam wawancaranya dengan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) tanggal 16 Agustus 2004. Pada waktu itu dikemukakan bahwa *“hanya 43% guru yang memenuhi syarat”, artinya sebagian besar guru (57%) tidak atau belum memenuhi syarat, tidak kompeten, dan tidak profesional”*.

Syaodih 1998 dalam Mulyasa (2007:13) mengemukakan bahwa guru memegang peranan yang cukup penting dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Lebih lanjut dikemukakannya bahwa guru adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Karena guru berada pada jajaran pengembang, maka guru pulalah yang selalu melakukan evaluasi terhadap penyempurnaan kurikulum. Menghadapi tugas yang demikian, betapa pentingnya seorang guru untuk meningkatkan aktivitas, kreativitas, kualitas, dan profesionalisme guru. Hal ini lebih nampak lagi dalam pendidikan yang dikembangkan secara desentralisasi yang sejalan dengan otonomi daerah. Guru diberi kebebasan untuk memilih dan mengembangkan materi standar dan kompetensi dasar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dan sekolah.

Simon Alexander. 1980 dalam Mulyasa, 2007:13 telah merangkum lebih dari 10 (sepuluh) hasil penelitian di negara-negara berkembang, dan menunjukkan adanya dua kunci penting dari peran guru yang berpengaruh terhadap peningkatan

prestasi belajar peserta didik; yaitu: jumlah waktu efektif yang digunakan guru untuk melakukan pembelajaran di kelas, dan kualitas kemampuan guru. Dalam hal ini, guru hendaknya memiliki standar kemampuan profesional untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas. Salah satunya dengan mengembangkan metode pelajaran berbasis “**PAIKEM**” (*Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan*). Bentuk penerapakan **PAIKEM** itu adalah

1. Guru-guru selalu berupaya menciptakan kondisi agar siswa selalu aktif di kelas.
2. Sekolah selalu mendorong guru-guru untuk berinovasi dalam pembelajaran. Ada waktu-waktu tertentu yang memang disediakan bagi guru-guru untuk berinovasi.
3. Misalnya, melalui KKG. Dalam forum ini guru-guru serumpun membicarakan metode-metode apa yang dapat digunakan dalam pembelajaran berikutnya.
4. Hasil karya siswa di pajang di kelas.
5. Ada rewards bagi guru yang berprestasi.

Seorang komponis Honggaria, Zaltan Kodaly (1882-1967) berpendapat: *”Tidak ada anak yang tidak mempunyai kemampuan musikal. Yang sering terjadi adalah kemampuan itu tidak dikembangkan”*. (Desyandri’s Weblog,2008)

Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini guru perlu memperhatikan peserta didik secara individual, karena satu peserta didik dengan peserta didik yang lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Guru juga harus berpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik, agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam hal ini guru harus kreatif, profesional, dan menyenangkan dengan memposisikan diri sebagai berikut:

1. Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya, Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi peserta didik,

2. Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan, melayani peserta didik sesuai dengan minat, kemampuan, dan bakatnya,
3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan membantu pemecahannya,
4. Memupuk rasa percaya diri, berani bertanggung jawab,
5. Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan (bersilaturahmi) dengan orang lain secara wajar,
6. Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antar peserta didik, orang lain, dan lingkungannya,
7. Mengembangkan kreativitas,
8. Menjadi pembantu ketika diperlukan.

Untuk memenuhi tuntutan di atas, guru harus mampu memaknai pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik. Untuk kepentingan tersebut, dengan memperhatikan kajian Pullias dan Young (1988), serta Yelon dan Weinstein (1997) dalam Mulyasa (2007:37), dapat diidentifikasi sedikitnya 19 peran guru, guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu (*innovator*), model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa ceritera, aktor, emansipator, evaluator, dan sebagai kulminator. Begitu banyak yang harus dilakukan guru dalam memaknai pembelajaran dan secara tak langsung akan meningkatkan profesionalitas dan potensi yang dipunyai guru.

Suryanto di dalam Teropong pendidikan kita mengatakan, seorang guru yang akan mengembangkan kurikulum dituntut menguasai manajemen perkembangan kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum, setidaknya guru akan menemui delapan problem. Pertama, bagaimana membatasi ruang lingkup atau keluasan materi, bagaimana mengaitkan relevansi materi dengan kompetensi yang dibutuhkan. Ketiga, bagaimana memilih materi agar ada keseimbangan untuk peserta didik maju dan yang lamban belajar, keseimbangan antara tuntutan daerah dan Nasional. Keempat, bagaimana mengintegrasikan materi yang satu

dengan materi yang lainnya agar tidak terjadi duplikasi. Kelima, bagaimana mengurutkan materi dan kompetensi yang diperlukan. Keenam, bagaimana agar materi atau kompetensi berkesinambungan atau berjenjang. Ketujuh bagaimana merealisasikan artikulasi materi atau kompetensi secara menyeluruh. Terakhir, bagaimanakah materi atau kompetensi yang diberikan dapat menjangkau masa depan alias memiliki daya guna bagi kehidupan peserta didik. (2007:24).

Semakin jelaslah bahwa beban guru pada saat ini sangat berat. Apalagi untuk para guru seni budaya keterampilan dimana guru SBK ini dituntut menguasai multi mata pelajaran yaitu, seni musik, seni tari, seni rupa dan keterampilan.

Pada pembelajaran seni, budaya dan keterampilan khususnya mata pelajaran pendidikan seni musik dapat dilakukan guru dengan menggunakan beberapa metode dan pendekatan-pendekatan yang akan menghantarkan peserta didik kepada pembelajaran pendidikan seni musik yang menyenangkan, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. Dengan memperhatikan personaliti guru yang dijabarkan di atas, guru harus mempersiapkan secara efisien dan efektif segenap kemampuan pribadi dan kemampuan akademis. Layaknya seorang guru yang akan memberikan pembelajaran pendidikan seni musik, sudah tentu harus mengerti akan basic musik, baik itu mengenai vokal maupun mengenai permainan atau praktek musik itu sendiri.

Pada pembelajaran pendidikan seni musik di sekolah dasar kemampuan guru tidak dituntut harus mahir memainkan seluruh alat musik secara profesional layaknya seorang pekerja seni atau ilmu seni murni (*fine art*) ataupun harus menjadi seorang pakar seni baru bisa membelajarkan seni musik, dan tidak harus menjadi vokalis terkenal dalam menyanyikan lagu-lagu yang sulit, akan tetapi guru lebih diutamakan berperan sebagai seorang akademisi yang akan memberikan pengalaman musik sesuai dengan kehidupan peserta didik di keseharian mereka. Dengan kata lain guru memposisikan dirinya sebagai ilmu seni terapan (*application art*).

## 2.9. Penelitian Sebelumnya

Kini banyak kajian dan penelitian mengenai analisis implementasi kebijakan publik bidang pendidikan. Namun hingga kini, belum ada penelitian tentang “Analisis Kebijakan Kurikulum Seni Budaya Keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat. Beberapa hasil kajian dan penelitian yang memiliki relevansi dengan topik pendidikan khususnya bidang seni budaya keterampilan sebagai berikut;

### 2.9.1. Pelaksanaan Kurikulum 1994 Mata Pelajaran Seni di SMU se-Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Lulu Wulandjati yang berjudul “Pelaksanaan Kurikulum 1994 Mata Pelajaran Seni di SMU se-Kabupaten Kuningan Jawa Barat” menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kurikulum belum sepenuhnya berjalan. Hal ini disebabkan antara lain, dalam pelaksanaan mata pelajaran seni menginginkan bentuk pelajaran terpadu antar bidang seni. Namun pada pelaksanaannya berbeda-beda. Ada yang mengambil seni musiknya saja, seni tarinya saja, begitu pula dengan seni tari dan teater. Ini disesuaikan dengan tenaga guru yang ada. Apabila masih banyak sekolah yang belum memiliki guru seni, maka jangankan 4 bidang seni, satupun bingung, sehingga akhirnya terkesan asal jalan saja. Tapi ada juga sekolah-sekolah yang mencoba untuk melaksanakan dan mengembangkannya dalam bentuk praktek, dengan berbagai cara.
2. Dalam kurikulum 1994 menuntut seorang guru untuk lebih profesional dan kompeten dibidangnya, dengan harapan guru tersebut bisa lebih kreatif dalam mengembangkan kemampuan penguasaan materinya. Namun hal ini tidak disesuaikan dengan tenaga guru di lapangan, dimana seorang guru hanya memiliki satu keahlian saja. Banyak guru yang bersangkutan membuat catatan dalam bentuk diktat atau semacamnya yang diakibatkan oleh minimnya buku-buku baku sebagai pegangan guru dan murid, masih belum memenuhi keinginan kurikulum 1994. Hal ini

menjadi kelemahan, karena latar belakang pendidikan yang berbeda-beda (jurusan tari, musik, rupa dan teater), sehingga visinya pun berbeda-beda untuk disampaikan ke anak murid.

3. Konsep pembelajaran terpadu mengharapkan ke 4 (empat) bidang seni bisa dijalankan oleh seorang guru, bukannya tidak bisa berjalan. Bagaimana dengan hasil, tanggungjawab moral dan komitmen nantinya.

### **2.9.2. Telaah Pelaksanaan Kurikulum 1994 (Studi Implementasi Studi Kerajinan Tangan dan Kesenian di SLTP di Kabupaten Karawang)**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudi Wahyu Widiana tersebut menyimpulkan bahwa :

1. Menurut pandangan guru, bahwa kurikulum Kerajinan tangan dan keterampilan tahun 1994 merupakan kebijakan yang tidak dilandasi realita dilapangan, dimana banyak sekolah masih kekurangan guru seni.
2. Kurikulum 1994 merupakan pendekatan “from the top down”, sehingga tidak mengakomodasi kemampuan dan kesulitan di tingkat bawah (sekolah)
3. Pendidikan seni dalam kurikulum hanya sekedar pelengkap saja, ini nampak pada jumlah jam yang sangat sedikit.
4. Para pemegang kebijakan lebih mementingkan untuk bidang studi IPA, Matematika, IPS, Bahasa Indonesia, dan lainnya yang jamnya lebih banyak.

Dari dua Penelitian tentang “Pelaksanaan Kurikulum 1994 Mata Pelajaran Seni di SMU se-Kabupaten Kuningan Jawa Barat”, dan Telaah Pelaksanaan Kurikulum 1994 (Studi Implementasi Studi Kerajinan Tangan dan Kesenian di SLTP di Kabupaten Karawang, meskipun berbeda dalam strata objek penelitiannya yaitu antara tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Menengah Umum, namun memiliki beberapa kajian penelitian yang sama dalam konteks permasalahan-permasalahan utama terhadap implementasi kebijakan kurikulum seni.

Sebagaimana telah di urai di atas dan mengacu pada tujuan penelitian ini yaitu analisis implementasi kebijakan kurikulum seni budaya dan keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat, bahwa program pembelajaran yang merupakan realisasi dari sebuah desain pembelajaran yang komprehensif sebagai bagian dari kebijakan pendidikan yang ada saat ini. Mengacu pada teori atau model implementasi dari George Edward III yang menekankan pada faktor-faktor *komunikasi, sumber daya, disposisi kebijakan dan struktur birokrasi* yang menentukan terselenggaranya implementasi. Tabel berikut menjadi acuan dari desain operasional konsep penelitian yang dilakukan.

**Tabel 1. DESAIN OPERASIONAL KONSEP**

**Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Seni Budaya dan Keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat**

Variabel		Dimensi		Indikator	Jenis Data
<b>Komunikasi</b>	1.	Mekanisme lintas koordinasi atas implementasi kebijakan	1.	Seberapa besar tingkat kesalahan atas persepsi implementasi kebijakan dalam konteks koordinasi dan konsistensi	Primer (angket, wawancara dan observasi)
	2.	Pemahaman implementasi kebijakan			
	3.	Kepercayaan, tanggungjawab dan konsistensi terhadap implementasi kebijakan	2.	Bagaimana pelaksana kebijakan memandang, memahami dan menerima pengetahuan secara utuh atas implementasi kebijakan yang disertai dengan kepercayaan, tanggungjawab dan konsisten dalam melaksanakan kebijakan tersebut	

<b>Sumber Daya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata laksana potensi sumberdaya seluruh komponen sekolah: guru,pendanaan program,informasi, wewenang dan fasilitas pendukung lainnya</li> <li>2. Komitmen dan dukungan seluruh sumberdaya terhadap implementasi kebijakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seberapa kuat potensi sumberdaya dalam menerjemahkan alur implementasi kebijakan secara akurat, tegas dan konsisten</li> <li>2. Bagaimana mendorong terciptanya fungsi pengawasan terhadap seluruh potensi sumberdaya sesuai dengan alur implementasi kebijakan</li> </ol>	Primer (angket, wawancara dan observasi)
<b>Disposisi Kebijakan (Sikap para pelaksana)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi persepsi pengambil kebijakan di sekolah terhadap implementasi kebijakan Identifikasi persepsi dan sikap kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap implementasi kebijakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seberapa besar “ zona ketidakpedulian” pelaksana kebijakan atas kesepakatan implementasi kebijakan</li> <li>2. Bagaimana teknik meminimalisir terjadinya ketidakselarasan pandangan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan</li> </ol>	Primer (angket, wawancara dan observasi)
<b>Struktur Birokrasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Standar Operasional Prosedur (SOP) implementasi kebijakan</li> <li>2. Identifikasi hal-hal yang mempengaruhi signifikansi implementasi kebijakan dalam meminimalisir terjadinya perpecahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seberapa besar respon internal terhadap sistem tatalaksana kebijakan yang dikaitkan dengan keterbatasan waktu, sumberdaya pelaksana dan keinginan keseragaman dalam</li> </ol>	Primer (angket, wawancara dan observasi)

	(fragmentasi) antar unit birokrasi	2.	implementasi operasional prosedur Bagaimana cara meminimalisir faktor-faktor tekanan yang terjadi di luar unit birokrasi yang dapat mengakibatkan perpecahan dan hambatan implementasi kebijakan	
--	------------------------------------	----	---	--

Tabel desain operasional konsep di atas mengacu pada kerangka teori yang dikembangkan oleh George C. George Edward III yang mengklasifikasikan dan menyetengahkan 4 (empat) faktor krusial atau variabel yang berpengaruh dalam implementasi publik yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan birokrasi, yang secara operasional dipandang George Edward III akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.

Pada variabel komunikasi, terdapat dimensi dan indikator yang dibangun yaitu **transmission** (*cara penyampaian*) informasi yang menurut George Edward III dapat menimbulkan distorsi penyampaian pesan berupa ‘noise’ gangguan, dan bisa jadi disebabkan oleh kehendak bebas atas pesan yang diterima oleh pelaksana kebijakan. **Clarity** ‘kejelasan’ mengandung makna bahwa tidak ada pemaknaan yang ambigu. **Consistency** ‘konsistensi’ mengandung makna perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Hal ini untuk mendorong konsistensi dan kejelasan pelaksana kebijakan dan menurunkan tingkat kelonggaran pelaksana kebijakan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Oleh karenanya, dimensi dan indikator pada variabel komunikasi di atas mengerucut pada konteks mekanisme lintas koordinasi, pemahaman, kepercayaan, tanggungjawab serta konsistensi terhadap implementasi kebijakan.

Pada variabel **sumberdaya**, terdapat dimensi dan indikator yang menegaskan pada potensi sumber-sumber pada implementasi kebijakan yang berdampak langsung terhadap proses implementasi. Potensi sumber-sumber daya menitikberatkan pada; kecukupan jumlah staf yang memiliki keahlian serta keterampilan dalam melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai atau relevan, wewenang yang dimiliki implementor serta fasilitas dan sarana prasarana implementasi kebijakan.

Jika sumber daya tidak memadai akan berakibat pada program yang tidak akan terlaksana dengan sempurna karena tidak dapat melakukan pengawasan dengan baik. Oleh karenanya, dimensi dan indikator pada variabel sumber daya diatas mengerucut pada konteks tata laksana potensi sumberdaya seluruh komponen sekolah: guru,pendanaan program,informasi, wewenang dan fasilitas pendukung lainnya serta komitmen dan dukungan seluruh sumberdaya terhadap implementasi kebijakan.

Pada variabel **disposisi**, terdapat dimensi dan indikator yang menitikberatkan pada ketetapan atau kecocokan tipe atau kepribadian antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. George Edward III membangun teori bahwa tipikal kebijakan atau pandangan yang relatif sama antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan serta memiliki korelasi positif dengan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks ini akan terjadi kesesuaian pandangan yang signifika, sungguh-sungguh, penuh penghayatan dan sepenuh hati.

Oleh karenanya, dimensi dan indikator pada variabel disposisi diatas mengerucut pada konteks identifikasi persepsi pengambil kebijakan di sekolah dan identifikasi persepsi dan sikap kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap implementasi kebijakan. Hal ini bertujuan untuk melihat ‘zona ketidakpedulian’ pelaksana kebijakan atas kesepakatan implementasi kebijakan serta teknik meminimalisir terjadinya ketidakselarasan pandangan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan.

Pada variabel **birokrasi**, terdapat dimensi dan indikator yang menitikberatkan pada koordinasi dan kerjasama yang harus dilakukan secara sinergi agar masing-masing pelaksana kebijakan terpenuhi kebutuhannya, serta agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar badan pelaksana implementasi kebijakan. Menurut Edward III, ada dua karakteristik utama struktur birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentation. Adanya standar operasional prosedur (SOP) yang merupakan positivasi atau pembakuan terhadap langkah-langkah dan prosedur yang harus dikerjakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan. SOP merupakan standar penyikapan baku yang harus dilaksanakan dalam kondisi apapun, diterapkan secara seragam dan standar.

Menurut George Edwards III, selain SOP sangatlah penting memperhatikan fragmentation dalam struktur birokrasi. Fragmentation adalah pembagian pusat koordinasi dan pertanggungjawaban. Oleh karenanya, dimensi dan indikator pada variabel struktur birokrasi diatas menitikberatkan pada pengelolaan Standar Operasional Prosedur (SOP) implementasi kebijakan, serta identifikasi hal-hal yang mempengaruhi signifikansi implementasi kebijakan dalam meminimalisir terjadinya perpecahan (fragmentasi) antar unit birokrasi.

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar respon internal terhadap sistem tatalaksana kebijakan yang dikaitkan dengan keterbatasan waktu, sumberdaya pelaksana dan keinginan keseragaman dalam implementasi operasional prosedur. Dan cara meminimalisir faktor-faktor tekanan yang terjadi di luar unit birokrasi yang dapat mengakibatkan perpecahan dan hambatan implementasi kebijakan.

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan kurikulum mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi, Jawa Barat, menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan metode survey, menggunakan kuesioner karena bertujuan untuk menjelaskan hubungan korelasional (*hubungan antar dua variable atau lebih*), Irawan, 2006. Melalui metode tersebut peneliti ingin mengetahui gambaran kondisi sekolah saat mengimplementasikan kebijakan kurikulum mata pelajaran Seni Budaya Keterampilan, khususnya Pendidikan Seni Musik, hingga perlu dilakukan analisis implementasi kebijakan kurikulum mata pelajaran Seni Budaya Keterampilan, khususnya Pendidikan Seni Musik di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi, Jawa Barat.

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian positivism (Neuman: 2000). Pendekatan positivism melihat ilmu sosial sebagai suatu metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan logika deduktif dengan pengamatan empiris guna secara probabilistik menemukan atau memperoleh konfirmasi mengenai hukum sebab akibat yang dapat dipergunakan untuk memprediksi pola-pola umum suatu gejala sosial tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak terlibat, netral, dan objektif ketika mengukur berbagai aspek dalam kehidupan sosial, meneliti berbagai bukti dan mengulang suatu penelitian yang lain.

#### 3.2 .Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, menggunakan tipe penelitian analisis deskriptif. Jenis penelitian analisis deskriptif digunakan secara mendalam, rinci, dan spesifik terhadap data-data yang diambil untuk mengetahui implementasi kebijakan kurikulum Seni Budaya dan Keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi, Jawa Barat. Data-data tersebut dianalisis melalui empat variabel atau faktor

krusial model implementasi Edward III, yaitu *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *dispositions* (karakter), serta *bureaucratic structure* (struktur birokrasi). Data yang dikumpulkan berupa deskripsi, uraian detail yang menjelaskan data-data apa adanya.

### 3.3. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kepala sekolah sebagai penanggungjawab sekolah dan guru-guru bidang studi seni budaya keterampilan dengan dibantu pengumpulan data-data berupa data primer dan data skunder di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi, Jawa.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang digunakan sebagai teknik analisis deskriptif. Data-data dikumpulkan tersebut berupa data primer dan data skunder. Data primer diambil secara langsung dari objek penelitian terhadap lembaga Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi, Jawa Barat, yaitu data materi, guru, sarana prasarana, dan data metode penyajian. Sedangkan data skunder diambil berdasarkan studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan kerangka teori yang relevan mengenai fokus penelitian yang diperoleh dari buku-buku literatur.

Dalam hal ini, teknik pengumpulan data primer dan skunder tersebut, diambil peneliti melalui teknik wawancara, observasi, dan *desk research*.

#### 3.4.1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antarpribadi bersemuka (*face to face*), pribadi yang satu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dari pribadi yang lainnya (Fred N. Kerlinger, 2006, hlm. 770).

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung yang berkaitan dengan seluruh

unsur yang ada di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi, Jawa Barat, yaitu mengenai materi, guru, sarana prasarana, dan metode penyajian.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai materi yaitu berupa pertanyaan tentang alokasi waktu per mata pelajaran, kesesuaian dengan kebutuhan, kesesuaian urutan penyajian, uraian materi telah sesuai dengan tujuan, dan perbandingan antara teori dengan praktik.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada guru yaitu berupa penguasaan materi, kejelasan penyajian substansi, interaktivitas dengan murid, disiplin kehadiran, daya simpati, gaya dan sikap guru.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai sarana dan prasarana yaitu meliputi pengadaan dan keadaan sarana seperti inventaris sekolah meja kursi, instrument/alat musik, dan berupa prasarana seperti kebersihan ruangan, kenyamanan ruangan pencahayaan dan sirkulasi udara, serta luas ruangan. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai metode penyajian meliputi seputar sejauh mana penggunaan metode mengajar yang digunakan di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi, Jawa Barat, yaitu meliputi metode ceramah, diskusi, latihan/praktik, penugasan, pengulangan topik, dan informasi kemajuan (*test harian*).

#### **3.4.2 Observasi**

Teknik pengumpulan data melalui observasi adalah produser sistematis dan baku sebagai perluasan dari teori dan teknik pengukuran. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur, yaitu dengan memberikan cek list pada instrument yang diteliti. Objek yang diobservasi dalam penelitian ini bersifat nyata yang tercakup segala yang mendukung dalam proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi, Jawa Barat.

### 3.4.3 Desk Research

*Desk research* atau studi kepustakaan adalah pengambilan data skunder melalui buku-buku yang relevan. *Desk research* dilakukan dalam teknik pengumpulan data penelitian ini dimaksudkan sebagai pengambilan sumber-sumber yang menunjang informasi yang telah didokumentasikan dalam pengelolaan dan pengumpulan data-datanya.

Sumber informasi tersebut mencakup kebijakan-kebijakan tentang keputusan, peraturan, undang-undang, dan produser mengenai kurikulum Seni Budaya dan Keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi, Jawa Barat. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi Badan Standar Nasional Pendidikan yang dijelaskan dalam Pasal 35 ayat 2 dan Sisdiknas Bab 1 pasal 1 No. 19.

### 3.5 Populasi dan Sampel

Populasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru-guru mata pelajaran seni budaya dan keterampilan dan siswa di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi, Jawa Barat. Penarikan sampel akan dipilih berdasarkan teknik *purpose sampling* dimana sampel akan dipilih berdasarkan pada kriteria tertentu, yaitu kepala sekolah dan guru. Adapun populasi yang diteliti sebagai informan atau narasumber yang terdiri dari;

- a. Dwi Maria Handayani (Kepala Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat)

Kepala sekolah dijadikan informan karena memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan dan bertanggungjawab penuh atas keberhasilan sekolah.

- b. Mohammad Charles (Guru Seni Musik)

Mohammad Charles adalah guru seni musik yang mengajar di kelas V dan VI dengan latarbelakang pendidikan sarjana strata satu jurusan seni musik.

Selain menjadi guru seni music, Mohammad Charles juga sebagai Pembina Gema Swara Nasional 1 Choir (Paduan Suara Nasional Satu).

c. Wina Ardhiana (Guru Seni Musik)

Wina Ardhiana adalah guru seni musik yang mengajar di kelas IV dengan latarbelakang pendidikan sarjana strata satu jurusan seni musik. Selain menjadi guru seni musik, Wina Ardhiana juga membantu Mohammad Charles dalam persiapan-persiapan dan kejuaraan lomba paduan suara yang diikuti oleh Gema Swara Nasional 1 Choir baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

d. Lidia Marlinda (Guru Seni Tari)

Lidia Marlinda adalah guru seni tari yang mengajar di kelas I – VI dengan latar belakang pendidikan sarjana strata satu jurusan seni tari.

e. HR Prabowo (Guru Seni Rupa)

HR Prabowo adalah guru seni rupa yang mengajar di kelas I – VI (Paket Singgah) dengan latar belakang sarjana strata satu jurusan komputer.

f. Wasis Pambudi (Guru SBK Kelas Rendah)

Wasis Pambudi adalah guru seni budaya keterampilan untuk kelas rendah dengan latarbelakang pendidikan sarjana strata satu jurusan sosiologi.

g. Wuri Wiyani (Guru SBK Kelas Rendah)

Wuri Wiyani adalah guru seni budaya keterampilan untuk kelas rendah dengan latarbelakang pendidikan sarjana strata satu.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen didalam Irawan, analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang didapatkan, yang kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap suatu fenomena) dan membantu untuk mempresentasikan penemuan kepada orang lain. Tersirat dalam penjelasan ini, bahwa analisis data terkait erat dengan pengumpulan dan interpretasi data sebab analisis data dalam penelitian kualitatif sering kali bersamaan dengan interpretasi data (Irawan, 2006, hlm. 73).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka prosedur penelitian ini mengalami beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Mentah.

Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data mentah, yaitu dari hasil wawancara, observasi, dan *desk research* data-data yang dikumpulkan berupa data objektif atau data-data yang belum diberikan pemikiran, kritik, komentar, atau pun masukan dari peneliti.

2. Transkrip Data.

Dalam tahap ini, data yang sudah terkumpul diubah menjadi bentuk tertulis.

3. Pembuatan Koding

Dalam tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip dan mencari dengan teliti bagian-bagian yang penting untuk diproses dalam tahap selanjutnya.

4. Kategorisasi Data

Dalam tahap ini, peneliti menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan kategori.

5. Penyimpulan Sementara

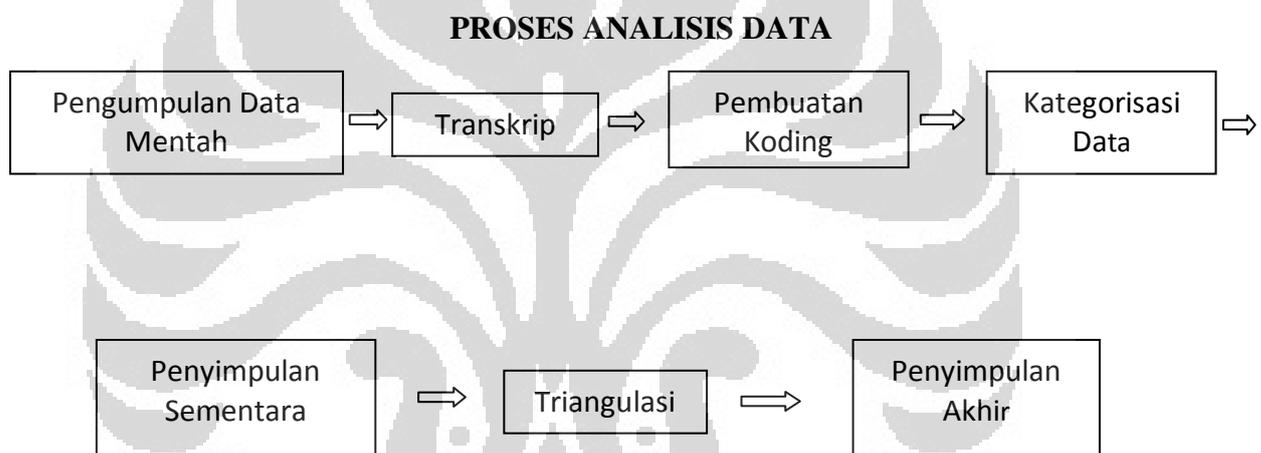
Dalam tahap ini, peneliti sudah mengambil kesimpulan namun masih bersifat sementara. Kesimpulan sementara ini belum dianalisis berdasarkan pemikiran dan penafsiran peneliti.

#### 6. Triangulasi

Dalam tahap ini, dilakukan proses cek dan recek antara satu sumber data dengan sumber data yang lainnya.

#### 7. Penyimpulan Akhir

Dalam tahap ini, peneliti menyimpulkan dari data-data yang sudah dikumpulkan.



Sumber: Irawan, 2006, hlm. 73

**Gambar 3. Proses Analisis Data**

### 3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Raya Hankam, Bojong Nangka II/38, Rt 03 / 07, Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi 17414. Pemilihan lokasi penelitian di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat melalui pertimbangan yang cukup matang, mengingat Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat merupakan sekolah unggulan yang memiliki reputasi sangat bagus untuk bidang seni budaya keterampilan. Berbagai prestasi yang telah ditorehkan pada even-even lomba

kesenian baik tingkat Kecamatan, Kotamadya, Provinsi dan Nasional mendorong keinginan peneliti untuk meneliti lebih jauh bagaimana implementasi kebijakan kurikulum seni budaya keterampilan terintegrasi. Sehingga tercapainya target pembelajaran dan berhasil menciptakan prestasi sekolah dan siswa dengan baik. Waktu penelitian yang dilakukan selama dua bulan dari tanggal 29 November hingga 29 Januari 2012.

### 3.8 Keterbatasan Penelitian

Penelitian tentang Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan (Pendidikan Seni Musik) di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi, Jawa Barat sekolah dasar hanya dilakukan pada mata pelajaran mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK), pada sub pelajaran seni musik saja, karena pemilihan pendidikan seni musik ini kami anggap cukup mewakili dari sub mata pelajaran yang lain, seperti seni rupa, seni tari dan keterampilan. Mengingat keterbatasan waktu dan biaya dari penelitian ini mudah-mudahan tidak akan mengurangi makna penelitian.

## BAB 4

### KURIKULUM SENI BUDAYA KETERAMPILAN SEKOLAH DASAR NASIONAL 1, BEKASI, JAWA BARAT

Dalam bab ini dijelaskan mengenai perangkat kurikulum Seni Budaya Keterampilan yang digunakan di Sekolah Dasar Nasional 1 yaitu meliputi; proses penerapan kurikulum, tujuan dan sasaran kurikulum, sarana dan prasarana yang menunjang kurikulum, hasil yang diharapkan dari kurikulum Seni Budaya Keterampilan, serta profil Sekolah Dasar Nasional 1.

#### 4.1 Proses Penerapan Kurikulum

Kurikulum yang diterapkan di suatu negara tidak terlepas dari kebutuhan bangsa sebagai masyarakat pemakai, maka kurikulum di Indonesia harus mengacu kepada:

1. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 yang menegaskan perlunya diversifikasi kurikulum yang dapat melayani keanekaragaman sumber daya manusia, kemampuan siswa, sarana pembelajaran, dan budaya daerah. Diversifikasi kurikulum menjamin hasil pendidikan bermutu yang membentuk masyarakat Indonesia yang damai, sejahtera, demokratis, dan berdaya saing untuk maju.
2. Undang-undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 20 tahun 2003 pada Bab IX, Pasal 35, Ayat 1, bahwa standar pendidikan terdiri atas isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Ayat 2 standar Nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Demikian juga pada Bab X, Pasal 36, Ayat 2, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi, daerah, dan peserta didik.

3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Pasal 4 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan adanya kewenangan daerah provinsi, kabupaten, dan tata kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kewenangan Pemerintah daerah perlu dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi semua aspek pemerintahan (Penjelasan atas PP Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewarganegaraan Pemerintahan dan Daerah Provinsi sebagai Daerah Otonomi Kewenangan pemerintahan dalam bidang pendidikan di antaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Penetapan standar kompetensi peserta didik dan warga belajar
  - b. Pengaturan kurikulum Nasional
  - c. Penilaian hasil belajar secara Nasional
  - d. Penyusunan pedoman pelaksanaan
  - e. Penetapan standar materi pelajaran pokok, penetapan kalender pendidikan, dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah.

Di Indonesia, penerapan kurikulum harus mengikuti dan mengacu pada peraturan-peraturan di atas. Jika suatu sekolah tidak mengacu pada peraturan tersebut, maka sekolah tersebut tidak menjalankan program kegiatan yang akan dilakukan sekolah baik itu kegiatan di dalam kelas ataupun di luar kelas.

Menurut Wina Sanjaya (2005: 3), kurikulum adalah seluruh kegiatan yang dilakukan siswa baik di dalam maupun di luar sekolah asal kegiatan tersebut berada di bawah tanggung jawab guru (sekolah).

Romine (1945) dalam Wina Sanjaya (2005: 4) menambahkan bahwa *Curriculum is interpreted to mean all of the organized courses, activities, and experiences which pupils have under direction of the school, whether in the*

*classroom or not*. Kurikulum ditafsirkan berarti semua program yang terorganisir, baik kegiatan, dan pengalaman yang di bawah arahan sekolah, baik dalam kelas atau tidak. Kurikulum itu bukan hanya menyangkut mata pelajaran yang harus dipelajari, akan tetapi menyangkut seluruh usaha sekolah untuk mempengaruhi siswa belajar baik di dalam maupun di luar kelas atau bahkan di luar sekolah. Dengan demikian, proses belajar mengajar dalam penerapan kurikulum bukan hanya di dalam kelas namun di luar kelas juga dapat diterapkan.

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran Kurikulum Seni Budaya Keterampilan**

Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan memiliki peranan dalam pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai multi kecerdasan yang terdiri atas kecerdasan intrapersonal, interpersonal, visual spasial, musikal, linguistik, logik matematik, naturalis serta kecerdasan adversitas, kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual dan moral, dan kecerdasan emosional.

Seni Budaya Keterampilan merupakan mata pelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam berbagai pengalaman apresiasi maupun pengalaman berkreasi untuk menghasilkan suatu produk berupa benda nyata yang bermanfaat langsung bagi kehidupan siswa. Dalam mata pelajaran Seni Budaya Keterampilan, siswa melakukan interaksi terhadap benda-benda produk kerajinan dan teknologi yang ada di lingkungan siswa, dan kemudian berkreasi menciptakan berbagai produk kerajinan maupun produk teknologi, secara sistematis, sehingga diperoleh pengalaman konseptual, pengalaman apresiatif dan pengalaman kreatif.

Dalam kurikulum Seni Budaya Kerampilan menitikberatkan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- Memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan
- Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan keterampilan
- Menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan keterampilan

- Menampilkan peran serta dalam seni budaya dan keterampilan dalam tingkat lokal, regional, maupun global.

Bidang seni rupa, musik, tari, dan keterampilan memiliki kekhasan tersendiri sesuai dengan kaidah keilmuan masing-masing. Dalam pendidikan seni dan keterampilan, aktivitas berkesenian harus menampung kekhasan tersebut yang tertuang dalam pemberian pengalaman mengembangkan konsepsi, apresiasi, dan kreasi. Semua ini diperoleh melalui upaya eksplorasi elemen, prinsip, proses, dan teknik berkarya dalam konteks budaya masyarakat yang beragam.

Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan diberikan di sekolah karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatannya terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik, yang terletak pada pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi/berkreasi dan berapresiasi melalui pendekatan: “belajar dengan seni,” “belajar melalui seni” dan “belajar tentang seni”. Peran ini tidak dapat diberikan oleh mata pelajaran lain. Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan memiliki sifat multilingual, multidimensional, dan multikultural. Multilingual bermakna pengembangan kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara dan media seperti bahasa rupa, bunyi, gerak, peran dan berbagai perpaduannya.

Multi dimensional bermakna pengembangan beragam kompetensi meliputi konsepsi (pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi), apresiasi, dan kreasi dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetika, logika, kinestetika, dan etika. Sifat multikultural mengandung makna pendidikan seni menumbuhkembangkan kesadaran dan kemampuan apresiasi terhadap beragam budaya Nusantara dan Mancanegara. Hal ini merupakan wujud pembentukan sikap demokratis yang memungkinkan seseorang hidup secara beradab serta toleran dalam masyarakat dan budaya yang majemuk.

#### **4.3 Hasil yang diharapkan dari Kurikulum Seni Budaya Keterampilan**

Kurikulum yang baik dan seimbang adalah kurikulum sekolah yang memenuhi tuntutan masyarakat dikatakan kurikulum itu baik dan seimbang.

Kurikulum ini juga harus mampu mengembangkan segala segi kepribadian siswa. Di samping kebutuhan siswa sebagai anggota masyarakat (Slameto, 2003 : 93).

Konsep kurikulum sebagai suatu program atau rencana pembelajaran, tampaknya diikuti pula oleh para ahli kurikulum dewasa ini, seperti Donald E. Orlosky dan B. Othanel Smoth (1978) dan Peter F. Oliva (1982), yang mengatakan bahwa kurikulum pada dasarnya adalah sebuah perencanaan atau program siswa yang diarahkan sekolah (Wina Sanjaya, 2005: 5).

Kurikulum menjadi suatu konsep perencanaan atau program siswa sehingga akan terlihat hasil yang diharapkan. Untuk itu, dalam konsep perencanaan, pemerintah membuat suatu pedoman mendasar.

Lahirnya peraturan pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah menjabarkan pedoman oleh semua pihak dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pendidikan. Standar Nasional Pendidikan diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya standar, dua orang guru tidak akan memberikan penafsiran yang berbeda terhadap kedalaman sebuah kompetensi dasar dalam kurikulum. Demikian juga dengan proses pembelajaran, guru akan berfokus pada hasil (ouput) yang harus dicapai, tidak sekedar memenuhi target administrative yang ada dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Adanya standar atau hasil yang harus dicapai, juga dapat meningkatkan komponen input dan proses pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih efektif sehingga hasilnya optimal karena pembelajaran lebih berfokus (Mulyasa, 2009:18).

Muatan Seni Budaya dan Keterampilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tidak hanya terdapat dalam satu mata pelajaran karena budaya itu sendiri meliputi segala aspek kehidupan. Dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan, aspek budaya tidak dibahas secara tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni. Karena itu, mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya.

Mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

1. Seni rupa, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetak-mencetak, dan sebagainya
2. Seni musik, mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal, memainkan alat musik, apresiasi karya musik
3. Seni tari, mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh dengan dan tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari
4. Seni drama, mencakup keterampilan pementasan dengan memadukan seni musik, seni tari dan peran
5. Keterampilan, mencakup segala aspek kecakapan hidup (life skills) yang meliputi keterampilan personal, keterampilan sosial, keterampilan vokasional dan keterampilan akademik.

Keempat mata pelajaran tersebut diusahakan agar siswa dapat mencapai berbagai kegiatan seni, yaitu sebagai berikut:

Dalam mata pelajaran Seni Rupa, siswa diharapkan:

1. Mengapresiasi dan mengekspresikan keartistikan karya seni rupa terapan melalui gambar ilustrasi dengan tema benda alam yang ada di daerah setempat
2. Mengapresiasi dan mengekspresikan keartistikan karya seni rupa murni melalui pembuatan relief dari bahan plastisin/tanah liat yang ada di daerah setempat
3. Mengapresiasi dan mengekspresikan keunikan karya seni rupa Nusantara dengan motif hias melalui gambar dekoratif dan ilustrasi bertema hewan, manusia dan kehidupannya serta motif hias dengan teknik batik

4. Mengapresiasi dan mengekspresikan keunikan karya seni rupa Nusantara dengan motif hias melalui gambar dekoratif dan ilustrasi dengan tema bebas
5. Mengapresiasi dan mengekspresikan keunikan karya seni rupa Nusantara melalui pembuatan benda kreatif yang sesuai dengan potensi daerah setempat

Dalam mata pelajaran Seni Musik, siswa diharapkan:

1. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik dengan memperhatikan dinamika melalui berbagai ragam lagu daerah dan wajib dengan iringan alat musik sederhana daerah setempat
2. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik dengan ansambel sejenis dan gabungan terhadap berbagai musik/lagu wajib, daerah dan Nusantara
3. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik dengan menyanyikan lagu wajib, daerah dan Nusantara dengan memainkan alat musik sederhana daerah setempat

Dalam mata pelajaran Seni Tari, siswa diharapkan:

1. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni tari dengan memperhatikan simbol dan keunikan gerak, busana, dan perlengkapan tari daerah setempat
2. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni tari dengan memperhatikan simbol dan keunikan gerak, busana, dan perlengkapan tari Nusantara
3. Mengapresiasi dan mengekspresikan perpaduan karya seni tari dan musik Nusantara

Dalam mata pelajaran Keterampilan, siswa diharapkan:

1. Mengapresiasi dan membuat karya kerajinan daerah setempat dengan teknik konstruksi
2. Mengapresiasi dan membuat karya kerajinan dan benda permainan dengan teknik meronce dan makrame
3. Mengapresiasi dan membuat karya kerajinan anyaman dengan menggunakan berbagai bahan
4. Mengapresiasi dan membuat karya benda mainan beroda dengan menggunakan berbagai bahan.

Di antara keempat bidang seni yang ditawarkan, minimal diajarkan satu bidang seni sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia serta fasilitas yang tersedia. Pada sekolah yang mampu menyelenggarakan pembelajaran lebih dari satu bidang seni, peserta didik diberi kesempatan untuk memilih bidang seni yang akan diikutinya. Pada tingkat SD mata pelajaran Keterampilan ditekankan pada keterampilan vokasional, khusus kerajinan tangan.

#### **4.4 Profil Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi Jawa Barat**

Sekolah Dasar Nasional 1 didirikan pada tahun 1984 oleh Ibu Susy Adriman. Ibu yang telah memulai melakukan suatu perubahan berdasarkan teori pendidikan terkini bahwa setiap siswa memiliki kemampuan, batasan dan kebutuhan yang berbeda, begitu juga harapan masa depannya. Nasional 1 (Nasional Satu) berikut sebutan untuk Sekolah Dasar Nasional 1, berkiprah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memberdayakan ketiga kecerdasan manusia yaitu, kecerdasan intelektual, emosional, serta kecerdasan spiritual pada semua kegiatan dan pelajaran berdasarkan kurikulum Diknas dipadukan dengan strategi belajar modern saat ini.

Lebih dari 23 tahun, Nasional 1 telah menerapkan pendidikan dengan standar Nasional di negeri ini, telah berupaya memberikan layanan bermutu pada siswa kami termasuk kepada masyarakat terkait. Kami percaya bahwa sekolah-sekolah bermutu harus memiliki guru atau infrastruktur yang bermutu pula. Di Nasional 1 kualitas guru adalah kunci meningkatkan prestasi siswa dari TK

hingga SMA dan sekolah dapat menerima dengan kapasitas 1.500 siswa. Sekolah ini menggunakan kalender Diknas dari bulan Juli hingga Juni setiap tahun, masa jeda empat atau enam minggu untuk liburan, memberikan masa istirahat dari tekanan belajar. Kapasitas kelas tidak lebih dari 30 siswa dan untuk taman kanak-kanak hingga kelas tiga dibantu guru pendamping. Pendidikan berlangsung dari Senin sampai Jumat pukul 7.00 pagi hingga 15.30 sore hari (kecuali TK dan SD pada kelas tertentu).

Dwi bahasa merupakan bagian dari filsafat sekolah Nasional 1 untuk mencapai kehidupan dunia lebih baik, siswa harus menguasai bukan saja bahasa penutur tapi paling tidak satu bahasa lainnya. Bahasa Inggris dan Indonesia dari Taman Kanak-kanak hingga jenjang selanjutnya, merupakan bahasa pengantar di Nasional 1. Belajar bahasa ketiga mulai di perkenalkan tahun pertama SMP. Melalui pendidikan dwi bahasa memperkuat persepsi siswa, dilengkapi wawasan global dan keterbukaan. Selain itu, mereka juga mengembangkan rasa harga diri dan percaya diri.

Dalam proses pembelajaran, Nasional 1 menggunakan metode sesuai dengan kurikulum yang menetapkan *active learning* dan metode *problem solving* Untuk dapat mengembangkan karakter building, leadership dan kemandirian bagi para siswa. Dengan kata lain Nasional 1 selalu berupaya secara berkesinambungan berperan sebagai pusat pembelajaran dimana guru berperan sebagai fasilitator dan mediator didalam pembelajaran. Salah satu program yang diunggulkan oleh Nasional 1 adalah program kakak adik asus (Kadiksuh) yang dapat mengajarkan dan mengembangkan sikap leadership dan tanggung jawab pada setiap siswa. Nasional 1 juga mengembangkan *moving class* dan *moving places* dalam pembelajaran. Dimana siswa berpindah dari kelas yang satu ke kelas yang lain sesuai dengan mata pelajarannya. Tiap ruang kelas di Nasional 1 telah di disain sesuai dengan mata pelajaran, sehingga kelas menarik dan menambah minat siswa untuk belajar.

Sekolah dalam satu “musik” memelihara suasana komunitas dengan bangga menganjurkan tali persaudaraan dan membantu pada tiap jenjang. Rasa empati

dan respek satu sama lain sekarang hakekatnya merupakan bagian dari kehidupan sekolah. Kesatuan sekolah dikembangkan dari bawah tanpa menghilangkan bagian atau kelompok dari bawah tanpa menghilangkan bagian atau kelompok antara siswa, guru, dan karyawan. Semangat saling respek dalam apresiasi, siswa yang lebih senior menolong junior (kadiksu) dalam lingkungan sekolah, guru memberikan rasa simpatik pada yang membutuhkan dan semua pekerjaan dihargai dalam upaya memelihara keindahan lingkungan sekolah.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan dan minat siswa khususnya yang tinggal di Bekasi, Nasional 1 memiliki lahan yang cukup luas, dilengkapi dengan berbagai infrastruktur untuk siswa umur 5 tahun hingga 18 tahun (TK, SD, SMP, SMA) memiliki 3 (tiga) kampus (kampus A, B, dan C).

Bagian Utama gedung sekolah ruang kelas dimana kegiatan belajar banyak terjadi. Tempat lain yang dapat ditemui di Nasional 1 (A, B, dan C) termasuk:

- Kantin
- Lapangan olahraga dan lapangan bermain;
- Ruang serbaguna;
- Ruang kantor;
- Perpustakaan (dilengkapi TV cable dan internet);
- Ruang laboratorium sains dan sosial sains;
- Ruang musik
- Ruang komputer (dilengkapi broadband internet)
- Arena out-bound, kebun/taman biologi, pusat pelatihan, asrama siswa;
- Kelas dan kelas saung dilengkapi kolam;
- Kolam renang;
- Klinik;
- Musholla dan lain-lain.

Nasional 1 mempunyai tiga gedung utama yang dijadikan sebagai tempat pembelajaran . Gedung A berfokus pada ilmu pelajaran sekolah, sedangkan gedung B dan C akan dirancang kepada pelajaran/materi untuk kemampuan hidup.

Mata pelajaran diberikan berpindah kelas, tugas, lokakarya, kompetisi dan pertemuan-pertemuan (siswa dimungkinkan akan berada pada tiga gedung tersebut sesuai dengan waktu dan jadwal yang tersedia).

Gedung A yang terletak di jalan Raya Hankam Bojong 2 No. 38, adalah pusat seluruh kegiatan akademis yang berlangsung di dalam kelas. Gedung B atau yang di sebut *Super Camp*, terletak di jalan Rambutan. Super Camp merupakan tempat para siswa melakukan kegiatan praktek dan melakukan kegiatan seperti outbound atau mengenal lebih dekat dengan alam. Gedung C yang juga terletak di jalan rambutan atau di sebut *Training Center*. Di Training center siswa mendapat pelatihan keterampilan yang dapat mengembangkan juga karakter serta kemandirian siswa

Penghijauan agenda spiritual meningkatkan ketaqwaan (iqro, mabit, pelatihan, diskusi dan perhelatan) drama, musik tari, peningkatan mutupelajaran (guru tamu, kontak orang tua, pengayaan, perbaikan, kunjungan), olahraga (taekwondo, badminton, futsal, basket, voli), masak, keterampilan hidup, kebun, pertamanan/penghijauan, seni lukis dan lain-lain.

## BAB 5

### PEMBAHASAN

#### 5.1. Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Seni Budaya dan Keterampilan Di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi Jawa Barat

Kebanyakan studi implementasi berupa studi kasus yang beragam dan hal ini dibutuhkan untuk memperoleh informasi lebih banyak. Studi kasus biasanya berdasarkan kepada satu kebijakan atau satu aspek dari kebijakan. Studi kasus memberikan banyak detail mengenai pembuatan kebijakan dan mempelajari dalam nuansa yang mungkin hilang dalam perlakuan yang lebih luas.

Akan tetapi pendekatan studi kasus untuk mempelajari kebijakan publik masih terbatas. Dengan sifat alaminya yang hanya fokus pada satu permasalahan, studi kasus tidak dapat memberikan dasar untuk penyamarataan mengenai jangkauan yang lebih luas dari kebijakan. Studi kasus implementasi tidak memiliki identifikasi yang sistematis atau analisis faktor-faktor yang penting dalam implementasi kebijakan publik.

Pendekatan lain yang digunakan pada implementasi kebijakan publik adalah fokus kepada pengaruh yang signifikan dalam pembuatan kebijakan. Studi yang paling terkemuka mengenai hal ini oleh Graham Allison dalam Pentingnya Keputusan. Dia menyajikan tiga model pembuatan kebijakan: pelaku yang rasional, proses organisasional, dan model birokrasi politik. Model kedua dan ketiga fokus kepada prosedur operasional standar (SOP) dan berturut-turut birokrasi politik, dan memberikan kepekaan kepada kita atas pentingnya tiga faktor ini dalam pembuatan kebijakan. Daripada kita fokus kepada pentingnya faktor dalam pembuatan keputusan secara umum, kita seharusnya menekankan kepada

bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi secara khusus.

Studi mendalam yang dilakukan oleh Eugene Bardach menggunakan metafora “permainan” untuk mempelajari implementasi. Bardach berpendapat bahwa kerangka permainan yang dibangunnya menjelaskan pembuatan kebijakan dengan mengarahkan perhatian kepada pemain (yaitu mereka yang terlibat dalam implementasi), pertaruhan mereka, strategi dan taktik, sumberdaya, aturan main dan komunikasi, dan tingkat ketidakpastian dari hasil yang mengelilinginya. Bagaimanapun kebanyakan apa yang ditandai dari “permainan” dapat digolongkan berdasarkan pendekatan kita dan dapat ditambah. Permainan metafora ini merupakan hal yang menarik, tetapi bukan merupakan pendekatan yang lengkap untuk mempelajari implementasi.

Studi implementasi yang lain disajikan oleh Donal Van Meter dan Carl Van Horn, dan yang terbaru oleh Paul Sabatier dan Daniel Mazmanian. Para peneliti ini mengidentifikasi sejumlah faktor yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi implementasi dan pendekatan faktor ini membantu kita pada jalur yang tepat. (Edward III, 1980)

Pemahaman yang dikembangkan George Edwards mengenai implementasi kebijakan berbeda dengan pemahaman mengenai evaluasi kebijakan. Sebagaimana George Edwards III menyatakan

*“ policy evaluation is a rapidly growing and valuable tool for policy makers. Essentially, it’s compares the goals of programs to their outcomes, measuring program impactas. While the policy evaluation approach can be very helpful in policy analisys, it does not tell the whole story about the success or failure of a public policy. We cannot reasonably policies until they have been implemented properly. In general, we should not expect a program to produce the desire result if it has not been operating according to design. Moreover, unless policy makers have*

*information on implementation, they will not know what to do with the result of evaluation studies. Why did the program fail? It might be because of the original policy design was poor, or it might be because the design was never implemented. Information on implementation is critical for decisionmaking regarding the future program*”, yang terjemahannya adalah, evaluasi kebijakan berkembang dengan cepat dan menjadi yang alat berharga bagi para pembuat kebijakan. Pada intinya, adalah membandingkan tujuan dari hasil program mereka, program pengukuran impactas. Sementara pendekatan kebijakan evaluasi bisa sangat membantu dalam analisis kebijakan, hal itu tidak menceritakan seluruh kisah mengenai keberhasilan atau kegagalan salah satu kebijakan publik. Kita tidak bisa merasa cukup sampai kebijakan itu sudah dilakukan dengan secara benar, sampai mereka yang telah diterapkan dengan baik. Secara umum, kita seharusnya tidak boleh berharap pada sebuah program jika sudah tidak berjalan sesuai dengan rancangan. Selain itu, kecuali ada informasi mengenai pembuat kebijakan pelaksanaan, mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dengan hasil studi evaluasi. Mengapa hal itu gagal? Mungkin saja, karena yang kebijakan yang di rancangan pada awalnya masih sangat kurang, atau bisa saja karena rancangan ini tidak pernah dilaksanakan. Informasi pada pelaksanaan adalah hal yang penting dalam pengambilan keputusan untuk program masa di masa depan.

Dapat disimpulkan George Edwards menekankan bahwa studi mengenai implementasi kebijakan berbeda dengan apa yang biasa diistilahkan sebagai “evaluasi kebijakan”. Evaluasi kebijakan merupakan perangkat bagi pembuat kebijakan yang tumbuh dengan cepat dan bernilai. Pada dasarnya evaluasi kebijakan membandingkan tujuan dari program dan hasilnya serta mengukur pengaruh program.

Meskipun pendekatan evaluasi kebijakan dapat sangat membantu dalam analisis kebijakan, evaluasi kebijakan tidak memberikan keseluruhan proses mengenai kesuksesan atau kegagalan dari kebijakan publik. Kita tidak dapat mengevaluasi kebijakan sampai dengan kebijakan

tersebut dilaksanakan dengan tepat. Secara umum kita tidak dapat mengharapkan sebuah program memberikan hasil seperti yang diharapkan jika kebijakan tersebut tidak dilakukan berdasarkan rencana.

Mengapa sebuah program menjadi gagal? Kemungkinan karena perencanaan kebijakan awal sangat buruk, atau mungkin karena apa yang telah direncanakan tidak pernah dilaksanakan. Informasi dalam implementasi merupakan hal yang penting untuk pembuatan keputusan bagi program di masa depan. Pentingnya informasi yang dapat dipercaya di dalam implementasi tidak dapat diabaikan. Ketika pembuat kebijakan kurang informasi mengenai implementasi, mereka tidak hanya menghilangkan potensi kesuksesan sebuah program, tetapi kemungkinan mereka mengembangkan program secara tidak tepat.

Berangkat dari pemahaman di atas, analisis implementasi kebijakan kurikulum seni budaya dan keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi Jawa Barat terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari sisi komunikasi, sumberdaya, disposisi kebijakan dan struktur birokrasi.

### **5.1.1. Faktor Komunikasi**

Keberhasilan Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat dalam meraih prestasi dalam bidang seni baik dari tingkat umum, Kabupaten/kota, Provinsi, Nasional dan Internasional, karena sekolah ini dapat mengembangkan kurikulum seni budaya keterampilannya dengan baik. Adanya koordinasi yang baik dari mulai Yayasan, kepala sekolah, hingga guru-guru Seni Budaya Keterampilan. Ada 3 hal yang disampaikan oleh George Edwards dalam faktor komunikasi ini, yaitu, *transmission*, *clarity* dan *konsistensi*. *Transmission* adalah kebijakan yang dilaksanakan tidak bukan hanya oleh si pelaksana saja, akan tetapi disampaikan juga kepada pihak lain. *Clarity* adalah dapat menerima dengan jelas suatu kebijakan yang disampaikan baik langsung atau tidak langsung. Lalu selanjutnya *communication*, yaitu tersampainya sebuah pesan yang disampaikan ke pada si penerima pesan atau

disebut juga dengan komunikasi. Hal ini diungkapkan dalam pesan “*Pihak sekolah memberikan informasi dan mengikutsertakan berbagai pelatihan yang diadakan oleh instansi terkait*” dan “*Sekolah memberikan kebebasan kami berapresiasi dan karena kami adalah mitra, itu yang selalu dicanangkan pihak sekolah kepada seluruh instrument sekolah*”. Jadi dalam pelaksanaan manajemen sekolah dan implementor yang dalam hal ini guru-guru SBK di SD Nasional 1 sudah terjalin suatu komunikasi yang cukup harmonis.

### **5.1.2. Faktor Sumber Daya Manusia**

- **Secara Kuantitatif**

Di Sekolah Dasar Nasional I ada 6 (enam) orang guru Seni Budaya Keterampilan yang mengajar dan sebagian dari guru-guru Seni Budaya Keterampilan ini sebagian sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ada dua orang guru yang mempunyai latar belakang dari jurusan seni musik, dan satu dari jurusan seni tari dan yang lainnya adalah guru kelas di kelas rendah (kelas 1 sampai dengan kelas 3).

Di Sekolah Dasar Nasional I, Pelajaran Seni Budaya Keterampilan di bagi dalam dua kelompok belajar, maksudnya adalah, dari kelas satu (1) hingga kelas tiga (3) murid-murid belum belajar seni musik. Karena di kelas rendah ini pelajaran masih bersifat tematis, maka pelajaran Seni Budaya Keterampilan ini lebih menitik beratkan pada pelajaran seni tari dan seni rupa yang terbagi dalam pelajaran menggambar, kerajinan tangan. Pengelompokan ini dibuat karena siswa kelas rendah masih mengutamakan pelatihan motorik-motorik halus yang dilakukan pada pelajaran seni rupa dan kerajinan tangan dan motorik-motorik kasar yang dilakukan pada pelajaran seni tari. Walaupun demikian di dalam pelajaran SBK yang bersifat tematis ini siswa kelas rendah ini juga mempelajari beberapa lagu anak-anak sederhana.

Seperti yang dikatakan oleh George Edwards III (1980:10-11) mengatakan lebih lanjut bahwa : “*No matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if the personal responsible for carrying out of policies lack the resources to*

*do an effective job, implementation will not affective*, teori ini diperkuat oleh James M. Cooper didalam Wina Sanjaya bahwa, *“A Teacher is a person charged with the responsibility of helping others to learn and behave in new and different ways”*, Cooper menambahkan *“ A Professional is a person who posseses some specialized knowledge and skills can weigh alternatives, and can select from among a number of potentially productive action one that is particularly appropriate in a given situation.(2005:hal 142)*. Jadi sudah jelas bahwa sumberdaya sangat mutlak diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan agar kebijakan tersebut tercapai dan terlaksana dengan baik.

Selain sumberdaya manusia di sekolah dasar Nasional 1 ini didukung pula oleh fasilitas-fasilitas, dimana yayasan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk proses belajar mengajar, yaitu dengan menyediakan ruang musik yang ideal dan dibuat khusus dengan peredam suara yang dilengkapi beberapa gambar-gambar alat musik, baik gambar alat musik modern ataupun tradisional dan gambar-gambar accord piano dan gitar. Hal ini tentu sejalan dengan apa dikatakan oleh George Edwards, bahwa Resources atau sumberdaya terkait dengan staff, budget, faculty dan information authority.

Berdasarkan pesan yang dibuat melalui wawancara terjalin suatu sinergi yang baik antara implementor *“manajemen sekolah memiliki komitmen tinggi menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung seni budaya keterampilan yang memadai dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pembelajaran. Ini memudahkan guru-guru seni budaya keterampilan dalam kegiatan belajar mengajar”*.

Sarana alat-alat musik yang disediakan di Sekolah Dasar Nasional I Bekasi Jawa Barat diantaranya :

- 1 buah piano elektrik Yamaha Clavinova
- 2 buah piano elektrik Samick (Hibah dari Korea)
- 2 buah keyboard Yamaha PSR 2100 dan PSR S 900

- 2 buah gitar akustik Yamaha *nylon*
- 2 buah instrument gitar listrik beserta *amplifier*
- 1 buah instrument bass gitar beserta *amplifier*
- 2 buah *Drum Set*
- 20 Yamaha CNR ( *keyboard sederhana*)
- Seperangkat angklung lengkap, melodi dan *accordnya* (*accompaniment*)

Nama Guru	Pendidikan	Mata Pelajaran yg diampu	Mengajar di Kelas	Ket.
Mohammad Charles	S1 Seni Musik	Seni Musik	V dan VI	
Wina Ardhiana	S1 Seni Musik	Seni Musik	IV	
Lidia Marlinda	S1 Seni Tari	Seni Tari	I - VI	
HR. Prabowo	S1 Komputer	Seni Rupa	I - VI	Paket Singgah
Wasis Pambudi	S1 Sosiologi	SBK Kelas Rendah	Guru Kelas rendah	
Wuri Wiyani	S1 S.IP	SBK Kelas Rendah	Guru Kelas rendah	

**Tabel 2. Tabel SDM**

- **Secara Kualitatif**

Untuk meningkatkan kualitas guru di kelas rendah yang mengajar SBK, penulis melihat terjalannya komunikasi yang baik antara guru SBK yang berlatar belakang seni musik, dengan guru kelas rendah, dimana guru kelas rendah (yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan seni musik), dalam satu tahun sekali mengikuti pelatihan dasar dibidang musik. Pelatihan ini dibuat oleh guru yang berlatar belakang seni musik untuk guru kelas rendah, agar mengetahui notasi, mengenal notasi dan lagu sederhana, bernyanyi, belajar bermain alat musik sederhana seperti pianika

dan rekorder (suling) . Akan tetapi untuk siswa kelas rendah yang mempunyai minat dibidang musik, bisa menyalurkan bakatnya pada kegiatan ekstrakurikuler paduan suara yang dilaksanakan pada hari sabtu.

Untuk siswa kelas empat (4) hingga kelas enam (6), pada mata pelajaran SBK ini akan dibekali pelajaran seni musik yaitu, mengenal melodi dgn notasi sederhana (notasi balok utk kelas 5 dan 6), teknik bernyanyi, dan teknik bermain recorder, bermain pianika, dan bermain alat musik ritmis.

Ada usaha-usaha yang dilakukan oleh guru di SD Nasional 1, untuk meningkatkan kemampuan baik dalam penyusunan rencana pembelajaran maupun dalam mengembangkan kemampuan dalam mengajar SBK. Hal ini didapat dari hasil wawancara berikut, “Kami selalu melakukan pertemuan reguler setiap semester dalam bentuk kelompok kerja guru (KKG) dan membicarakan berbagai hal seputar peningkatan kurikulum dengan berbagai kendala yang kami hadapi. Dan hasilnya selalu kami laporkan kepada pihak sekolah khususnya kepala sekolah.”.

Dan untuk meningkatkan kualitas guru maupun siswanya, Sekolah Dasar Nasional I ini sudah beberapa kali mengundang tokoh-tokoh dalam bidang seni untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Nasional 1 Musik Clinic* Seperti Idang Rasjidi dan Donny Suhendra, dan Group Nasyid Snada. Selain itu di Sekolah Dasar Nasional 1 juga mengadakan kegiatan AKSI yang kepanjangan dari “**Ajang Kreatifitas Siswa**”, dilaksanakan setiap hari sabtu dalam semester II , dimana siswa yang terlibat adalah siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 akan melakukan unjuk kebolehan dalam bidang seni dan akademis di hadapan kedua orangtua, guru dan teman-temannya secara bergiliran. Adapun tujuan dari “AKSI” ini adalah memberikan tempat untuk siswa untuk menampilkan bakatnya dalam bidang seni, akademis dan untuk melatih keberanian dan bersosialisasi untuk tampil di depan banyak orang.

SD Nasional 1 juga menyediakan kegiatan Ekstrakurikuler yang dapat mendukung murid-murid mengembangkan kemampuan dan bakat mereka. Semua kegiatan ekstra kurikuler sangat memperhatikan kemampuan individu berdasarkan teori *multiple intelegences* atau kemampuan jamak manusia. Dengan demikian SD Nasional 1 selalu memperhatikan dan mengapresiasi setiap kemampuan siswa yang tersembunyi untuk tumbuh dan berkembang. Dengan segala fasilitas dan system pembelajaran yang diberikan Nasional 1, para murid dapat mengembangkan diri, bakat dan kemampuan mereka sehingga banyak prestasi yang telah dihasilkan oleh para siswa-siswi Nasional 1.

<b>Jadwal Ekstrakurikuler dalam bidang seni</b>			
<b>Bidang Seni</b>	<b>Kelas</b>	<b>Hari</b>	<b>Jam</b>
Melukis	1 dan 2	Rabu	11.00 – 12.00
	3 s/d 6	Rabu	08.00 – 09.30
Paduan Suara	1 s/d 6	Sabtu	08.00 – 10.00

*Sedangkan seni tari dilaksanakan didalam Intrakurikuler.*

**Tabel 3. Jadwal Ekstrakurikuler**

Adapun hasil nyata dari pendidikan seni di kelas adalah terciptanya satu buah album paduan suara dan satu album lagu-lagu religi, dimana dalam pembuatan album religi ini melibatkan beberapa tokoh musik seperti A.T. Mahmud (Alm) dan Trie Utami sebagai pencipta lagu, serta Neno Warisman yang menyumbangkan dua buah lagu pada album paduan suara Religi tersebut.

### **5.1.3. Faktor Birokrasi**

Dari semua Kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam mengikuti lomba- lomba dan pembuatan cipta karya dari siswa Sekolah Dasar Nasional I ini, tak lepas dari dukungan Yayasan, Kepala sekolah, guru-guru dan Komite Sekolah. Kesemuanya membentuk suatu sinergi dalam menyatukan tujuan. Tanpa adanya hubungan yang baik dari pihak sekolah

dan orangtua murid, tidak akan terjadi prestasi-prestasi yang telah di capai selama ini. Karena untuk mengikuti festival paduan suara di tingkat Internasional sudah sangatlah jelas membutuhkan pendanaan yang sangat banyak.

Dalam hal ini kebijakan manajemen sekolah menjadi pondasi utama dalam mengimplementasikan seluruh program-program sekolah. Selama ini, pihak manajemen sekolah kerap memanfaatkan dana bantuan Pemerintah berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendanaan kegiatan, ditambah lagi dengan kebijakan sekolah melibatkan pihak luar seperti sponsorship dan jaringan komite sekolah beserta orang tua murid.

Dalam konteks pengembangan metodologi kurikulum seni budaya keterampilan merujuk pada standar KSTP dan standar operasional prosedur internal sekolah yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Kebijakan pihak manajemen dalam pengembangan kurikulum seni budaya keterampilan ini mengingat minimnya proses pemantauan. Pembinaan dan pengawasan mutu dari pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang selama ini hanya sebatas memberikan apresiasi dan informasi lomba-lomba seni budaya saja tanpa memberikan pembinaan dan pengawasan berjalannya kurikulum pembelajaran di sekolah.

Pihak manajemen Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat tentunya tidak hanya bergantung pada peran aktif Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Oleh karenanya, kebijakan birokrasi yang diambil yaitu memberdayakan potensi lokal yang ada ditunjang oleh peran komite sekolah dan komitmen guru-guru seni budaya keterampilan untuk terus melakukan inovasi pembelajaran yang lebih kreatif dan tetap mengacu pada standar kurikulum Pendidikan Nasional. Beberapa kejuaraan yang telah di raih oleh Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi, Jawa Barat, diantaranya adalah :

2011 Gold Diploma Level 1, Kategori Children's Choirs, 1<sup>ST</sup> Vietnam International Choir Festival and Competition 2011, Interkultur Foundation, Hoi-An, Vietnam.

- 2011 Mendapatkan Piagam penghargaan Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) Pendukung Paduan Suara Secara Marathon Terlama.
- 2010 Juara pertama Lomba Paduan Suara Anak Sekolah Dasar “Ayo Menyanyi”, Kompas Gramedia.
- 2009 Juara I solo gitar, pada acara Glory Musik Festival, Sekolah Global Mandiri.
- 2007 Juara I Lomba Paduan Suara Tingkat Sekolah Dasar, pada acara Islamic Book Fair ke 6.
- 2006 Juara 1 Bermain Pianika Tingkat Provinsi Jawa Barat.
- 2006 Juara 2 Bermain Pianika Tingkat Nasional.
- 2006 Juara I Lomba Paduan Suara SD se-Jawa Barat
- 2006 Juara I Lomba Paduan Suara SD tingkat Nasional
- 2006 Juara III Vocal Group Kategori Anak-anak, Festival Indomaret ke 5
- 2005 Penampilan Bersama Twillite Children dan Twillite Youth Orchestra di Balai Sarbini.
- 2004 Diliput oleh NHK TV Jepang untuk pembelajaran seni musik.
- 2004 Musikalisasi Puisi bersama Sapardi Djoko Damono di TIM.
- 2003 Merilis Album ke II (Religi) Featuring Neno Warisman dan pencipta lagu (Alm) A.T. Mahmud dan Trie Utami.
- 2000 Merilis Album I (Konfigurasi) lagu wajib Nasional dan lagu Anak-anak di edarkan dilingkungan Lembaga Pendidikan Nasional I.
- 2000 Juara II Lomba Tari Kreasi Tingkat Sekolah Dasar, Hardiknas, Kotamadya Bekasi.
- 1997 Juara I – IV Lomba menyanyi Solo Tingkat Sekolah Dasar Dalam rangka Hardiknas Kabupaten Dati II Bekasi.  
Juara Favorit Tingkat Nasional lomba mewarnai dan melukis 50 tahun Merdeka.
- 1995 Juara II Pada Lomba Vokal Group Islami Tingkat SD “ Serunai Idul Adha”, Indosiar

1994 Juara I dan II pada Lomba Paduan Suara Tingkat SD, penyelenggara Toko Buku Gunung Agung

#### **5.1.4. Faktor Disposisi**

Proses pembelajaran mata pelajaran Seni Budaya Keterampilan di Sekolah Dasar Nasional I memiliki konsep pendekatan kekeluargaan sebagai sebuah metodologi pembelajaran yang persuasif. Yaitu kedua guru seni musik di panggil dengan panggilan Kakak, bukan panggilan pak atau bu guru pada umumnya. Hal ini mungkin terlihat kecil dan sepele, tapi dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya interaksi kedekatan hubungan antara guru dengan murid. Meskipun pendekatan seperti ini belumlah sepenuhnya terimplementasi pada guru Seni Budaya Keterampilan didalam mata pelajaran seni rupa dan seni tari. Kak C (panggilan untuk kak Charles) dan Kak Wina yang merupakan guru seni musik. Selama proses pembelajaran seni musik, kedua guru tersebut tidak pernah memaksakan seorang siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi mengajar dengan menggunakan hati, pendekatan yang dilakukan benar-benar pendekatan seperti halnya kakak dengan adik, konsep pembelajaran seperti ini terimplementasi dengan baik, dan dikenal dengan konsep Kakak Adik Asuh (Kadiksuh).

Konsep Kadiksuh ini mendorong terciptanya suasana keakraban dan kenyamanan siswa dalam belajar dan berlatih seni musik. Hingga akhirnya terciptalah suasana proses belajar yang menyenangkan. Metodologi pembelajaran Kadiksuh ini berdampak pada timbulnya nuansa yang sangat mendukung. Tidak ada satupun siswa yang berbuat gaduh di dalam kelas ketika guru seni musik menyampaikan materi. Semua siswa mengikuti dengan serius, santai dan terkadang di selipkan gurauan untuk lebih menghangatkan suasana.

Totalitas mengajar dalam implementasi konsep pembelajaran yang diterapkan oleh kedua guru seni musik terlihat demikian kental. Hal ini nampak dalam pemberian materi ketika mengajar paduan suara. Transfer

keilmuan dan pengalaman seperti teknik-teknik vokalisasi yang di dapat dari pengalamannya mengikuti paduan suara Nasional dan Internasional selalu di berikan kepada siswa. Waktu pelajaran yang diberikan untuk siswa pada saat di luar jam mengajar juga sangat tidak terbatas. Jika terdapat siswa yang ingin lebih mendalami dan berlatih di luar jam pelajaran, guru seni musik selalu meluangkan waktunya. Terjadi suatu hal yang cukup menarik dimana ada usaha yang dilakukan oleh guru pada saat dirasa 2 jam mengajar terlalu sedikit *“Bagaimana target pencapaian yang dilakukan oleh guru-guru seni budaya keterampilan, mengingat keterbatasan jam pelajaran, materi kurikulum yang padat? Minimal harus mencapai target produk seni (bisa berupa pertunjukkan/karya seni) dan menyediakan waktu luang di luar jam pelajaran.”* Lalu ditambahkan lagi pertanyaan yang terkait dengan punishment and reward sumber mengatakan *“Ada, namun belum maksimal. Belum ada standarisasi penilaian prestasi guru-guru secara terukur”*. Artinya sudah ada penghargaan untuk guru yang berprestasi, walaupun nilainya masih belum terlalu besar, tetapi sudah dirasakan cukup oleh para guru.

Sisi lain, terlihat sikap dan toleransi yang tinggi dari guru seni musik, selama proses pembelajaran baik di waktu jam pelajaran ataupun di luar jam pelajaran selalu mengedepankan keramahan dan kenyamanan bagi siswa. Tak ada kata-kata marah kepada siswa yang memang belum sepenuhnya mengerti apa yang diajarkannya. Nuansa kekeluargaan dan kenyamanan belajar juga ditunjang oleh ruang musik yang sangat kondusif.

## **5.2. Gambaran Implementasi Kebijakan Di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat Yang Dilakukan Oleh Pihak Manajemen Sekolah**

Sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan dan sebagai sebuah sistem dapat menjalankan aktifitas secara baik dikarenakan unsur-unsur pendukungnya bekerja secara terpadu. Untuk mempertegas alur pengelolaan kebijakan di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat,

pihak manajemen sekolah mengurai berbagai inti implementasi kebijakan dari sisi pemetaan isu-isu pokok dari sebuah implementasi yaitu;

1. **What (Apa):** merupakan definisi terhadap isu-isu utama implementasi kebijakan.

Apa yang dapat digambarkan tentang sekolah yang baik dan berprestasi? Yaitu ” *Sekolah yang memiliki standarisasi kurikulum yang komprehensif, terencana dan terukur dengan mengacu pada standar kurikulum secara berjenjang yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong terciptanya sekolah yang berprestasi*”.

Pada konteks definisi di atas dapat dielaborasi bahwa manajemen sekolah harus memiliki kebijakan-kebijakan yang secara simultan saling terkait satu sama lain untuk mewujudkan kerangka idealisasi menuju sekolah yang berkualitas.

Pihak manajemen Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat membaginya ke dalam beberapa poin kebijakan yaitu; (1) Sistem pembelajaran dan pengajaran kurikulum yang mengacu pada kaidah **PAIKEM** (*Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan*), (2) Guru-guru kurikulum yang memiliki latar belakang disiplin ilmu yang sesuai dengan bidang studinya, (3) Fasilitas sarana prasarana pendukung dan sumberdaya lain yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran, (4) Interaksi personal dan komunikasi yang terjalin baik kepada internal sekolah maupun eksternal sekolah.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh salah satu guru SBK kelas rendah, beliau mengatakan bahwa : ”*Pihak manajemen, guru-guru selalu menerapkan standar operasional prosedur pembelajaran sesuai dengan standar KSTP yang berlaku, ditambah*

*lagi standar operasional prosedur yang telah kami buat dan sepakati. Dalam penerapan kurikulum pembelajaran, guru-guru diberikan keluasaan dalam berinovasi, terpenting tujuan akhirnya tercapai bagaimanapun caranya. Biasanya, guru-guru menerapkan metodologi pembelajaran melalui sentuhan-sentuhan kreatifitas yang diselaraskan dengan karakter dan tipologi sekolah dan siswa didik. Dan metode ini dilakukan terus secara berkesinambungan”*

2. **When (kapan):** merupakan identifikasi terhadap akar persoalan isu-isu utama.

Kapan sekolah tersebut sudah tidak lagi bisa dikatakan sekolah yang tidak berkualitas dan tidak berprestasi lagi? Yaitu ketika; (1) Sistem pengelolaan manajemen sekolah tidak lagi berorientasi pada semangat kebersamaan, kehilangan arah tujuan akhir yang hendak di capai dan cenderung terjadinya penyimpangan kebijakan yang disebabkan oleh ketidakdisiplinan seluruh elemen manajemen sekolah untuk mengawal proses tujuan akhir manajemen, (2) Terjadinya konflik internal yang berkepanjangan diantara pendidik yang mengakibatkan perpecahan konsep “satu untuk semua”, (3) Tekanan-tekanan baik dari pihak luar dan internal dalam konteks kewenangan, sikap arogansi dan ketidakpatuhan atas kebijakan dan inkonsistensi dalam komitmen.”*Ada, namun belum maksimal. Belum ada standarisasi penilaian prestasi guru-guru secara terukur.* Belum adanya standarisasi penilaian kinerja dikhawatirkan akan berpengaruh pada sikap arogansi dan ketidakpatuhan atas kebijakan dan inkonsistensi dalam komitmen

3. **Why (mengapa)** – Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persoalan isu-isu utama.

Bagaimana kondisi ketidakberdayaan sekolah terjadi? Yaitu terjadi karena; (1) Faktor komunikasi, koordinasi, komitmen dan

tanggungjawab seluruh instrumen sekolah sudah keluar dari kesepakatan yang telah disepakati bersama, (2) Bisa jadi faktor struktur birokrasi yang memberikan ruang terjadinya silang pendapat, silang kewenangan, silang kebijakan dan perpecahan antar unit birokrasi, (3) Kurangnya jalinan interaksi secara personal dan tidak adanya penilaian secara terukur atas kinerja masing-masing instrumen sekolah atas kontribusi yang telah diberikan kepada sekolah, sehingga terjadinya kecemburuan sosial yang tinggi antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan hubungan antar pelaksana kebijakan yang satu dengan lainnya. Ada sedikit terjadi gap di antara guru hal ini terkait dengan insentif yang di terima ada sebagian yang menerima reward dan ada yang tidak seperti hasil wawancara dibawah ini ” *Bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam menilai prestasi anda sebagai guru seni budaya keterampilan? Adakah penerapan penilaian reward dan punishment? Belum ada*”

4. **Where (dimana), Who (siapa)** – Identifikasi lokasi terjadinya persoalan dan siapa yang dominan memunculkan persoalan isu-isu utama. Ada beragam jawaban dari pertanyaan ini, bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam menilai *prestasi anda sebagai guru seni budaya keterampilan? Adakah penerapan penilaian reward dan punishment? Ada yang menjawab tidak ada, Belum sepenuhnya hanya supervisi secara rutin saja, Baru sebatas supervisi kepada guru-guru, dan Ada, namun belum maksimal.* Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan sekolah dalam menerapkan punishment dan reward, sehingga di khawatirkan akan terjadi gap antara guru yang berprestasi dengan guru yang tidak berprestasi.
5. **How (bagaimana)** – Identifikasi solusi yang harus dilakukan untuk mengurai akar persoalan dan mencari titik pemecahan masalah tersebut.

Sebagaimana yang dituturkan oleh **Dwi Maria Handayani, SP. Kepala Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat** sebagai berikut:

*”Konsep implementasi kebijakan di sekolah kami selalu berorientasi pada pendekatan persoalan (problematical approach) dan bukan pada pendekatan individu (individual approach). Hal ini kami lakukan agar seluruh elemen kebijakan tidak mengarah kepada siapa pembuat kebijakan dan harus pembuat kebijakan yang menentukan arah tujuan kebijakan sekolah. Intinya, semua elemen harus berfungsi sebagaimana besaran peran yang bisa dilakukan, maka dari itu kami memandang pendekatan sederhana 5W1H namun tajam pada titik-titik persoalan, bisa diaplikasikan kepada semua instrumen pelaksana kebijakan”.*

### **5.3. Gambaran Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Sekolah Dasar Nasional 1, Bekasi Jawa Barat Dalam Mendorong Terselenggaranya Konsep Kebijakan Kurikulum Seni Budaya Dan Keterampilan**

Menilik dari konsepsi induk implementasi kebijakan yang dicanangkan pihak manajemen sekolah, maka peneliti mengambil beberapa rumusan strategis dari perencanaan pengelolaan Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat, khususnya perencanaan peningkatan kurikulum seni budaya keterampilan untuk mendorong terciptanya prestasi siswa. Konsepsi rumusan ini telah dilaksanakan dan menuaikan keberhasilan yang cukup signifikan. Ini tergambar dari hasil prestasi Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat menorehkan hasil yang cukup fantastis yaitu selalu menjuarai lomba-lomba seni khususnya seni musik, baik untuk tingkat Kecamatan, Kotamadya. Provinsi dan Nasional. Kini Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat akan berkiprah sampai ke luar negeri.

Peneliti membuat rumusan dari hasil proses wawancara dan observasi terhadap guru-guru yang membidangi seni budaya dan

keterampilan. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti mencoba memberikan deskripsi rumusan dari pengamatan dan uraian kepala sekolah dan guru-guru seni budaya keterampilan Sekolah Dasar Nasional 1 Jawa Barat dalam kerangka strategi peningkatan mutu kurikulum seni budaya keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat sebagai berikut;

1. Merumuskan langkah-langkah strategis dalam mempertajam metodologi pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif serta sesuai dengan kapasitas dan kemampuan siswa dalam menyerap kurikulum dengan baik. Seperti yang dikatakan Dwi Maria, *bahwa "Sisi lain, proses pembelajaran Nassa menggunakan metode sesuai dengan kurikulum yang menetapkan active learning dan metode problem solving Untuk dapat mengembangkan karakter building, leadership dan kemandirian bagi para siswa. Nassa secara berkesinambungan berperan sebagai pusat pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator dan mediator didalam pembelajaran. Salah satu program yang diunggulkan adalah program kakak adik asuh (Kadikusuh) yang dapat mengajarkan dan mengembangkan sikap leadership dan tanggung jawab setiap siswa. Sikap mengajar guru-guru kepada siswa menjadi penting. Semuanya berorientasi pada memberikan kenyamanan, kesenangan dan perhatian kepada siswa agar materi belajar bukanlah sesuatu yang menakutkan dan keterpaksaan tapi menjadi sebuah kebutuhan bagi siswa"*
2. Membuka ruang interaksi yang lebih luas bagi peningkatan kapasitas, kapabilitas dan kinerja profesional guru-guru bidang studi seni budaya keterampilan. Hal ini tersirat dari pernyataan guru yang mengatakan, *"Kurikulum yang ada saat ini tak akan banyak berarti, ketika peranaktif serta talenta guru-guru seni budaya keterampilan tidak mengerti, memahami, menginterpretasikan dan mengimplementasikannya secara baik. Kami memandang bahwa bicara penerapan kurikulum terkait secara holistik dan berkesinambungan dengan kemampuan guru-*

*guru. Kami berenam, guru SBK selalu mengadakan workshop kecil-kecilan sebagai simulasi penerapan kurikulum SBK, dengan tujuan agar apa yang akan kami terapkan dapat diterima secara baik oleh siswa. Akhirnya, dari hasil simulasi yang kami lakukan, kami selalu menemukan formula efektif metodologi pengajaran, namun tetap tidak bergeser dari inti kurikulum yang di buat oleh Pemerintah. Dan pihak manajemen sangat mendukung langkah kami ini. Proses komunikasi kami dengan komite sekolahpun selalu terjalin, khususnya untuk peningkatan mutu pembelajaran seni”*

3. Membangun hirarki komunikasi dan koordinasi yang tersistem dengan baik yang disertai dengan komitmen dan konsistensi terhadap mutu pembelajaran di sekolah. Sudah dilaksanakan diantara guru dengan melakukan KKG, hal ini terlihat dari jawaban *Bagaimana cara anda beserta guru-guru seni budaya keterampilan lainnya melakukan diskusi-diskusi kurikulum seni budaya keterampilan? Melalui forum Kelompok Kerja Guru (KKG) yang selalu kami adakan tiap semester.*
4. Melakukan kajian analisis tingkat keberhasilan prestasi siswa yang diselaraskan dengan tingkat kemampuan dan daya serap siswa dalam menerima kurikulum pembelajaran seni budaya keterampilan. *”Kami selalu melakukan koordinasi secara kontinyu dengan cara memonitoring persiapan, pelaksanaan mata pelajaran SBK di sekolah, dan kami selalu memberikan arahan-arahan agar mata pelajaran SBK disekolah semakin baik dan terus menorehkan prestasi bagi sekolah.”*

#### **5.4. Gambaran Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kurikulum Seni Budaya Keterampilan Di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat.**

##### **5.4.1. Komunikasi**

Agar implementasi dapat berjalan dengan efektif, mereka yang mengimplementasikan program perlu mengetahui apa yang harus mereka

lakukan. Perintah dalam atau untuk mengimplementasikan program harus sampai pada orang yang tepat sebelum kemudian dapat diikuti, dan penyampaian informasi ini harus jelas, akurat, dan konsisten untuk menghindari kesalahpahaman (Edwards III, 1980;10).

Proses komunikasi yang dilakukan merupakan bentuk dari efektifitas sebuah implementasi kebijakan. Pelaksana implementasi kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Keputusan sebuah kebijakan dan perintah pelaksanaan harus secara jelas dan tegas diterima secara baik. Komunikasi yang akurat diperlukan dan dapat diterima dengan akurat pula oleh pelaksana. Jika tidak, tentunya ini menjadi hambatan yang cukup potensial merusak proses implementasi kebijakan secara menyeluruh di tiap lini. Informasi yang kurang, akan menyebabkan keragu-raguan dan pasti membingungkan pelaksana implementasi. Kebingungan ini akan berakibat pada perbedaan implementasi kebijakan yang dilakukan dan keinginan dari atasannya.

Apa yang dipaparkan George Edwards III diatas yang menjadi perhatian khusus manajemen Sekolah dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat untuk mereduksi terjadinya gesekan komunikasi antar lini birokrasi manajemen sekolah. Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pihak manajemen sekolah tak mau mengambil resiko atas lemahnya jalur komunikasi dan koordinasi yang bisa menjadi duri yang justru menghancurkan lini organisasi secara permamen. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan mengurai secara rinci titik-titik hambatan dengan melakukan pendekatan terhadap persoalan yang ada dan bukan melakukan pendekatan secara individu dalam penyampaian dan penyebaran informasi kebijakan.

Adapun isu-isu terkait yang dikembangkan oleh pihak manajemen sekolah dalam perspektif komunikasi antar lini yaitu;

1. Mekanisme lintas koordinasi atas implementasi kebijakan

2. Pemahaman implementasi kebijakan pada semua lini organisasi secara struktural
3. Kepercayaan, tanggungjawab dan konsistensi terhadap implementasi kebijakan.

Dari hasil analisis yang diolah peneliti dari hasil wawancara, angket dan observasi terhadap kondisi lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam perspektif komunikasi yaitu;

1. Hirarki komunikasi dan koordinasi antar lini organisasi antara pengambil kebijakan (kepala sekolah) dan pelaksana kebijakan (guru-guru dan staf) terstruktur secara rapi dan terencana. Hal ini terlihat dari proses pembuatan silabus kurikulum seni budaya keterampilan yang selalu melibatkan pengambil kebijakan. *”Konsep implementasi kebijakan di sekolah kami selalu berorientasi pada pendekatan persoalan (problematical approach) dan bukan pada pendekatan individu (individual approach). Hal ini kami lakukan agar seluruh elemen kebijakan tidak mengarah kepada siapa pembuat kebijakan dan harus pembuat kebijakan yang menentukan arah tujuan kebijakan sekolah. Intinya, semua elemen harus berfungsi sebagaimana besaran peran yang bisa dilakukan, maka dari itu kami memandang pendekatan sederhana 5W1H namun tajam pada titik-titik persoalan, bisa diaplikasikan kepada semua intrumen pelaksana kebijakan. Langkah-langkah ini yang kami ambil untuk melakukan koordinasi secara rutin dengan seluruh intrumen sekolah”*.
2. Kebebasan berapresiasi yang diberikan oleh pengambil kebijakan (kepala sekolah), menunjang terciptanya suasana kenyamanan dan konsistensi, serta memiliki tanggungjawab moral untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi siswa dalam pendidikan seni, khususnya seni musik. *“Bagaimana cara anda melakukan pendekatan pembelajaran kurikulum kepada siswa? Melalui inovasi-*

*inovasi yang mendukung dan menunjang keberhasilan pencapaian target”*

3. Hambatan juga dialami oleh pihak manajemen sekolah dan pelaksana kebijakan yaitu kurangnya pengawasan dan koordinasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam memantau perkembangan implementasi kurikulum seni budaya keterampilan secara berkala. *”Dinas Pendidikan Kota Bekasi hanya memberikan informasi seputar kegiatan-kegiatan pendukung seperti lomba seni baik tingkat Kecamatan, Kotamadya dan Nasional. Peran Dinas Pendidikan Kota Bekasi sangat kurang melakukan peranaktifnya, khususnya dalam konteks pengawasan dan pembinaan kepada kami. Paling selama ini yang dilakukan hanya memberikan informasi tentang adanya lomba paduan suara saja, selebihnya yah biasa-biasa saja. Tapi kami selalu kok memberikan laporan rutin ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi”*.

#### **5.4.2. Sumberdaya**

Jika orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan kekurangan sumber daya untuk bekerja efektif, maka implementasi tidak akan efektif. Sumber daya yang penting meliputi: jumlah staf yang memadai dan dengan keahlian yang diperlukan; informasi yang relevan dan memadai tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan dan kepatuhan pihak lain yang terlibat dalam implementasi; wewenang untuk menjamin bahwa kebijakan-kebijakan dijalankan sesuai tujuan; dan fasilitas (meliputi gedung, peralatan, tanah dan suplai) untuk menyediakan jasa (Edwards III:1980).

Meski perintah-perintah implementasi disampaikan secara akurat, jelas, dan konsisten, tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan, implementasi tidak akan efektif. Dalam perspektif yang diuraikan George Edwards ini, manajemen Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat juga melakukan sebuah tindakan

implementasi yang diyakini memiliki benang merah yang jelas atas keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakannya.

Adapun isu-isu terkait yang dikembangkan oleh pihak manajemen sekolah dalam perspektif sumberdaya yaitu;

1. Tatalaksana potensi sumberdaya seluruh komponen sekolah baik guru, staf, informasi, wewenang, pendanaan program dan fasilitas pendukung lainnya.
2. Komitmen dan dukungan seluruh komponen sumberdaya terhadap implementasi kebijakan.

Dari hasil analisis yang diolah peneliti dari hasil wawancara, angket dan observasi terhadap kondisi lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam perspektif sumberdaya yaitu;

1. Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat memiliki potensi sebagai sekolah yang unggul dalam bidang seni. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh kinerja manajemen beserta sumberdaya lainnya dalam upaya peningkatan prestasi sekolah dalam bidang seni. Hal ini tercakup dalam pernyataan ” Saat ini kami memiliki 6 orang guru yang terdiri atas; 2 orang guru seni musik, 1 orang guru seni tari, 1 orang guru seni rupa dan 2 orang guru unruk SBK Kelas Rendah”
2. Tingginya komitmen pihak manajemen sekolah dan sumberdaya pendukung dalam memberikan kewenangan, informasi dan juga disokong oleh fasilitas pendanaan program untuk menunjang terlaksananya berbagai kegiatan kurikulum dan aktifitas penunjang prestasi siswa. Hal ini disampaikan oleh kepala sekolah, ” Kami menyediakan ruang musik dengan seluruh perlengkapannya. Dan juga menyediakan guru tari, guru musik. Guru lukis dan lainnya, sesuai dengan kebutuhan pelajaran SBK” dan “Siswa diikutsertakan dalam lomba yang berkaitan dengan seni musik, seni tari, seni lukis. Dan siswa kami juga selalu tampil unjuk kebolehan

dan kemampuannya dalam ajang kreatifitas siswa yang selalu kami lakukan di sekolah.” Adapun dana bukan hanya dari sekolah saja tetapi ada kerjasama dengan komite sekolah “Sejauh ini sangat mendukung sekali. Kami selalu berbincang dari hati ke hati dengan orang tua murid dalam hal kegiatan-kegiatan sekolah yang notabeneanya adalah kegiatan sekolah. Karena kami tidak akan berarti apa-apa jika orangtua murid dan komite sekolah hanya berpangkutangan saja tanpa ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah.”

3. Kemampuan akademik guru-guru bidang studi seni budaya keterampilan cukup memadai dan sesuai latar belakang disiplin ilmu, ditambah dengan kemampuan personal guru-guru yang memiliki daya kreatifitas yang tinggi, ikut mendorong terbentuknya sebuah tim tangguh dalam implementasi kurikulum seni budaya keterampilan. Meskipun, kesempatan mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan yang didapat dari manajemen dirasa masih kurang, tapi hal tersebut dapat ditanggulangi dengan semangat kebersamaan yang tinggi. Walaupun kemampuan dan SDM di sekolah sudah cukup baik tapi selalu dilaksanakan KKG untuk meningkatkan kemampuan guru ” Melalui forum Kelompok Kerja Guru (KKG) yang selalu kami adakan tiap semester
4. Hambatan yang dialami dari sisi sumberdaya yaitu masih kurangnya beberapa alat pendukung kegiatan seni, khususnya seni musik tradisional yang diperuntukkan bagi peningkatan pengetahuan dan pengalaman siswa akan seni musik. *“Pihak sekolah menyediakan ruang music, ruang tari, audio visual, alat-alat musi dan alat-alat keterampilan”* hal ini masih dirasakan kurang karena beberapa alat sebagian sudah agak rusak.

### 5.4.3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan

bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Jika implementasi ingin berjalan efektif, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus berkeinginan untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program.

Dari paparan Edwards III;1980 diatas, manajemen Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat mendorong isu-isu terkait yang dikembangkan dalam perspektif disposisi kebijakan (sikap/karakter) yaitu;

1. Identifikasi persepsi sikap pengambil kebijakan terhadap implementasi kebijakan.
2. Identifikasi persepsi dan sikap kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan (manajemen sekolah).

Dari hasil analisis yang diolah peneliti dari hasil wawancara, angket dan observasi terhadap kondisi lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam perspektif disposisi kebijakan yaitu;

1. Komitmen dan kesepakatan proses pembelajaran berdasarkan kurikulum yang ada sesuai dengan target pencapaian masing-masing guru secara konsisten dan tertuang dalam kerangka kinerja masing-masing guru.

2. Komitmen pimpinan sekolah yang menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana kebijakan sesuai kemampuannya (*right man on the right place*) serta dukungan pendanaan program dan penunjang totalitas dalam bekerja.
3. Melalui program unggulan kakak adik asuh (kadikusuh), setiap guru-guru seni budaya keterampilan berupaya memberikan apresiasi yang baik kepada siswa. Implementasi sikap yang lebih mengambil peran sebagai kakak dalam kegiatan pembelajaran, tentunya akan memberikan kenyamanan bagi siswa dalam belajar dan mendorong siswa lebih kreatif, sehingga belajar seni budaya keterampilan bukanlah sesuatu keterpaksaan, tapi sudah menjadi kegiatan belajar yang menyenangkan.
4. Hambatan yang dialami dari sisi disposisi kebijakan yaitu Penilaian kinerja belum menerapkan penilaian terukur atas kontribusi sumberdaya masing-masing guru dan masih dominan dan mengacu pada azas kepercayaan dan kesepakatan.
5. Kekhawatiran terjadinya kecemburuan sosial dan sikap tidak peduli yang diakibatkan belum terlaksananya pengukuran kinerja secara terukur oleh pihak manajemen sekolah, bisa menjadi pemicu yang cukup signifikan.

#### **5.4.4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Perubahan yang

dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Implementasi dapat terganggu akibat kekurangan dalam struktur birokratik. Perpecahan organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan yang rumit yang membutuhkan kerjasama banyak orang, dan juga dapat menghabiskan sumber daya yang terbatas, menghambat perubahan, menciptakan kekacauan, mengarah pada kebijakan yang bekerja pada tujuan yang bersilangan, dan mengabaikan fungsi-fungsi yang penting. (Edwards III:1980).

Dari uraian diatas, manajemen Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat mendorong isu-isu terkait yang dikembangkan dalam perspektif struktur birokrasi yaitu;

1. Pengelolaan Standar Operasional Prosedur (SOP) implementasi kebijakan yang diseleraskan dengan standar KSTP.
2. Identifikasi hal-hal yang mempengaruhi signifikansi implementasi kebijakan dalam meminimalisir terjadinya perpecahan (fragmentasi) antar unit birokrasi.

Dari hasil analisis yang diolah peneliti dari hasil wawancara, angket dan observasi terhadap kondisi lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam perspektif disposisi kebijakan yaitu;

1. Penekanan berjalannya Standar Operasional Prosedur (SOP) pembelajaran sesuai kurikulum yang telah disempurnakan dengan inovasi baru dan terintegrasi sesuai dengan kemampuan siswa.
2. Rapat koordinasi pemantapan silabus kurikulum pembelajaran secara rutin di lingkungan guru bidang studi SBK sesuai kaidah PAIKEM (*Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan*).

3. Hambatan yang dialami yaitu keterbatasan waktu pembelajaran sesuai kurikulum yang ada mengakibatkan sering terjadi ketidaksesuaian antara pemenuhan kurikulum dan target pencapaian kemampuan dan prestasi siswa meskipun sudah dilakukan inovasi-inovasi metodologi pembelajaran.

#### **5.5. Interaksi Antar Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kurikulum Seni Budaya Keterampilan Di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat.**

Selain pengaruh masing-masing faktor dalam implementasi kebijakan, interaksi dan keterkaitan antar faktor-faktor juga dianggap penting. Faktor-faktor komunikasi, sumber daya, karakter, dan struktur birokratik memiliki pengaruh langsung pada implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut secara tidak langsung juga mempengaruhi implementasi melalui dampak faktor-faktor tersebut satu sama lain. Dengan kata lain, komunikasi mempengaruhi sumber daya, karakter, dan struktur birokratik, yang pada akhirnya mempengaruhi implementasi yang digambarkannya secara menyeluruh atau terdapat kendala dalam implementasi tersebut. (George Edwards 1980:150).

Pandangan George Edwards tersebut selaras dengan gambaran kondisi yang terjadi di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat. Peneliti berpendapat bahwa jika analisis yang disajikan diurai lebih lanjut, maka kondisi implementasi program tergambar, bahwa adanya keterkaitan dan dampak faktor-faktor implementasi yang mengacu pada model interaksi faktor-faktor sebagaimana dikemukakan oleh Edward III. Berikut hasil analisis interaksi faktor-faktor implementasi kebijakan kurikulum seni budaya keterampilan yang terjadi di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat;

1. Faktor komunikasi, berdasar hasil penelitian, keberhasilan manajemen sekolah dalam menerapkan hirarki komunikasi dan koordinasi yang disertai kepercayaan dan tanggungjawab melalui penyebaran petunjuk

yang akurat, jelas dan konsisten, berhasil mereduksi kemungkinan perbedaan persepsi pelaksana implementasi kebijakan.

2. Faktor sumberdaya, berdasar hasil penelitian, sumberdaya yang dimiliki sekolah dapat dikatakan cukup baik dan memadai seperti pendidik yang telah sesuai dengan standarisasi akademik dan didukung oleh kemampuan kreatifitas personal yang cukup memadai. Realitas ini sangat mempengaruhi disposisi kebijakan dari sisi komitmen menjadikan prioritas kebijakan menjadi hal penting untuk menjawab tuntutan profesionalitas menciptakan siswa yang berprestasi pada skala kualitas mutu kurikulum dan pembelajaran. Ditambah lagi dengan sokongan fasilitas, informasi dan kewenangan yang terintegrasi, membuat hambatan implementasi dengan sendirinya tereliminasi. Meskipun ada beberapa kendala kecil dalam konteks pengadaan penambahan alat-alat pendukung dan masih terbatasnya upaya peningkatan kemampuan pendidik melalui pelatihan-pelatihan lanjutan terhadap peningkatan kualitas pendidik, tetapi masih bisa teratasi dengan adanya inovasi dan kerjasama diantara pendidik untuk bersama-sama saling membantu satu sama lain.
3. Faktor Disposisi, berdasar hasil penelitian, terbentuknya komitmen dan kesepakatan pada proses pembelajaran berdasarkan kurikulum yang ada sesuai dengan target pencapaian masing-masing pendidik secara konsisten dan tertuang dalam kerangka kinerja masing-masing pendidikan. Ditambah lagi dengan komitmen pimpinan sekolah yang menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana kebijakan sesuai kemampuannya (*right man on the right place*), program unggulan kakak adik asuh (Kadiksuh) serta dukungan pendanaan program dan penunjang totalitas dalam bekerja, menjadi faktor penting terselenggaranya implementasi. Sedikit persoalan yang terkait kekhawatiran kemungkinan terjadinya kecemburuan sosial dan sikap tidak peduli yang diakibatkan belum terlaksananya pengukuran kinerja secara terukur oleh pihak manajemen sekolah dapat menimbulkan respon negatif, jika tidak segera dibuat standarisasi

pengukuran kontribusi SDM. Berdasarkan informasi yang di dapat, kini pihak manajemen sekolah sudah dalam tahap penyelesaian akhir pembuatan instrumen penilaian kontribusi SDM tersebut.

4. Faktor struktur birokrasi, berdasar hasil penelitian, persoalan mendasar yang terjadi justru terdapat pada pihak-pihak eksternal yaitu Kurangnya pengawasan dan koordinasi secara rutin dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam memantau perkembangan implementasi kurikulum seni budaya keterampilan secara berkala yang dikaitkan dengan kesesuaian kurikulum dengan muatan lokal yang berorientasi pada kemampuan dan prestasi siswa. Kondisi ini akan mempengaruhi disposisi dan komunikasi yang akan berdampak pada terjadinya ketidaksesuaian program penyelenggaraan kurikulum sebagaimana yang telah ditetapkan, dengan apa yang menjadi implementasi kebijakan yang dijalankan oleh pihak sekolah. Oleh karena itu, pihak sekolah selalu memberikan penekanan pada tatalaksana Standar Operasional Prosedur pembelajaran sesuai kurikulum yang telah disempurnakan dengan inovasi baru dan terintegrasi sesuai dengan kemampuan peserta didik, serta selalu mengadakan rapat koordinasi pemantapan silabus kurikulum pembelajaran secara rutin di lingkungan guru bidang studi seni budaya keterampilan sesuai kaidah PAIKEM. Tujuan yang hendak dicapai yaitu meminimalisir terjadinya stagnasi pembelajaran akibat kurangnya peran Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam memberikan arahan terhadap peningkatan mutu kurikulum

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Dengan memperhatikan semua uraian pada bab-bab sebelumnya. Maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program kebijakan kurikulum seni budaya keterampilan yang dilaksanakan oleh Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat bisa dikatakan berhasil menciptakan sebuah standarisasi kurikulum yang dapat meningkatkan prestasi sekolah dalam bidang seni, khususnya seni musik. Hal ini terlihat dari torehan prestasi yang berhasil dicapai Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat dalam berbagai even-even lomba seni baik di tingkat Kecamatan, Kotamadya, Provinsi, Nasional dan Internasional. Dan ini bisa menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah dasar di Indonesia.
2. Faktor-faktor yang dipertimbangkan mempengaruhi implementasi adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa proses komunikasi, koordinasi, komitmen, tanggungjawab yang dilakukan secara terstruktur dan tersebar secara akurat, jelas dan konsisten akan mereduksi berbagai kendala yang mungkin terjadi pada tataran pemahaman, persepsi, kompetensi dan komitmen kepala sekolah, guru dan pihak manajemen sekolah lainnya yang terlibat dalam implementasi kebijakan secara menyeluruh khususnya implementasi kurikulum seni budaya keterampilan.
3. Interaksi antar faktor-faktor implementasi kebijakan kurikulum yang diterapkan di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat sebagaimana tergambar pada pembahasan analisis interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kurikulum seni budaya keterampilan, telah selaras dengan indikator yang hendak dicapai pada sisi persepsi, pemahaman, koordinasi dan konsistensi atas

implementasi kebijakan. Potensi sumberdaya yang ada telah berhasil menterjemahkan alur implementasi kebijakan secara akurat, tegas dan konsisten, serta terjadinya fungsi pengawasan yang baik. Program-program yang dikembangkan di sekolah ini seperti kakak adik asuh (kadiksuh), Green Zone, Gita Swara Nasional 1, dan Aksi (Ajang Kreativitas dan Seni), telah berhasil menurunkan zona 'ketidakpedulian' pelaksana kebijakan atas kesepakatan implementasi kebijakan. Respon internal terhadap sistem tatalaksana kebijakan yang dikaitkan dengan keterbatasan waktu, sumberdaya pelaksana dan keinginan keseragaman dalam implementasi operasional prosedur telah selaras dengan kaidah PAIKEM. Dan ini dapat meminimalisir kurangnya pengawasan eksternal dari pejabat terkait yaitu Dinas Pendidikan Kota Bekasi perihal penerapan kurikulum seni budaya keterampilan.

## **6.2. Saran**

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang terkait dengan implementasi kebijakan kurikulum seni budaya keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat atau untuk pelaksanaan penelitian berikutnya adalah sebagai berikut;

1. Pihak manajemen sekolah, khususnya pengambil kebijakan tertinggi yaitu kepala sekolah, dan pelaksana kebijakan yaitu guru dan pihak lain yang terlibat seperti staf administrasi sekolah dan komite sekolah agar tetap menjaga keharmonisan dalam menjalankan sistem pengelolaan manajemen yang telah dibuat dengan tetap mengacu pada pendekatan persoalan dan bukan pendekatan personal. Sistem tersebut haruslah bersifat dinamis sesuai kondisi kekinian problematika yang berkembang. Sehingga siapapun yang mengelola manajemen sekolah tetap hirarki pengambilan keputusan atas implementasi kebijakan mengacu kepada sistem yang ada.
2. Mendorong terjadinya interaksi rutin dan lebih intensif antara pengelola sekolah dan pelaksana sekolah dengan pemangku jabatan

(Dinas Pendidikan Kota Bekasi) dalam konteks eksplorasi peningkatan mutu kurikulum seni budaya keterampilan.

3. Berupaya mencari celah pendanaan untuk pengadaan alat-alat musik tambahan melalui penganggaran bertahap dari berbagai sumber-sumber pendanaan potensial yang memungkinkan untuk direalisasikan. Perlunya memberikan ruang interaksi yang lebih baik kepada guru-guru bidang seni budaya keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan talenta seninya melalui workshop, pelatihan, seminar tingkat yang lebih tinggi lagi dan tidak hanya bersifat lokal.
4. Terimplementasikannya konsep sistem penilaian kinerja secara terukur untuk seluruh pelaksana kebijakan guna meminimalisir terjadi kecemburuan sosial atas kinerja masing-masing guru terhadap kontribusi dan prestasi. Penerapan punish dan reward dan berlaku untuk seluruh instrumen pelaksana kebijakan.
5. Menyampaikan dokumen resmi berupa rekomendasi yang disertai hasil inovasi-inovasi kurikulum yang diterapkan beserta prestasi yang telah ditorehkan siswa kepada pejabat berwenang pembuat kurikulum

## DAFTAR PUSTAKA

- Allison, G. & Zelikow, P. (1999). *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. 2nd edition. Pearson Longman.
- Amstrong, Thomas. (2002). *Setiap Anak Cerdas*, Jakarta:Gramedia.
- Anam, Saiful.(2006). *Sekolah Dasar Pergulatan Mengejar ketertinggalan*, Solo:Wangsa Jatra Lestari.
- Anderson, James E. (1984). *Public Policy Making*,CBS College Publishing
- Baedhowi. (2007). *Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Konsep Dasar dan Implementasi*. Semarang: UPT UNNES Press.
- Barrs, Kathie, (1994).*Musik Works*. Belair Publication Limited
- Bardach, Eugene (2000) *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*, Published by CQ Press
- Beauchamp, George A. (1975). *Curriculum Theory*. Wilmette, Illinois: The KAGG Press.
- Campbell, Don. (2001). *Efek Mozart, Memanfaatkan kekuatan musik untuk mempertajam Pikiran, Meningkatkan Kreativitas, dan Menyehatkan Tubuh*. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Campbell, Don. (2001). *Efek Mozart, Bagi Anak-anak*. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Caswell, H.L., & Caswell, D.S. (1935). *Curriculum development*. New York: American Book Company.
- Cheong Cheng, Yin. (1999). *School Effectiveness and School Management: a mechanism for development*. The Falmer Press
- Chinapah, Vinayagum. (1997). *Handbook on Monitoring Learning Achievement. Towards Capacity Building*, (Paris: Unesco)
- Doll, Ronald C. (1974) *Curriculum Improvement: Decision Making and Progress* Allyn & Bacon Inc.,U.S.; 3rd Revised edition edition (Oct 1974)
- Dunn, William N. (2004). *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey:Pearson Education. Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta:Gajah Mada University Press.

- Dunsire, Andrew. (1978). *Implementation in a Bureaucracy* Oxford: Martin Robertson & Co. Ltd., 1978
- Dye, Thomas R. (1978). *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, N.J: Engelwood Cliffs
- Edwards III, George C dan Sharkansky, Ira. (1978). *The Policy Predicament*, San Francisco: W.H. Freeman
- Edwards III, George C. (1980), *Implementing Public Policy*, United States of America: Congressional Quarterly Inc.
- Fuller, Cheri. (1994). *How To Grow A Young Musik Lover*, Harold shaw publisher, wheaten Illino
- Ginanjari, Ary. (2008). *Rahasia membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual (ESQ)*, Arga Publishing, Jakarta.
- Goertz, Margaret E. (2001). *The Finance of American Public Education: Challenges of Equity, Adequacy, and Efficiency*, dalam Gregory J Cizek, ed, *Handbook of Educational Policy*.
- Grindle, Merilee S. (1980), *Political Theory and Policy Implementation in the Third World*, NJ: Princeton University Press.
- Hamalik Oemar. (2007). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta ; Bumi Aksara
- Harris, Alma and Nigel Bennet, (2001). *School effectiveness and school improvement*. Continuum London
- Hogwood, Brian W. dan Lewis A. Gunn, (1978). *Policy Analysis for the Real World*, Oxford University Press, Oxford,
- H. Abubakar Badjuri dan Teguh Yuwono (2002), "*Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*", JIP FISIP Universitas Diponegoro, Semarang
- Irawan, Prasetya. (2000). *Logika dan Prosedure Penelitian*. STIA LAN
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. DIA FISIP UI. Jakarta
- Mulyasa, E. (2003). *Kurikulum Berbasis Kompetensi. Konsep, Karakteristik dan Implementasi*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Sebuah Panduan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

- Mulyasa, E. (2007). *Menjadi guru yang Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Mustopadidjaja, A.R.(1992).Studi Kebijakan, Perkembangan dan Penerapannya dalam rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan. Jakarta:LP-FEUI
- Mustopadidjaja, A.R. (2002). Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kerja, Jakarta.LAN
- Departemen Pendidikan Nasional.(2007). Teropong Pendidikan Kita (Antologi Artikel 2006-2007). Pusat Informasi dan Humas
- KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dasar Pemahaman dan Pengembangan Pedoman Bagi Pengelola Lembaga Pendidikan, Pengawas Sekolah, kepala Sekolah, Komite Sekolah, Dewan Sekolah, dan Guru. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nakamura, Robert T., et.al. (2002). *The Politics of Policy Implementation*. USA:ST.Martin's Press.
- Nasution, S. (1999). *Pembaharuan kurikulum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Nugroho,Riant. (2009). *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo
- Oliva, Peter F. (1997).*Developing the curriculum*. 4th ed.New York: Addison-Wesley Longman.
- Purwanto, Ngalim. (1994). Prinsip-Prinsip dan Teknik pengajaran (Bandung:PT Rosdakarya).
- Philip G. Altbach, Robert F. Arnove and Gail P. Kelly. (1999). *Comparative education* (New York : Macmillan Publishing Co. Inc.)
- Randal B. Ripley, (1985) *Policy Analysis in Political science* Chicago, IL: Nelson Hall Publishers
- Sanjaya, Wina. (2005). *Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Seels, Barbara & Glasgow Z. (1990). *Exercises in Interuactional Dessign*. Columbus Ohio : Merrill Publishing Company
- Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubis, S.B. Hari, dan Huseini, Martani, (1987). *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta:Pusat. Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia

- Soedirjanto, (1998). Pendidikan sebagai Sarana Reformasi Mental dalam Upaya Pembangunan Bangsa (Jakarta: Balai Pustaka)
- Sharkansy, I. dan C.E. Edward. (1978) The Policy: Predicament. San Fransisco:W.H. Freeman.
- Subarsono, AG.(2009). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunggono, B. (1994). Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syah, Muhibbin. (1997) Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung:Remaja Rosdakarya
- Suharto, Edi (2005a), Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta
- Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho, (2008). Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Tu'u, Tulus. (2004).Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa. Jakarta: Grasindo.
- Van Meter, DS.,and CE. Van Horn. (1975). The Policy implementation Procces: A Conceptual Framework, administration and Society.
- Walker Tileston, Donna, (2005). 10 Best Teaching Practice, Corwin Press
- West Burnham, John and Max Coates. (2006). Transforming Education For Every child : a practical Handbook .Network Continuum
- (DEE 1998:7 as cited in Les Bell & Howard Stevenson in Education Policy: Process, Themes and Impact. New York: Routledge, 2006, page 48)

## **Jurnal**

- Ghozali, Abbas. Pendidikan: Antara Investasi Manusia dan Alat Diskriminasi dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun ke 6 Nomor 023, Badan Peneliti dan Pengembangan. Jakarta: Depdiknas, Mei 2000
- Hakim, Arief Rachman, 2005. Rumah Sekolahku, Dunia Sekolahku, Kompas, 13 Maret 2005
- Fisher, Ryan. 2008. Debating Assesment In Education in Musik Education September, University of Central Arkansas.

[http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?nfpb=true&&ERICExtSearch\\_SearchValue\\_0=EJ819200&ERICExtSearch\\_SearchType\\_0=no&accno=EJ819200](http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?nfpb=true&&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ819200&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ819200)

Risti's Site 2008. <http://izzahluvgreen.wordpress.com/>

Desyandri's Weblog 2008, <http://desyandri.wordpress.com/2008/12/22/>

Fauzi, Gamawan. 2010. Kebijakan Publik Sektor Pendidikan Di Era Otda, Indopos Online, 2010

### **Peraturan perundang-undangan**

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999

BNSP.(2006) Panduan Penyusunan KTSP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Pasal 4 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan adanya kewenangan daerah provinsi, kabupaten, dan tata kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewarganegaraan Pemerintahan dan Daerah Provinsi sebagai Daerah Otonomi Kewenangan pemerintahan dalam bidang pendidikan

### **Dokumen Lainnya**

Kajian Kebijakan Kurikulum Sekolah Dasar Tahun 2007 – Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum)

Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia (Suplemen Bahan Ajar Unit 4) [http://pijggsd.dikti.go.id/file.php/1/repository/dikti/Revisi\\_Bahan\\_Ajar\\_Cetak/BA\\_C\\_Pengkur\\_SD/UNIT-4\\_PERKEMBANGAN\\_KURIKULUM .pdf](http://pijggsd.dikti.go.id/file.php/1/repository/dikti/Revisi_Bahan_Ajar_Cetak/BA_C_Pengkur_SD/UNIT-4_PERKEMBANGAN_KURIKULUM.pdf)

**Laman**

([http://www.interkultur.com/leftnavi/worldrankings/print/5fa2229823c864098d5e05f97af02322/?tx\\_amranking\\_pi1%5Blist\\_id%5D=1&tx\\_amranking\\_pi1%5Baction%5D=print](http://www.interkultur.com/leftnavi/worldrankings/print/5fa2229823c864098d5e05f97af02322/?tx_amranking_pi1%5Blist_id%5D=1&tx_amranking_pi1%5Baction%5D=print))

<http://megapolitan.kompas.com/read/2010/02/28/19140275/...trackback>

<http://www.kemlu.go.id/hochiminhcity/Lists/EmbassiesNews/DispForm.aspx?ID=100&I=en>

<http://indonesiaproud.wordpress.com/2011/03/22/paduan-suara-undip-raih-grand-champion-gita-swara-raih-emas-di-1st-vietnam-international-choir-festival/>

<http://www.tempo.co/read/news/2012/06/20/173411849/p-7-Klaim-Malaysia-Sejak-2007>



Hari//tanggal wawancara : Kamis, 05 Januari 2012

Nama Sekolah : SD Nasional 1 Bekasi Jawa Barat

INFORMAN	TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DAN KODING
Dwi Maria Handayani (Kepala Sekolah)	<p>P: Sejauhmana komitmen sekolah dalam mendukung pembelajaran kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah?</p> <p>I: Komitmen sekolah untuk mendukung pembelajaran sangat baik dan mendukung sepenuhnya. Kami dalam hal ini tidak membedakan tiap-tiap mata pelajaran kurikulum. Menurut kami, semua mata pelajaran sama baiknya dan sama pentingnya untuk didukung. Kali ini, pembelajaran kurikulum seni budaya keterampilan memang agak menonjol dalam konteks prestasinya. Oleh karena itu kami harus mendukung secara penuh dan totalitas. Namun, bukan berarti mata pelajaran lain tidak menonjol. (1)</p> <p>P: Sisi lain, proses pembelajaran Nassa menggunakan metode sesuai dengan kurikulum yang menetapkan active learning dan metode problem solving Untuk dapat mengembangkan karakter building, leadership dan kemandirian bagi para siswa. Nassa secara berkesinambungan berperan sebagai pusat pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator dan mediator didalam</p>

	<p>pembelajaran. Salah satu program yang diunggulkan adalah program kakak adik asuh (Kadiksuh) yang dapat mengajarkan dan mengembangkan sikap leadership dan tanggung jawab setiap siswa. Sikap mengajar guru-guru kepada siswa menjadi penting. Semuanya berorientasi pada memberikan kenyamanan, kesenangan dan perhatian kepada siswa agar materi belajar bukanlah sesuatu yang menakutkan dan keterpaksaan tapi menjadi sebuah kebutuhan bagi siswa (2)</p> <p>P: Sejuahmana upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk berkoordinasi dengan seluruh guru-guru seni budaya keterampilan?</p> <p>I: Kami selalu melakukan koordinasi secara kontinyu dengan cara memonitoring persiapan, pelaksanaan mata pelajaran SBK di sekolah. Dan kami selalu memberikan arahan-arahan agar mata pelajaran SBK disekolah semakin baik dan terus menorehkan prestasi bagi sekolah.</p> <p>P: Bagaimana cara anda berkoordinasi dengan pihak manajemen sekolah dan juga guru-guru SBK lainnya dalam hal implementasi kebijakan kurikulum?</p> <p>I: Konsep implementasi kebijakan di sekolah kami selalu berorientasi pada pendekatan</p>
--	--

persoalan (*problematical approach*) dan bukan pada pendekatan individu (*individual approach*). Hal ini kami lakukan agar seluruh elemen kebijakan tidak mengarah kepada siapa pembuat kebijakan dan harus pembuat kebijakan yang menentukan arah tujuan kebijakan sekolah. Intinya, semua elemen harus berfungsi sebagaimana besaran peran yang bisa dilakukan, maka dari itu kami memandang pendekatan sederhana 5W1H namun tajam pada titik-titik persoalan, bisa diaplikasikan kepada semua instrumen pelaksana kebijakan. Langkah-langkah ini yang kami ambil untuk melakukan koordinasi secara rutin dengan seluruh instrumen sekolah.(3)

P: Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Bekasi terhadap pelaksanaan kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah anda?

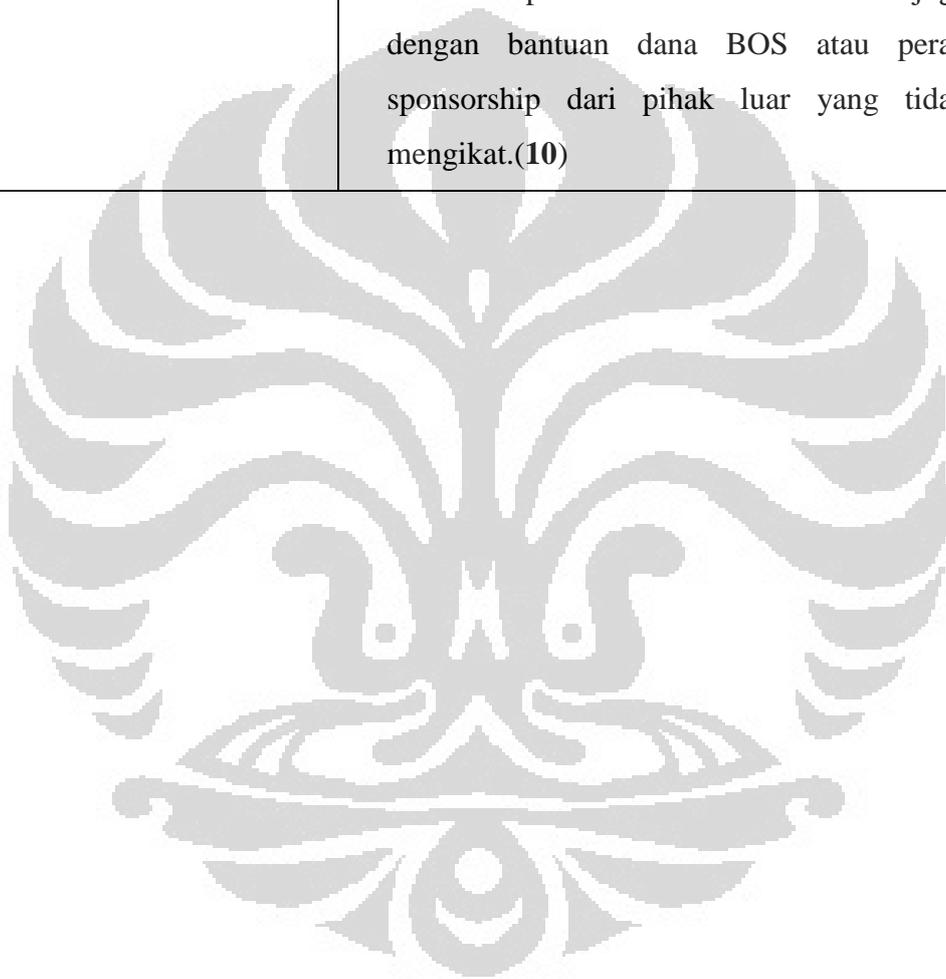
I: Peran Dinas Pendidikan Kota Bekasi sangat kurang melakukan peranaktifnya, khususnya dalam konteks pengawasan dan pembinaan kepada kami. Paling selama ini yang dilakukan hanya memberikan informasi tentang adanya lomba paduan suara saja, selebihnya yah biasa-biasa saja. Tapi kami selalu kok memberikan laporan rutin ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi. (4)

P: Bagaimana peran orang tua atau komite

	<p>sekolah dalam kegiatan intra atau ekstra kurikuler. Khususnya seni budaya keterampilan di sekolah anda?</p> <p>I: Sejauh ini sangat mendukung sekali. Kami selalu berbincang dari hati ke hati dengan orang tua murid dalam hal kegiatan-kegiatan sekolah yang notabeneanya adalah kegiatan sekolah. Karena kami tidak akan berarti apa-apa jika orangtua murid dan komite sekolah hanya berpangutangan saja tanpa ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah.(5)</p> <p>P: Berapa banyak jumlah guru-guru SBK di sekolah anda?</p> <p>I: Saat ini kami memiliki 6 orang guru yang terdiri atas; 2 orang guru seni musik, 1 orang guru seni tari, 1 orang guru seni rupa dan 2 orang guru unruk SBK Kelas Rendah. (6)</p> <p>P: Bagaimana dengan kapasitas kemampuan guru-guru Seni Budaya Keterampilan di sekolah anda saat ini? Sudah sesuaikah dengan disiplin ilmu Seni Budaya Keterampilan?</p> <p>I: Guru yang mengajar mata pelajaran SBK di sekolah kami, semuanya sudah sesuai dengan disiplin ilmu yang di ampu.(7)</p> <p>P: Fasilitas pendukung apa saja yang</p>
--	--

	<p>disediakan oleh sekolah untuk mendukung pembelajaran kurikulum seni budaya keterampilan?</p> <p>P: Kami menyediakan ruang musik dengan seluruh perlengkapannya. Dan juga menyediakan guru tari, guru musik. Guru lukis dan lainnya, sesuai dengan kebutuhan pelajaran SBK.</p> <p>P: Bagaimana sekolah memfasilitasi berbagai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hasil-hasil pembelajaran kurikulum seni budaya dan keterampilan? Seperti kegiatan lomba-lomba, pentas seni dan lainnya.</p> <p>I: Siswa diikutsertakan dalam lomba yang berkaitan dengan seni musik, seni tari, seni lukis. Dan siswa kami juga selalu tampil unjuk kebolehan dan kemampuannya dalam ajang kreatifitas siswa yang selalu kami lakukan di sekolah.(8)</p> <p>P: Bagaimanakah menurut anda, bilamana mata pelajaran SBK yang mencakup seni musik, seni tari dan seni rupa dilaksanakan oleh satu orang guru saja?</p> <p>I: Sebaiknya dipisahkan saja. Karena sampai saat ini sumberdaya guru yang ada di sekolah kami belum ada yang memadai dengan kemampuan diri dalam menangani 3 bidang studi tersebut.(9)</p>
--	--

	<p>P: Sejahtera mana pihak sekolah mengupayakan pembiayaan-pembiayaan kegiatan seni budaya keterampilan di sekolah, mengingat sumber pendanaan yang ada hanya cukup untuk menutupi operasional rutin sekolah?</p> <p>I: Dengan melibatkan orangtua dan dana yang telah disiapkan/tersedia disekolah dan juga dengan bantuan dana BOS atau peran sponsorship dari pihak luar yang tidak mengikat.(10)</p>
--	--



Hari//tanggal wawancara : Kamis, 05 Januari 2012

Nama Sekolah : SD Nasional 1 Bekasi Jawa Barat

INFORMAN	TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DAN KODING
Mohammad Charles (Guru Seni Musik)	<p>P: Sejuahmana komitmen sekolah dalam mendukung pembelajaran kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah?</p> <p>I: Sekolah memberikan dukungan fasilitas dan keleluasaan inovasi pembelajaran, silabus serta kurikulum. Sehingga guru dapat leluasa menyelenggarakan pembelajaran</p> <p>P: Sejuahmana upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk berkoordinasi dengan seluruh guru-guru seni budaya keterampilan?</p> <p>I: Dengan memberikan jam pelajaran yang proposional dan pembagian tugas yang jelas. (11)</p> <p>P: Bagaimana cara anda berkoordinasi dengan pihak manajemen sekolah dan juga guru-guru SBKlainnya dalam hal implementasi kebijakan kurikulum?</p> <p>I: Kami selalu melakukan pertemuan reguler setiap semester dalam bentuk kelompok kerja guru (KKG) dan membicarakan berbagai hal seputar peningkatan kurikulum dengan berbagai kendala yang kami hadapi. Dan hasilnya selalu kami</p>

	<p>laporkan kepada pihak sekolah khususnya kepala sekolah.(12)</p> <p>P: Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Bekasi terhadap pelaksanaan kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah anda?</p> <p>I: Selama ini tidak ada peran dinas yang kami rasakan. Paling Dinas Pendidikan hanya sekedar memberikan informasi tentang lomba seni dan sejenisnya.</p> <p>P: Bagaimana peran orang tua atau komite sekolah dalam kegiatan intra atau ekstra kurikuler. Khususnya seni budaya keterampilan di sekolah anda?</p> <p>I: Orangtua murid dan komite sekolah sangat mendukung sekali. Kami selalu melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan disekolah. Biasanya orang tua murid dan komite sekolah bahu-membahu membantu pemenuhan berbagai kebutuhan kegiatan seperti penyediaan bahan belajar dan kepanitiaan dalam lomba-lomba seni yang kami adakan atau kami ikuti. (13)</p> <p>P: Apakah ada penghargaan atau perhatian dari Pemerintah baik dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi ataupun Pusat setelah sekolah anda mendapatkan berbagai macam prestasi baik tingkat Nasional maupun Internasional?</p>
--	---

	<p>I: Tidak ada sama sekali</p> <p>P: Apabila ada suatu kegiatan lomba atau kejuaraan baik tingkat Nasional atau Internasional, dari manakah sekolah mendapatkan pendanaannya?</p> <p>I: Pihak sekolah pasti membantu, dan juga kami mendapatkan bantuan dari orangtua murid, sponsorship dan donator</p> <p>P: Sejahumana anda dapat memainkan instrumen musik yang ada di sekolah anda, termasuk instrumen musik tradisional, jika ada?</p> <p>I: Baik. Alat yang ada disekolah : Piano, Gitar,Recorder, angklung, alat perkusi, Bass <b>(14)</b></p> <p>P: Sejahumana anda dapat membaca, menulis not balok?</p> <p>I: Baik</p> <p>P: Sejahumana anda dapat bernyanyi dan mengaransemen paduan suara dengan 2 suara?</p> <p>I: Baik</p> <p>P: Sejahumana anda dapat menari tarian tradisional? Sebutkan jenis-jenis tarian tradisional yang anda kuasai?</p>
--	---

	<p>I: Tidak bisa</p> <p>P: Sejauhmana anda membuat pola tarian sederhana dengan kreasi sendiri?</p> <p>I: Cukup</p> <p>P: Sejauhmana anda dapat melukis dan menggambar?</p> <p>I: Tidak Bisa</p> <p>P: Sejauhmana anda dapat membuat beberapa kerajinan tangan (menganyam / teknik jumputan / meronce)</p> <p>I: Tidak Bisa</p> <p>P: Berapa banyak jumlah guru-guru SBK di sekolah anda?</p> <p>I: Saat ini kami memiliki 6 orang guru yang terdiri atas; 2 orang guru seni musik, 1 orang guru seni tari, 1 orang guru seni rupa dan 2 orang guru unruk SBK Kelas Rendah.</p> <p>P: Bagaimana dengan kapasitas kemampuan guru-guru Seni Budaya Keterampilan di sekolah anda saat ini? Sudah sesuaikah dengan disiplin ilmu Seni Budaya Ketarampilan?</p> <p>I: Guru yang mengajar mata pelajaran SBK di</p>
--	---

	<p>sekolah kami, sesuai dengan disiplin ilmu.</p> <p>P: Fasilitas pendukung apa saja yang disediakan oleh sekolah untuk mendukung pembelajaran kurikulum seni budaya keterampilan?</p> <p>I: Pihak sekolah menyediakan ruang music, ruang tari, audio visual, alat-alat musi dan alat-alat keterampilan</p> <p>P: Bagaimana sekolah memfasilitasi berbagai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hasil-hasil pembelajaran kurikulum seni budaya dan keterampilan? Seperti kegiatan lomba-lomba, pentas seni dan lainnya.</p> <p>I: Sekolah sangat mendukung segala kegiatan kami.</p> <p>P: Bagaimana dukungan sekolah terhadap peningkatan kualitas kemampuan anda sebagai guru seni budaya keterampilan? Misalnya mengikuti pelatihan KTSP tingkat Kecamatan, Kotamadya, Provinsi atau Nasional?</p> <p>I: Pihak sekolah selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti berbagai pelatihan peningkatan kemampuan <b>(15)</b></p> <p>P: Bagaimanakah menurut anda, bilamana mata pelajaran SBK yang mencakup seni</p>
--	---

	<p>musik, seni tari seni rupa dan keterampilan dilaksanakan oleh satu orang guru saja?</p> <p>I: Hal tersebut tidak memungkinkan dilakukan</p> <p>P: Bagaimana cara pihak sekolah memperlakukan dan memberdayakan anda sebagai guru seni budaya keterampilan sebagai mitra pendidikan di sekolah?</p> <p>I: Menempatkan pendidikan SBK setara dengan mata pelajaran lainnya.</p> <p>P: Bagaimana cara anda beserta guru-guru seni budaya keterampilan lainnya melakukan diskusi-diskusi kurikulum seni budaya keterampilan?</p> <p>I: Melalui forum Kelompok Kerja Guru (KKG) yang selalu kami adakan tiap semester</p> <p>P: Bagaimana cara anda melakukan pendekatan pembelajaran kurikulum kepada siswa?</p> <p>I: Melalui inovasi-inovasi yang mendukung dan menunjang keberhasilan pencapaian target (16)</p> <p>P: Sikap apa yang anda terapkan terhadap siswa, baik yang menyukai ataupun yang tidak menyukai seni?</p> <p>I: Inti dari pelajaran seni adalah apresiasi, sehingga tidak ada paksaan terhadap yang</p>
--	--

	<p>tidak menyukai seni.(17)</p> <p>P: Sejauhmana anda memahami standar operasional prosedur kurikulum seni budaya keterampilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah?</p> <p>I: Baik dan selalu kami terapkan sesuai dengan SOP yang telah kami sepakati bersama (18)</p> <p>P: Bagaimana anda mengimplementasikan standar kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah anda, dari sisi durasi pembelajaran, pematangan silabus kurikulum dan lainnya?</p> <p>I: Dalam konteks kurikulum seni budaya keterampilan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, khususnya seni musik, bisa dikatakan cukup. Namun seringkali dalam tahapan penyelenggaraan terjadi ketidakrelevasian materi antara pendidikan di jenjang sebelumnya dengan jenjang berikutnya. Dari sisi konten kurikulum, terkadang kami menemukan kesulitan mengaplikasikannya karena keterbatasan waktu pembelajaran yang hanya 2 jam untuk tiap kelas. Di tambah lagi, ketidaksesuaian materi pembelajaran dengan kemampuan menerima dan menyerap siswa. Kondisi daya serap siswa kami, hanya kamilah yang dapat</p>
--	--

	<p>mengukur. Oleh karena itu, kami melakukan improvisasi dan inovasi terhadap muatan materi kurikulum SBK yang kami sesuaikan dengan kemampuan daya serap siswa kami, namun tetap tidak keluar dari konsepsi penerapan pembelajaran kurikulum itu sendiri.(19)</p> <p>P: Bagaimana target pencapaian yang dilakukan oleh guru-guru seni budaya keterampilan, mengingat keterbatasan jam pelajaran, materi kurikulum yang padat?</p> <p>I: Minimal harus mencapai target produk seni (bisa berupa pertunjukkan/karya seni) dan menyediakan waktu luang di luar jam pelajaran.(20)</p> <p>P: Bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam menilai prestasi anda sebagai guru seni budaya keterampilan? Adakah penerapan penilaian reward dan punishment?</p> <p>I: Ada, namun belum maksimal. Belum ada standarisasi penilaian prestasi guru-guru secara terukur.(21)</p> <p>P: Sejauhmana pihak sekolah mengupayakan pembiayaan-pembiayaan kegiatan seni budaya keterampilan di sekolah, mengingat sumber pendanaan yang ada hanya cukup untuk menutupi operasional rutin sekolah?</p>
--	--

	<p>I: Dengan turut serta melibatkan komite sekolah dan juga orang tua murid.</p> <p>P: Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam implementasi kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah anda baik dalam koordinasi, pembinaan maupun pengawasan mutu kurikulum selama ini?</p> <p>I: Cukup namun belum maksimal</p> <p>P: Bagaimana peran Komite Sekolah dalam mendukung implementasi kurikulum Seni Budaya Keterampilan di sekolah anda?</p> <p>I: Sangat mendukung</p> <p>P: Bagaimana struktur perangkat manajemen di sekolah anda?</p> <p>I: Cukup</p>
--	---

Hari//tanggal wawancara : Kamis, 05 Januari 2012

Nama Sekolah : SD Nasional 1 Bekasi Jawa Barat

<b>INFORMAN</b>	<b>TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DAN KODING</b>
Wina Ardhiana (Guru Seni Musik)	<p>P: Seauhmana komitmen sekolah dalam mendukung pembelajaran kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah?</p> <p>I: Seauh ini pihak sekolah sangat mendukung setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran kurikulum seni budaya, baik secara fasilitas, moril dan lainnya.</p> <p>P: Seauhmana upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk berkoordinasi dengan seluruh guru-guru seni budaya keterampilan?</p> <p>I: Baik, dengan cara membuat Kelompok Kerja Guru (KKG).</p> <p>P: Bagaimana cara anda berkoordinasi dengan pihak manajemen sekolah dan juga guru-guru SBKlainnya dalam hal implementasi kebijakan kurikulum?</p> <p>I: Kami selalu melakukan pertemuan reguler setiap semester dalam bentuk kelompok kerja guru (KKG) dan membicarakan berbagai hal seputar peningkatan kurikulum dengan berbagai kendala yang kami hadapi. Dan hasilnya selalu kami laporkan kepada pihak sekolah khususnya</p>

	<p>kepala sekolah.</p> <p>P: Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Bekasi terhadap pelaksanaan kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah anda?</p> <p>I: Selama ini tidak ada peran dinas yang kami rasakan.</p> <p>P: Bagaimana peran orang tua atau komite sekolah dalam kegiatan intra atau ekstra kurikuler. Khususnya seni budaya keterampilan di sekolah anda?</p> <p>I: Peran orangtua sangat mendukung sekali, baik dalam kegiatan intra maupun ekstra kurikuler. Bahkan hampir dalam setiap kegiatan pihak orangtua juga termasuk dalam panitia kegiatan.</p> <p>P: Apakah ada penghargaan atau perhatian dari Pemerintah baik dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi ataupun Pusat setelah sekolah anda mendapatkan berbagai macam prestasi baik tingkat Nasional maupun Internasional?</p> <p>I: Tidak ada sama sekali</p> <p>P: Apabila ada suatu kegiatan lomba atau kejuaraan baik tingkat Nasional atau Internasional, dari manakah sekolah mendapatkan pendanaannya?</p>
--	---

	<p>I: Pihak sekolah pasti membantu, dan juga kami mendapatkan bantuan dari orangtua murid, sponsorship dan donator</p> <p>P: Sejahteramana anda dapat memainkan instrumen musik yang ada di sekolah anda, termasuk instrumen musik tradisional, jika ada?</p> <p>I: Baik. Alat yang ada disekolah : Piano, Gitar,Recorder, angklung, alat perkusi, Bass</p> <p>P: Sejahteramana anda dapat membaca, menulis not balok?</p> <p>I: Baik</p> <p>P: Sejahteramana anda dapat bernyanyi dan mengaransemen paduan suara dengan 2 suara?</p> <p>I: Baik</p> <p>P: Sejahteramana anda dapat menari tarian tradisional? Sebutkan jenis-jenis tarian tradisional yang anda kuasai?</p> <p>I: Baik, Tari pendet dan jaipong</p> <p>P: Sejahteramana anda membuat pola tarian sederhana dengan kreasi sendiri?</p> <p>I: Bisa</p>
--	---

	<p>P: Sejauhmana anda dapat melukis dan menggambar?</p> <p>I: Bisa</p> <p>P: Sejauhmana anda dapat membuat beberapa kerajinan tangan (menganyam / teknik jumputan / meronce)</p> <p>I: Tidak Bisa</p> <p>P: Berapa banyak jumlah guru-guru SBK di sekolah anda?</p> <p>I: Saat ini kami memiliki 6 orang guru yang terdiri atas; 2 orang guru seni musik, 1 orang guru seni tari, 1 orang guru seni rupa dan 2 orang guru unruk SBK Kelas Rendah.</p> <p>P: Bagaimana dengan kapasitas kemampuan guru-guru Seni Budaya Keterampilan di sekolah anda saat ini? Sudah sesuaikah dengan disiplin ilmu Seni Budaya Keterampilan?</p> <p>I: Cukup sesuai, dan menguasai bidangnya dengan baik, karena setiap pelajaran seni diajarkan oleh guru yang berbeda.</p> <p>P: Fasilitas pendukung apa saja yang disediakan oleh sekolah untuk mendukung pembelajaran kurikulum seni budaya keterampilan?</p>
--	---

	<p>I: Ruang khusus musik, alat-alat musik (seperti band, maupun tradisional seperti angklung</p> <p>P: Bagaimana sekolah memfasilitasi berbagai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hasil-hasil pembelajaran kurikulum seni budaya dan keterampilan? Seperti kegiatan lomba-lomba, pentas seni dan lainnya.</p> <p>I: Sekolah sangat mendukung segala kegiatan kami, dan membantu mencari donator dan sponsor.</p> <p>P: Bagaimana dukungan sekolah terhadap peningkatan kualitas kemampuan anda sebagai guru seni budaya keterampilan? Misalnya mengikuti pelatihan KTSP tingkat Kecamatan, Kotamadya, Provinsi atau Nasional?</p> <p>I: Pihak sekolah selalu memberikan peluang kepada kami untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik tingkat kecamatan, kotamadya, provinsi dan nasional</p> <p>P: Bagaimanakah menurut anda, bilamana mata pelajaran SBK yang mencakup seni musik, seni tari dan seni rupa dilaksanakan oleh satu orang guru saja?</p> <p>I: Menurut saya tidak akan berjalan maksimal. Sebaiknya seni musik, seni rupa dan seni</p>
--	---

	<p>tari diajarkan oleh guru-guru yang benar-benar sesuai dengan kemampuan dibidangnya, sehingga lebih fokus.</p> <p>P: Bagaimana cara pihak sekolah memperlakukan dan memberdayakan anda sebagai guru seni budaya keterampilan sebagai mitra pendidikan di sekolah?</p> <p>I: Baik</p> <p>P: Bagaimana cara anda beserta guru-guru seni budaya keterampilan lainnya melakukan diskusi-diskusi kurikulum seni budaya keterampilan?</p> <p>I: Melalui forum Kelompok Kerja Guru (KKG) yang selalu kami adakan tiap semester</p> <p>P: Bagaimana cara anda melakukan pendekatan pembelajaran kurikulum kepada siswa?</p> <p>I: Dengan membuat materi ajar yang menarik perhatian siswa</p> <p>P: Sikap apa yang anda terapkan terhadap siswa, baik yang menyukai ataupun yang tidak menyukai seni?</p> <p>I: Berusaha membuat siswa untuk menyukai pelajaran seni dan selalu membuat pelajaran musik menjadi menarik.</p>
--	--

	<p>P: Seauhmana anda memahami standar operasional prosedur kurikulum seni budaya keterampilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah?</p> <p>I: Baik dan selalu kami terapkan sesuai dengan SOP yang telah kami sepakati bersama</p> <p>P: Bagaimana anda mengimplementasikan standar kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah anda, dari sisi durasi pembelajaran, pematangan silabus kurikulum dan lainnya?</p> <p>I: Dengan mengefektikan waktu pembelajaran dan menyediakan waktu tambahan di luar jam pelajaran.</p> <p>P: Bagaimana target pencapaian yang dilakukan oleh guru-guru seni budaya keterampilan, mengingat keterbatasan jam pelajaran, materi kurikulum yang padat?</p> <p>I: Kurikulum yang ada saat ini tak akan banyak berarti, ketika peranaktif serta talenta guru-guru seni budaya keterampilan tidak mengerti, memahami, menginterpretasikan dan mengimplementasikannya secara baik. Kami memandang bahwa bicara penerapan kurikulum terkait secara holistik dan berkesinambungan dengan kemampuan guru-guru. Kami berenam, guru SBK</p>
--	---

	<p>selalu mengadakan workshop kecil-kecilan sebagai simulasi penerapan kurikulum SBK, dengan tujuan agar apa yang akan kami terapkan dapat diterima secara baik oleh siswa. Akhirnya, dari hasil simulasi yang kami lakukan, kami selalu menemukan formula efektif metodologi pengajaran, namun tetap tidak bergeser dari inti kurikulum yang di buat oleh Pemerintah. Dan pihak manajemen sangat mendukung langkah kami ini. Proses komunikasi kami dengan komite sekolahpun selalu terjalin, khususnya untuk peningkatan mutu pembelajaran seni (22)</p> <p>P: Bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam menilai prestasi anda sebagai guru seni budaya keterampilan? Adakah penerapan penilaian reward dan punishment?</p> <p>I: Ada, namun belum maksimal.</p> <p>P: Sejauhmana pihak sekolah mengupayakan pembiayaan-pembiayaan kegiatan seni budaya keterampilan di sekolah, mengingat sumber pendanaan yang ada hanya cukup untuk menutupi operasional rutin sekolah?</p> <p>I: Sejauh ini panitia kegiatan yang lebih giat dalam mengupayakan pembiayaan dana baik</p>
--	--

	<p>melalui donaur maupun sponsor.</p> <p>P: Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam implementasi kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah anda baik dalam koordinasi, pembinaan maupun pengawasan mutu kurikulum selama ini?</p> <p>I: Cukup namun belum maksimal</p> <p>P: Bagaimana peran Komite Sekolah dalam mendukung implementasi kurikulum Seni Budaya Keterampilan di sekolah anda?</p> <p>I: Sangat mendukung</p> <p>P: Bagaimana struktur perangkat manajemen di sekolah anda?</p> <p>I: Ketua Lembaga, Direktur Operasional, kepala Divisi Litbang, Kepala Personalia, Kepala Sekolah, Staff Kurikulum, Guru dan karyawan</p>
--	--

Hari//tanggal wawancara : Jum'at, 06 Januari 2012

Nama Sekolah : SD Nasional 1 Bekasi Jawa Barat

<b>INFORMAN</b>	<b>TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DAN KODING</b>
Lidia Marlinda (Guru Seni Tari)	<p>P: Sejuahmana komitmen sekolah dalam mendukung pembelajaran kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah?</p> <p>I: Sangat mendukung sampai membuat acara setiap jenjang melalui penampilan</p> <p>P: Sejuahmana upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk berkoordinasi dengan seluruh guru-guru seni budaya keterampilan?</p> <p>I: Baik, dengan cara membuat Kelompok Kerja Guru (KKG).</p> <p>P: Bagaimana cara anda berkoordinasi dengan pihak manajemen sekolah dan juga guru-guru SBKlainnya dalam hal implementasi kebijakan kurikulum?</p> <p>I: Kami selalu melakukan pertemuan reguler setiap semester dalam bentuk kelompok kerja guru (KKG)</p> <p>P: Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Bekasi terhadap pelaksanaan kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah anda?</p> <p>I: Hanya mendukung penuh pada kegiatan</p>

	<p>seni saja</p> <p>P: Bagaimana peran orang tua atau komite sekolah dalam kegiatan intra atau ekstra kurikuler. Khususnya seni budaya keterampilan di sekolah anda?</p> <p>I: Peran orangtua sangat mendukung sekali, baik dalam kegiatan intra maupun ekstra kurikuler..</p> <p>P: Apakah ada penghargaan atau perhatian dari Pemerintah baik dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi ataupun Pusat setelah sekolah anda mendapatkan berbagai macam prestasi baik tingkat Nasional maupun Internasional?</p> <p>I: Tidak ada sama sekali</p> <p>P: Apabila ada suatu kegiatan lomba atau kejuaraan baik tingkat Nasional atau Internasional, dari manakah sekolah mendapatkan pendanaannya?</p> <p>I: Pihak sekolah ,orangtua murid, sponsorship dan donator</p> <p>P: Sejauhmana anda dapat memainkan instrumen musik yang ada di sekolah anda, termasuk instrumen musik tradisional, jika ada?</p> <p>I: Baik. Angklung dan saron</p>
--	---

	<p>P: Sejahter mana anda dapat membaca, menulis not balok?</p> <p>I: Kurang baik</p> <p>P: Sejahter mana anda dapat bernyanyi dan mengaransemen paduan suara dengan 2 suara?</p> <p>I: Sekedar bernyanyi saja</p> <p>P: Sejahter mana anda dapat menari tarian tradisional? Sebutkan jenis-jenis tarian tradisional yang anda kuasai?</p> <p>I: Baik dan menguasai (Tari lenggang Nyai, Merak Ulin, Legong Kraton, Saman, 3 serangkai, Tari giring-giring, Pakarena, Ngremo dan Jejer)</p> <p>P: Sejahter mana anda membuat pola tarian sederhana dengan kreasi sendiri?</p> <p>I: Bisa dengan membuat dan menampilkan serta diikuti untuk perlombaan</p> <p>P: Sejahter mana anda dapat melukis dan menggambar?</p> <p>I: Sekedar bisa saja</p> <p>P: Sejahter mana anda dapat membuat beberapa kerajinan tangan (menganyam / teknik jempunan / meronce)</p>
--	---

	<p>I: Bisa sedikit</p> <p>P: Berapa banyak jumlah guru-guru SBK di sekolah anda?</p> <p>I: Saat ini kami memiliki 6 orang guru yang terdiri atas; 2 orang guru seni musik, 1 orang guru seni tari, 1 orang guru seni rupa dan 2 orang guru unruk SBK Kelas Rendah.</p> <p>P: Bagaimana dengan kapasitas kemampuan guru-guru Seni Budaya Keterampilan di sekolah anda saat ini? Sudah sesuaikah dengan disiplin ilmu Seni Budaya Keterampilan?</p> <p>I: Cukup sesuai, dan menguasai bidangnya dengan baik</p> <p>P: Fasilitas pendukung apa saja yang disediakan oleh sekolah untuk mendukung pembelajaran kurikulum seni budaya keterampilan?</p> <p>I: Ruang khusus musik, alat-alat musik (seperti band, maupun tradisional seperti angklung</p> <p>P: Bagaimana sekolah memfasilitasi berbagai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hasil-hasil pembelajaran kurikulum seni budaya dan keterampilan? Seperti kegiatan lomba-lomba, pentas seni dan</p>
--	---

	<p>lainnya.</p> <p>I: Sekolah sangat mendukung segala kegiatan kami, dan membantu mencaró donator dan sponsor.</p> <p>P: Bagaimana dukungan sekolah terhadap peningkatan kualitas kemampuan anda sebagai guru seni budaya keterampilan? Misalnya I: mengikuti pelatihan KTSP tingkat Kecamatan, Kotamadya, Provinsi atau Nasional?</p> <p>I: Pihak sekolah selalu memberikan peluang kepada kami untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik tingkat kecamatan, kotamadya, provinsi dan nasional</p> <p>P: Bagaimanakah menurut anda, bilamana mata pelajaran SBK yang mencakup seni musik, seni tari dan seni rupa dilaksanakan oleh satu orang guru saja?</p> <p>I: Tidak bagus dan tidak kondusif sampai ke siswa, karena tidak akan menghasilkan pada akhir kegiatan nanti.</p> <p>P: Bagaimana cara pihak sekolah memperlakukan dan memberdayakan anda sebagai guru seni budaya keterampilan sebagai mitra pendidikan di sekolah?</p> <p>I: Baik dan mendukung apa yng dilakukan</p>
--	--

	<p>guru SBK</p> <p>P: Bagaimana cara anda beserta guru-guru seni budaya keterampilan lainnya melakukan diskusi-diskusi kurikulum seni budaya keterampilan?</p> <p>O: Melalui forum Kelompok Kerja Guru (KKG) yang selalu kami adakan tiap semester</p> <p>P: Bagaimana cara anda melakukan pendekatan pembelajaran kurikulum kepada siswa?</p> <p>I: Komunikasi dan membahas atau mengevaluasi ulang setiap pelajaran</p> <p>P: Sikap apa yang anda terapkan terhadap siswa, baik yang menyukai ataupun yang tidak menyukai seni?</p> <p>I: Berusaha membuat siswa untuk menyukai pelajaran seni dan selalu membuat pelajaran musik menjadi menarik.</p> <p>P: Sejauhmana anda memahami standar operasional prosedur kurikulum seni budaya keterampilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah?</p> <p>I: Baik dan selalu kami terapkan sesuai dengan SOP yang telah kami sepakati bersama</p>
--	--

	<p>P: Bagaimana anda mengimplementasikan standar kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah anda, dari sisi durasi pembelajaran, pematangan silabus kurikulum dan lainnya?</p> <p>I: Kami selalu berbagi peran dalam mempertajam silabus kurikulum yang ada di sekolah kami. Meskipun kami berlatar pendidikan jurusan seni yang berbeda, kami berempat adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam hal kontribusi pemikiran, ide, gagasan. Meskipun saya memiliki kemampuan koreografi tari, tapi adakalanya sumbangsaran saya untuk peningkatan mutu pendidikan seni musik atau seni rupa misalnya kerap dijadikan sebuah penemuan dan inovasi baru terhadap konsep penerapan kurikulum, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, di luar agenda pembelajaran, kami seringkali bertukar pengalaman dan talenta. Ini kami lakukan, karena tuntutan profesionalitas sebagai guru seni budaya keterampilan, seyogyanya harus memahami seluruhnya baik itu seni musik, seni tari atau seni rupa. Kami memang pernah mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan seni dari pihak manajemen. Namun, keterbatasan jenis pelatihan yang kami dapat dari manajemen sekolah, tidaklah</p>
--	---

	<p>menjadi halangan untuk berupaya meningkatkan secara individu. Bertukar kemampuan sering kami lakukan untuk mengasah talenta seni (23)</p> <p>P: Bagaimana target pencapaian yang dilakukan oleh guru-guru seni budaya keterampilan, mengingat keterbatasan jam pelajaran, materi kurikulum yang padat?</p> <p>I: Memberikan pelajaran tambahan di luar jam sekolah</p> <p>P: Bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam menilai prestasi anda sebagai guru seni budaya keterampilan? Adakah penerapan penilaian reward dan punishment?</p> <p>I: Belum ada</p> <p>P: Sejauhmana pihak sekolah mengupayakan pembiayaan-pembiayaan kegiatan seni budaya keterampilan di sekolah, mengingat sumber pendanaan yang ada hanya cukup untuk menutupi operasional rutin sekolah?</p> <p>I: Sejauh ini panitia kegiatan yang lebih giat dalam mengupayakan pembiayaan dana baik melalui donaur maupun sponsor.</p> <p>P: Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota</p>
--	---

	<p>Bekasi dalam implementasi kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah anda baik dalam koordinasi, pembinaan maupun pengawasan mutu kurikulum selama ini?</p> <p>I: Tidak ada sama sekali</p> <p>P: Bagaimana peran Komite Sekolah dalam mendukung implementasi kurikulum Seni Budaya Keterampilan di sekolah anda?</p> <p>I: Ikut langsung membantu dan berperan aktif membantu jalannya setiap kegiatan kesenian dan keterampilan</p> <p>P: Bagaimana struktur perangkat manajemen di sekolah anda?</p> <p>I: Ketua Lembaga, Direktur Operasional, kepala Divisi Litbang, Kepala Personalia, Kepala Sekolah, Staff Kurikulum, Guru dan karyawan</p>
--	---

Hari//tanggal wawancara : Sabtu, 07 Januari 2012

Nama Sekolah : SD Nasional 1 Bekasi Jawa Barat

<b>INFORMAN</b>	<b>TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DAN KODING</b>
<p>Wuri Wiyani (Guru SBK Kelas Rendah)</p>	<p>P: Sejuahmana komitmen sekolah dalam mendukung pembelajaran kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah?</p> <p>I: Pembelajaran SBK sangat penting karena melatih kemampuan motorik siswa</p> <p>P: Sejuahmana upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk berkoordinasi dengan seluruh guru-guru seni budaya keterampilan?</p> <p>I: Sangat baik dan mendukung seluruh kebutuhan guru-guru SBK dalam pembelajaran</p> <p>P: Bagaimana cara anda berkoordinasi dengan pihak manajemen sekolah dan juga guru-guru SBK lainnya dalam hal implementasi kebijakan kurikulum?</p> <p>I: Kami selalu melakukan pertemuan reguler setiap semester dalam bentuk kelompok kerja guru (KKG)</p> <p>P: Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Bekasi terhadap pelaksanaan kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah anda?</p> <p>I: Sebatas informasi-informasi tentang adanya</p>

	<p>lomba-lomba seni saja</p> <p>P: Bagaimana peran orang tua atau komite sekolah dalam kegiatan intra atau ekstra kurikuler. Khususnya seni budaya keterampilan di sekolah anda?</p> <p>I: Peran orangtua sangat mendukung sekali, sekaligus ikut berpartisipasi</p> <p>P: Apakah ada penghargaan atau perhatian dari Pemerintah baik dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi ataupun Pusat setelah sekolah anda mendapatkan berbagai macam prestasi baik tingkat Nasional maupun Internasional?</p> <p>I: Tidak ada sama sekali</p> <p>P: Apabila ada suatu kegiatan lomba atau kejuaraan baik tingkat Nasional atau Internasional, dari manakah sekolah mendapatkan pendanaannya?</p> <p>I: Pihak sekolah ,orangtua murid, sponsorship dan donatur</p> <p>P: Sejauhmana anda dapat memainkan instrumen musik yang ada di sekolah anda, termasuk instrumen musik tradisional, jika ada?</p> <p>I: Baik. Angklung dan saron</p> <p>P: Sejauhmana anda dapat membaca, menulis</p>
--	--

	<p>not balok?</p> <p>I: Cukup baik</p> <p>P: Sejauhmana anda dapat bernyanyi dan mengaransemen paduan suara dengan 2 suara?</p> <p>I: baik</p> <p>P: Sejauhmana anda dapat menari tarian tradisional? Sebutkan jenis-jenis tarian tradisional yang anda kuasai?</p> <p>I: Cukup baik, tapi hanya tari jaipong dan topeng</p> <p>P: Sejauhmana anda membuat pola tarian sederhana dengan kreasi sendiri?</p> <p>I: Belum mampu</p> <p>P: Sejauhmana anda dapat melukis dan menggambar?</p> <p>I: Cukup baik</p> <p>P: Sejauhmana anda dapat membuat beberapa kerajinan tangan (menganyam / teknik jempunan / meronce)</p> <p>I: Belum baik</p> <p>P: Berapa banyak jumlah guru-guru SBK di sekolah anda?</p>
--	---

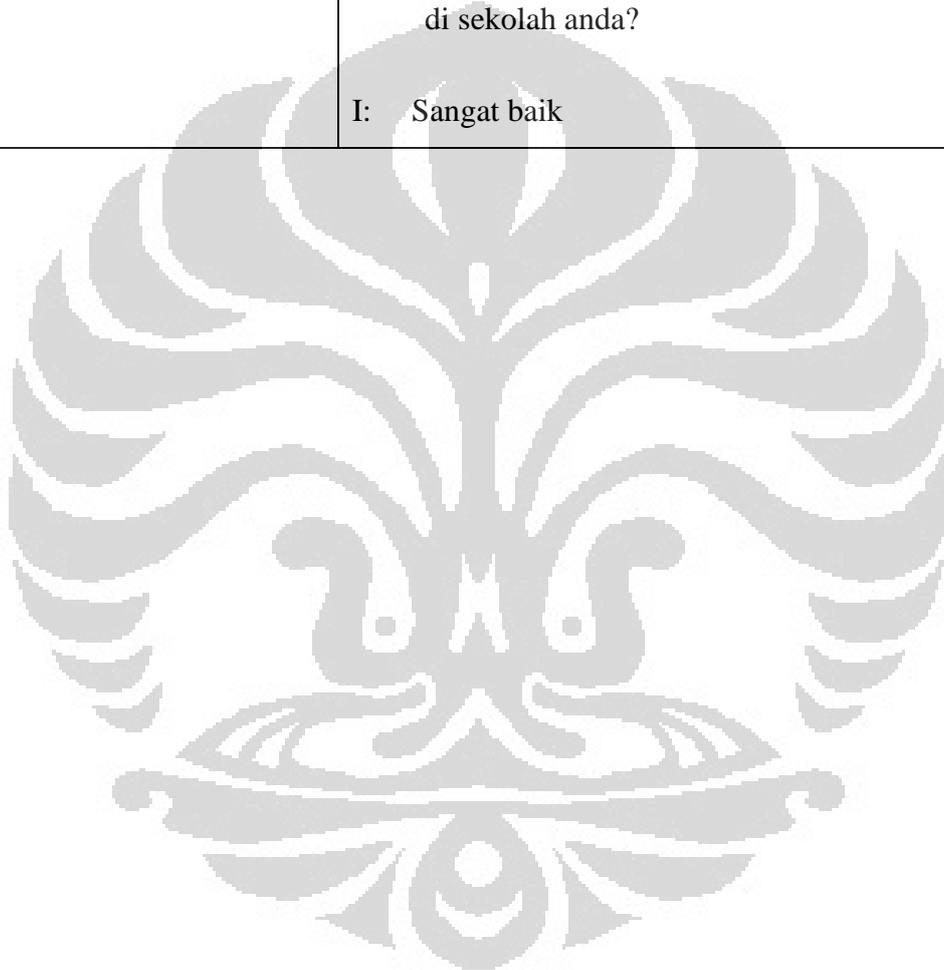
	<p>I: Saat ini kami memiliki 6 orang guru yang terdiri atas; 2 orang guru seni musik, 1 orang guru seni tari, 1 orang guru seni rupa dan 2 orang guru unruk SBK Kelas Rendah.</p> <p>P: Bagaimana dengan kapasitas kemampuan guru-guru Seni Budaya Keterampilan di sekolah anda saat ini? Sudah sesuaikan dengan disiplin ilmu Seni Budaya Keterampilan?</p> <p>I: Cukup sesuai, dan menguasai bidangnya dengan baik</p> <p>P: Fasilitas pendukung apa saja yang disediakan oleh sekolah untuk mendukung pembelajaran kurikulum seni budaya keterampilan?</p> <p>I: Ruang khusus musik, alat-alat musik (seperti band, maupun tradisional seperti angklung</p> <p>P: Bagaimana sekolah memfasilitasi berbagai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hasil-hasil pembelajaran kurikulum seni budaya dan keterampilan? Seperti kegiatan lomba-lomba, pentas seni dan lainnya.</p> <p>I: Sekolah sangat mendukung segala kegiatan kami, dan membantu mencari donator dan sponsor.</p> <p>P: Bagaimana dukungan sekolah terhadap</p>
--	--

	<p>peningkatan kualitas kemampuan anda sebagai guru seni budaya keterampilan? Misalnya mengikuti pelatihan KTSP tingkat Kecamatan, Kotamadya, Provinsi atau Nasional?</p> <p>I: Pihak sekolah selalu memberikan peluang kepada kami untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik tingkat kecamatan, kotamadya, provinsi dan nasional</p> <p>P: Bagaimanakah menurut anda, bilamana mata pelajaran SBK yang mencakup seni musik, seni tari dan seni rupa dilaksanakan oleh satu orang guru saja?</p> <p>I: Tidak bagus .Harus satu guru satu bidang studi</p> <p>P: Bagaimana cara pihak sekolah memperlakukan dan memberdayakan anda sebagai guru seni budaya keterampilan sebagai mitra pendidikan di sekolah?</p> <p>I: Baik dan mendukung apa yng dilakukan guru SBK</p> <p>P: Bagaimana cara anda beserta guru-guru seni budaya keterampilan lainnya melakukan diskusi-diskusi kurikulum seni budaya keterampilan?</p> <p>I: Melalui forum Kelompok Kerja Guru</p>
--	--

	<p>(KKG) yang selalu kami adakan tiap semester</p> <p>P: Bagaimana cara anda melakukan pendekatan pembelajaran kurikulum kepada siswa?</p> <p>I: Komunikasi dan membahas atau mengevaluasi ulang setiap pelajaran</p> <p>P: Sikap apa yang anda terapkan terhadap siswa, baik yang menyukai ataupun yang tidak menyukai seni?</p> <p>I: Bagi yang menyukai akan terus dimotivasi, bagi yang tidak suka akan diajarkan melalui audio visual</p> <p>P: Sejauhmana anda memahami standar operasional prosedur kurikulum seni budaya keterampilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah?</p> <p>I: Baik dan selalu kami terapkan sesuai dengan SOP yang telah kami sepakati bersama</p> <p>P: Bagaimana anda mengimplementasikan standar kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah anda, dari sisi durasi pembelajaran, pematangan silabus kurikulum dan lainnya?</p> <p>I: Sesuai dengan materi dan kemampuan siswa tiap-tiap jenjang</p>
--	---

	<p>P: Bagaimana target pencapaian yang dilakukan oleh guru-guru seni budaya keterampilan, mengingat keterbatasan jam pelajaran, materi kurikulum yang padat?</p> <p>I: Melalui ekstrakurikuler dan outdoor secara berkesinambungan</p> <p>P: Bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam menilai prestasi anda sebagai guru seni budaya keterampilan? Adakah penerapan penilaian reward dan punishment?</p> <p>I: Baru sebatas supervise kepada guru-guru</p> <p>P: Sejauhmana pihak sekolah mengupayakan pembiayaan-pembiayaan kegiatan seni budaya keterampilan di sekolah, mengingat sumber pendanaan yang ada hanya cukup untuk menutupi operasional rutin sekolah?</p> <p>I: Melalui dana Bos, donaur maupun sponsor.</p> <p>P: Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam implementasi kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah anda baik dalam koordinasi, pembinaan maupun pengawasan mutu kurikulum selama ini?</p> <p>I: Tidak ada sama sekali</p> <p>P: Bagaimana peran Komite Sekolah dalam</p>
--	--

	<p>mendukung implementasi kurikulum Seni Budaya Keterampilan di sekolah anda?</p> <p>I: Ikut langsung membantu dan berperan aktif membantu jalannya setiap kegiatan kesenian dan keterampilan</p> <p>P: Bagaimana struktur perangkat manajemen di sekolah anda?</p> <p>I: Sangat baik</p>
--	---



Hari//tanggal wawancara : Sabtu, 07 Januari 2012

Nama Sekolah : SD Nasional 1 Bekasi Jawa Barat

<b>INFORMAN</b>	<b>TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DAN KODING</b>
Wasis Pambudi (Guru SBK Kelas Rendah)	<p>P: Sejahteramana komitmen sekolah dalam mendukung pembelajaran kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah?</p> <p>I: Sekolah mendukung sepenuhnya pembelajaran SBK untuk lebih memfasilitasi berbagai bentuk kompetensi yang dimiliki siswa</p> <p>P: Sejahteramana upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk berkoordinasi dengan seluruh guru-guru seni budaya keterampilan?</p> <p>I: Melakukan evaluasi dari setiap program dan melakukan berbagai inovasi mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman</p> <p>P: Bagaimana cara anda berkoordinasi dengan pihak manajemen sekolah dan juga guru-guru SBKlainnya dalam hal implementasi kebijakan kurikulum?</p> <p>I: Kami selalu melakukan pertemuan reguler setiap semester dalam bentuk kelompok kerja guru (KKG)</p> <p>P: Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Bekasi terhadap pelaksanaan kurikulum</p>

	<p>seni budaya keterampilan di sekolah anda?</p> <p>P: Sebatas informasi-informasi tentang adanya lomba-lomba seni saja</p> <p>P: Bagaimana peran orang tua atau komite sekolah dalam kegiatan intra atau ekstra kurikuler. Khususnya seni budaya keterampilan di sekolah anda?</p> <p>I: Peran orangtua sangat mendukung sekali, sekaligus ikut berpartisipasi</p> <p>P: Apakah ada penghargaan atau perhatian dari Pemerintah baik dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi ataupun Pusat setelah sekolah anda mendapatkan berbagai macam prestasi baik tingkat Nasional maupun Internasional?</p> <p>I: Hanya sebatas kunjungan dan rapat koordinasi dinas saja</p> <p>P: Apabila ada suatu kegiatan lomba atau kejuaraan baik tingkat Nasional atau Internasional, dari manakah sekolah mendapatkan pendanaannya?</p> <p>I: Pihak sekolah ,orangtua murid, sponsorship dan donator</p> <p>P: Sejauhmana anda dapat memainkan instrumen musik yang ada di sekolah anda, termasuk instrumen musik tradisional, jika</p>
--	--

	ada?
	I: Kurang baik
	P: Sejauhmana anda dapat membaca, menulis not balok?
	I: Cukup baik
	P: Sejauhmana anda dapat bernyanyi dan mengaransemen paduan suara dengan 2 suara?
	I: Kurang baik
	P: Sejauhmana anda dapat menari tarian tradisional? Sebutkan jenis-jenis tarian tradisional yang anda kuasai?
	I: Cukup baik, tapi hanya tari indang dan kipas
	P: Sejauhmana anda membuat pola tarian sederhana dengan kreasi sendiri?
	I: Belum mampu
	P: Sejauhmana anda dapat melukis dan menggambar?
	I: Gambar sederhana dengan melihat pola yang ada dan diambil dari internet
	P: Sejauhmana anda dapat membuat beberapa kerajinan tangan (menganyam / teknik

	<p>jumputan / meronce)</p> <p>I: Cukup baik</p> <p>P: Berapa banyak jumlah guru-guru SBK di sekolah anda?</p> <p>I: Saat ini kami memiliki 6 orang guru yang terdiri atas; 2 orang guru seni musik, 1 orang guru seni tari, 1 orang guru seni rupa dan 2 orang guru unruk SBK Kelas Rendah.</p> <p>P: Bagaimana dengan kapasitas kemampuan guru-guru Seni Budaya Keterampilan di sekolah anda saat ini? Sudah sesuaikah dengan disiplin ilmu Seni Budaya Keterampilan?</p> <p>I: Cukup</p> <p>P: Fasilitas pendukung apa saja yang disediakan oleh sekolah untuk mendukung pembelajaran kurikulum seni budaya keterampilan?</p> <p>I: Ruang khusus musik, alat-alat musik (seperti band, maupun tradisional seperti angklung</p> <p>P: Bagaimana sekolah memfasilitasi berbagai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hasil-hasil pembelajaran kurikulum seni budaya dan keterampilan? Seperti kegiatan lomba-lomba, pentas seni dan lainnya.</p>
--	---

	<p>I: Sekolah sangat mendukung segala kegiatan kami, dan membantu mencari donator dan sponsor.</p> <p>P: Bagaimana dukungan sekolah terhadap peningkatan kualitas kemampuan anda sebagai guru seni budaya keterampilan? Misalnya mengikuti pelatihan KTSP tingkat Kecamatan, Kotamadya, Provinsi atau Nasional?</p> <p>I: Pihak sekolah memberikan informasi dan mengikutsertakan berbagai pelatihan yang diadakan oleh instansi</p> <p>P: Bagaimanakah menurut anda, bilamana mata pelajaran SBK yang mencakup seni musik, seni tari dan seni rupa dilaksanakan oleh satu orang guru saja?</p> <p>I: Kurang mencukupi dan tidak tepat sasaran. Lebih baik 1 guru 1 bidang studi</p> <p>P: Bagaimana cara pihak sekolah memperlakukan dan memberdayakan anda sebagai guru seni budaya keterampilan sebagai mitra pendidikan di sekolah?</p> <p>I: Baik dan mendukung apa yng dilakukan guru SBK</p> <p>P: Bagaimana cara anda beserta guru-guru seni budaya keterampilan lainnya melakukan diskusi-diskusi kurikulum seni</p>
--	---

	<p>budaya keterampilan?</p> <p>I: Melalui forum Kelompok Kerja Guru (KKG) yang selalu kami adakan tiap semester</p> <p>P: Bagaimana cara anda melakukan pendekatan pembelajaran kurikulum kepada siswa?</p> <p>I: Diskusi dan pembelajaran indoor maupun outdoor</p> <p>P: Sikap apa yang anda terapkan terhadap siswa, baik yang menyukai ataupun yang tidak menyukai seni?</p> <p>I: Bagi yang menyukai akan diberikan apresiasi, bagi yang tidak menyukai selalu di motivasi dan learning by doing atau melalui media audio visual</p> <p>P: Sejauhmana anda memahami standar operasional prosedur kurikulum seni budaya keterampilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah?</p> <p>I: Pihak manajemen, guru-guru selalu menerapkan standar operasional prosedur pembelajaran sesuai dengan standar KSTP yang berlaku, ditambah lagi standar operasional prosedur yang telah kami buat dan sepakati. Dalam penerapan kurikulum pembelajaran, guru-guru diberikan</p>
--	--

	<p>keluasan dalam berinovasi, terpenting tujuan akhirnya tercapai bagaimanapun caranya. Biasanya, guru-guru menerapkan metodologi pembelajaran melalui sentuhan-sentuhan kreatifitas yang diselaraskan dengan karakter dan tipologi sekolah dan siswa didik. Dan metode ini dilakukan terus secara berkesinambungan</p> <p>P: Bagaimana anda mengimplementasikan standar kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah anda, dari sisi durasi pembelajaran, pematangan silabus kurikulum dan lainnya?</p> <p>I: Sesuai dengan materi dan kemampuan siswa tiap-tiap jenjang</p> <p>P: Bagaimana target pencapaian yang dilakukan oleh guru-guru seni budaya keterampilan, mengingat keterbatasan jam pelajaran, materi kurikulum yang padat?</p> <p>I: Melalui ekstrakurikuler dan outdoor secara berkesinambungan</p> <p>P: Bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam menilai prestasi anda sebagai guru seni budaya keterampilan? Adakah penerapan penilaian reward dan punishment?</p>
--	--

	<p>I: Baru sebatas supervisi kepada guru-guru</p> <p>P: Sejauhmana pihak sekolah mengupayakan pembiayaan-pembiayaan kegiatan seni budaya keterampilan di sekolah, mengingat sumber pendanaan yang ada hanya cukup untuk menutupi operasional rutin sekolah?</p> <p>I: Melalui dana Bos, donaur maupun sponsor.</p> <p>P: Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam implementasi kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah anda baik dalam koordinasi, pembinaan maupun pengawasan mutu kurikulum selama ini?</p> <p>I: Kurang pembinaan dan pengawasan mutu kurikulum, hanya sebatas apresiasi melalui pentas seni saja</p> <p>P: Bagaimana peran Komite Sekolah dalam mendukung implementasi kurikulum Seni Budaya Keterampilan di sekolah anda?</p> <p>I: Ikut langsung membantu dan berperan aktif membantu jalannya setiap kegiatan kesenian dan keterampilan</p> <p>P: Bagaimana struktur perangkat manajemen di sekolah anda?</p> <p>I: Baik</p>
--	---

Hari//tanggal wawancara : Jum'at, 06 Januari 2012

Nama Sekolah : SD Nasional 1 Bekasi Jawa Barat

<b>INFORMAN</b>	<b>TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DAN KODING</b>
Heri Prabowo (Guru Seni Rupa)	<p>P: Sejahteramana komitmen sekolah dalam mendukung pembelajaran kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah?</p> <p>I: Sekolah mendukung sepenuhnya pembelajaran SBK untuk lebih memfasilitasi berbagai bentuk kompetensi yang dimiliki siswa</p> <p>P: Sejahteramana upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk berkoordinasi dengan seluruh guru-guru seni budaya keterampilan?</p> <p>I: Dan pihak manajemen sangat mendukung langkah kami ini. Proses komunikasi kami dengan komite sekolahpun selalu terjalin, khususnya untuk peningkatan mutu kurikulum pembelajaran seni budaya keterampilan</p> <p>P: Bagaimana cara anda berkoordinasi dengan pihak manajemen sekolah dan juga guru-guru SBK lainnya dalam hal implementasi kebijakan kurikulum?</p> <p>I: Kami selalu melakukan pertemuan reguler setiap semester dalam bentuk kelompok</p>

	<p>kerja guru (KKG)</p> <p>P: Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Bekasi terhadap pelaksanaan kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah anda?</p> <p>I: Sebatas informasi-informasi tentang adanya lomba-lomba seni saja</p> <p>P: Bagaimana peran orang tua atau komite sekolah dalam kegiatan intra atau ekstra kurikuler. Khususnya seni budaya keterampilan di sekolah anda?</p> <p>I: Peran orangtua sangat mendukung sekali,</p> <p>P: Apakah ada penghargaan atau perhatian dari Pemerintah baik dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi ataupun Pusat setelah sekolah anda mendapatkan berbagai macam prestasi baik tingkat Nasional maupun Internasional?</p> <p>I: Tidak ada</p> <p>P: Apabila ada suatu kegiatan lomba atau kejuaraan baik tingkat Nasional atau Internasional, dari manakah sekolah mendapatkan pendanaannya?</p> <p>I: Biasanya pihak sekolah akan mengupayakannya selain itu dari orangtua murid, sponsorship dan donatur</p> <p>P: Sejauhmana anda dapat memainkan</p>
--	---

	<p>instumen musik yang ada di sekolah anda, termasuk instrumen musik tradisional, jika ada?</p> <p>I: sedikit</p> <p>P: Seauhmana anda dapat membaca, menulis not balok?</p> <p>I: sedikit</p> <p>P: Seauhmana anda dapat bernyanyi dan mengaransemen paduan suara dengan 2 suara?</p> <p>I: cukup</p> <p>P: Seauhmana anda dapat menari tarian tradisional? Sebutkan jenis-jenis tarian tradisional yang anda kuasai?</p> <p>I: Tidak bisa</p> <p>P: Seauhmana anda membuat pola tarian sederhana dengan kreasi sendiri?</p> <p>I: Tidak bisa</p> <p>P: Seauhmana anda dapat melukis dan menggambar?</p> <p>I: Baik</p> <p>P: Seauhmana anda dapat membuat beberapa kerajinan tangan (menganyam / teknik</p>
--	---

	<p>jumputan / meronce)</p> <p>I: Cukup baik</p> <p>P: Berapa banyak jumlah guru-guru SBK di sekolah anda?</p> <p>I: Saat ini kami memiliki 6 orang guru yang terdiri atas; 2 orang guru seni musik, 1 orang guru seni tari, 1 orang guru seni rupa dan 2 orang guru unruk SBK Kelas Rendah.</p> <p>P: Bagaimana dengan kapasitas kemampuan guru-guru Seni Budaya Keterampilan di sekolah anda saat ini? Sudah sesuaikan dengan disiplin ilmu Seni Budaya Keterampilan?</p> <p>I: Cukup</p> <p>P: Fasilitas pendukung apa saja yang disediakan oleh sekolah untuk mendukung pembelajaran kurikulum seni budaya keterampilan?</p> <p>I: Manajemen sekolah memiliki komitmen tinggi menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung seni budaya keterampilan yang memadai dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pembelajaran. Ini memudahkan guru-guru seni budaya keterampilan dalam kegiatan belajar mengajar. Sekolah kami memiliki ruang khusus musik, alat-alat</p>
--	--

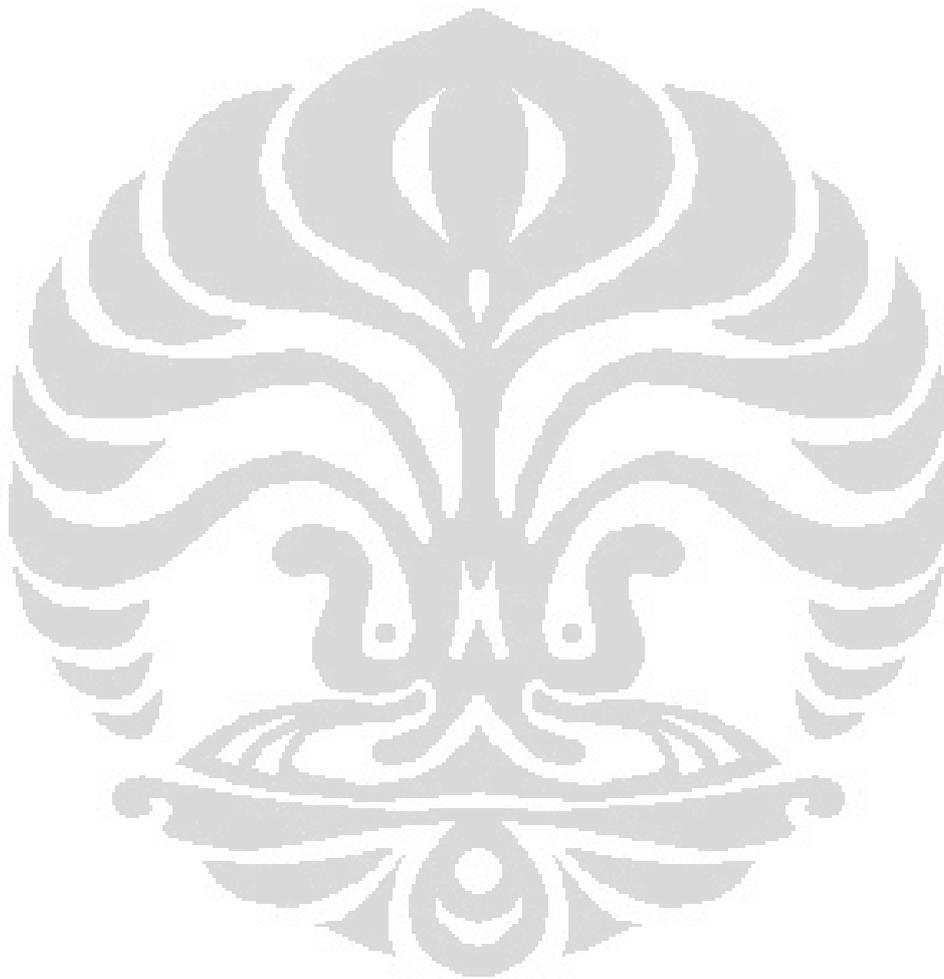
	<p>musik (seperti band, maupun tradisional seperti angklung</p> <p>P: Bagaimana sekolah memfasilitasi berbagai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hasil-hasil pembelajaran kurikulum seni budaya dan keterampilan? Seperti kegiatan lomba-lomba, pentas seni dan lainnya.</p> <p>I: Sekolah sangat mendukung segala kegiatan kami, dan membantu mencari donator dan sponsor.</p> <p>P: Bagaimana dukungan sekolah terhadap peningkatan kualitas kemampuan anda sebagai guru seni budaya keterampilan? Misalnya mengikuti pelatihan KTSP tingkat Kecamatan, Kotamadya, Provinsi atau Nasional?</p> <p>I: Pihak sekolah memberikan informasi dan mengikutsertakan berbagai pelatihan yang diadakan oleh instansi</p> <p>P: Bagaimanakah menurut anda, bilamana mata pelajaran SBK yang mencakup seni musik, seni tari dan seni rupa dilaksanakan oleh satu orang guru saja?</p> <p>I: Selayaknya 1 orang guru untuk 1 bidang studi ini lebih membuat mata pelajaran menjadi optimal</p> <p>P: Bagaimana cara pihak sekolah</p>
--	---

	<p>memperlakukan dan memberdayakan anda sebagai guru seni budaya keterampilan sebagai mitra pendidikan di sekolah?</p> <p>I: Sekolah memberikan kebebasan kami berapresiasi dan kami adalah mitra. Itu yang selalu dicanangkan pihak sekolah kepada seluruh instrument sekolah.</p> <p>P: Bagaimana cara anda beserta guru-guru seni budaya keterampilan lainnya melakukan diskusi-diskusi kurikulum seni budaya keterampilan?</p> <p>I: Melalui forum Kelompok Kerja Guru (KKG) yang selalu kami adakan tiap semester</p> <p>P: Bagaimana cara anda melakukan pendekatan pembelajaran kurikulum kepada siswa?</p> <p>I: Diskusi dan pembelajaran indoor maupun outdoor</p> <p>P: Sikap apa yang anda terapkan terhadap siswa, baik yang menyukai ataupun yang tidak menyukai seni?</p> <p>I: Proses pengembangan kurikulum berbasis kreatif, peningkatan talenta guru-guru seni budaya keterampilan harus terencana dan terukur dari sisi output (keluaran) dan outcome (manfaat). Terpenting, berbagai</p>
--	--

	<p>inovasi yang sudah kami rumuskan dan formulasikan biasanya kami selaraskan dengan asumsi dan data-data pendukung dari siswa kami. Data base kemampuan daya serap, daya pikir dan daya interpretasi siswa, kami kumpulkan dan kami analisis dari sisi personal. Siswa yang memiliki kemampuan imajinasi tinggi tidak akan kami paksakan untuk menerima materi yang menggunakan kekuatan, kelenturan fisik. Jadi analisis kemampuan siswa tetap menjadi acuan kami dalam proses penerapan kurikulum SBK tersebut. Akan menjadi sia-sia ketika kita memiliki konsepsi dan inovasi pembelajaran yang bagus, jika tidak di tunjang oleh kemampuan yang ada pada siswa (24)</p> <p>P: Bagaimana anda mengimplementasikan standar kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah anda, dari sisi durasi pembelajaran, pematangan silabus kurikulum dan lainnya?</p> <p>I: Kami selalu mensesuaikannya dengan silabus kurikulum yang ada, ditambah dengan berbagai inovasi yang kami lakukan</p> <p>P: Bagaimana target pencapaian yang dilakukan oleh guru-guru seni budaya keterampilan, mengingat keterbatasan jam</p>
--	---

	<p>pelajaran, materi kurikulum yang padat?</p> <p>I: Selalu berkesinambungan antara program indoor maupun outdoor</p> <p>P: Bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam menilai prestasi anda sebagai guru seni budaya keterampilan? Adakah penerapan penilaian reward dan punishment?</p> <p>I: Belum sepenuhnya hanya supervise secara rutin saja</p> <p>P: Sejauhmana pihak sekolah mengupayakan pembiayaan-pembiayaan kegiatan seni budaya keterampilan di sekolah, mengingat sumber pendanaan yang ada hanya cukup untuk menutupi operasional rutin sekolah?</p> <p>I: Melalui dana Bos, donaur maupun sponsor.</p> <p>P: Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam implementasi kurikulum seni budaya keterampilan di sekolah anda baik dalam koordinasi, pembinaan maupun pengawasan mutu kurikulum selama ini?</p> <p>I: Sangat kurang</p> <p>P: Bagaimana peran Komite Sekolah dalam mendukung implementasi kurikulum Seni Budaya Keterampilan di sekolah anda?</p> <p>I: Ikut langsung membantu dan berperan aktif</p>
--	---

	<p>membantu jalannya setiap .</p> <p>P: Bagaimana struktur perangkat manajemen di sekolah anda?</p> <p>I: Baik</p>
--	--



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Wahyu Maliki  
NPM : 0906589381  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama Islam : Islam  
Tempat Tanggal lahir : Jakarta, 29 September 1972  
Nama Orangtua : H. Achmad Sjamalani Hasbullah dan Hj. Sri Juniti Hasanah  
Alamat : Jl. Kawi-kawi Bawah No. L91A, RT. 017, RW. 08, Jakarta Pusat.

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD. Muhammadiyah II, Jakarta, Lulus Tahun 1985
2. SMP. Muhammadiyah 3, Jakarta, Lulus Tahun 1988
3. SMA Muhammadiyah I, Jakarta, Lulus Tahun 1991
4. Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Lulus Tahun 2001

### PEKERJAAN

Nama Instansi : Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Alamat Instansi : Jl. Jenderal Sudirman, Komplek Senayan, Gedung E Lantai 17.

## LAMPIRAN FOTO-FOTO KEGIATAN

**Paduan suara SD Nasional 1 sedang mengikuti lomba**



**Paduan suara Gita Suara Nassa sedang mengikuti  
kejuaran International di Vietnam tahun 2011**



## Ruang musik SD Nasional 1



## Beberapa Piala Kemenangan

